SEJARAH
MASIH
DITULIS

SUKARDI

Penerbit :
CV. Elsi Pro

SEJARAH MASIH DITULIS

SUKARDI

Diterbitkan oleh : CV. ELSI PRO
Jl Perjuangan By Pass Cirebon No Hp 087727871951
Email : chiplukan@yahoo.com

Editor : Safira Azzahra
Desain cover & layout : Bagja Sulaeman
Percetakan : CV. ELSI PRO
Cetakan Pertama : Juli 2023
214 Halaman
ISBN : Dalam proses pengajuan

Hak Cipta dilindungi Undang- undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

PENGANTAR ……... iii

IFTITAH …….. ix

Sejarah Masih Ditulis …….. 1

Membangun Kesadaran Kesadaran …… …. 5

Membidik Pemilih Pemula, Mendidik Politik …… ….. 11

Menggugat Makna Demokrasi …… …. 17

Pemuda di Tengah Tantangan Masa depan …… …. 23

Pemuda dan Politisasi Masjid …… ... 29

Potensi Ancaman Konflik di Pilkada ……..... 33

Bangsa Yang Tidak Bisa Bersabar …….. … . 39

Ambivalensi Kebijakan Publik …….. ….. 45

Reaktualisasi Pancasila Sebagai Ideologi ……. …... 49

Surat Terbuka untuk Wakil Rakyat ……. ….. 55

Peringatan Keras Untuk Para Penguasa ……... 59

Menilai Kinerja Kepala Daerah ……. …... 65

Menumbuhkan Etos Kerja Bangsa ……..... . 71

Menghitung Ongkos Sosial …….. …... 77

Anomali Sebuah Sistem Pemerintahan ……. ….... 83

Buruh Ditengah Kekuatan Birokrasi dan Kapitalisme ……..... 89

Birokrat, Guru dan Burung Beo ……..... 93

Eksekutif dan Legislatif Berseteru …….. 99

Budaya Kemiskinan dan Kemiskinan Budaya ……..... 105

Ekonomi yang Adil Berkesejahteraan ……..... 111

Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan ……..... 117

Imlek, Penguasa dan Wong Cilik …….. 123

Manajemen Konflik Aparat Birokrasi ……..... 129

Mengurai Konflik Internal Bangsa ……..... 133

Nyanyian Duka Para Pedagang Kaki Lima ……..... 139

Cirebon Kota "Walimah" ……..... 145

Menggugat Keabsahan Organisasi Islam ……..... 151

Menggagas Pembentukan Dewan Riset Cirebon ……..... 157

Bobad, Bengkerengan dan Bodoran ……..... 161

Haji dan Kesalehan Sosial ……..... 173

Jalan Tasauf : Upaya Penyelesaian Konflik ……..... 179

Kinerja Polisi dan Kemiskinan Materi ……..... 185

Perkosaan dalam Perkawinan ……..... 191

Pengembangan Konsep Pendidikan Integral ……..... 195

PENGANTAR

Sukardi: Kisah Aktivis Sekaligus Penulis
Oleh Taufik Hidayat
(Pemimpin Redaksi HU Kabar Cirebon)

SAYA mengenal penulis sebagai seorang aktivis remaja masjid era tahun 1990-an. Orangnya pendiam tapi memiliki sikap kritis. Sikap kritis ini kemudian ia tulis di sejumlah media massa mainstream. Yang paling sering saya baca tulisan penulis ada di "Pikiran Rakyat Edisi Cirebon". Pikiran Rakyat Edisi Cirebon sendiri berubah menjadi "Harian Umum Mitra Dialog" dan sekarang bernama "Harian Umum Kabar Cirebon.

Di antara aktivis masjid, Sukardi adalah sedikit yang rajin menulis. Posisinya sebagai seorang guru (PNS) tidak membuat ia kehilangan daya krtisnya. Ia bisa melepaskan "baju" yang dikenakannya ketika menempatkan diri sebagai penulis. Jauh di dalam hatinya mungkin terjadi pertentangan, antara profesinya sebagai seorang guru dan materi tulisan yang ingin ia sampaikan. Pertentangan batin itu rupanya dapat dilaluinya dengan ringan sehingga mampu memposisikan sebagai sorang yang bebas. Bebas menulis apa saja sesuai nalurinya, sesuai apa yang menjadi fenomena sosial saat itu.

Fenomena yang muncul sempat ia potert di antara adalah tulisan "Sejarah Masih Ditulis", seperti judul buku ini. Ia tak bisa menyembunyikan kegalauannya ketika mendengar paparan Guru Besar Unpad Ahmad Mansyur Suryanegara pada pengajian di Masjid Raya At-Taqwa pada tanggal 29 Agustus 2004. Bagi dia, perhelatan besar biasanya, paling tidak dari sisi keilmuan dengan mengambil tema sejarah Emas Muslim Indonesia terasa mubazir,

karena dihadiri sebagian besar oleh siswa SLTP, sedikit guru pembimbing agama sekolah dan minus intelektual kampus-kampus atau karena tema sejarah bagi komunitas kampus tidak begitu menarik.

Kemudian ia menulis, “Sejarah adalah masa lalu yang hanya akan menyisakan penyesalan serta menyakitkan jika buruk, dan kebanggaan kosong serta menumbuhkan kesombongan belaka jika ditulis dengan tinta emas tetapi tidak berarti apa-apa bagi perbaikan kehidupan sosial ekonomi politik masyarakat. Dan tampaknya asumsi ini tidak melulu milik komunitas intelektual Kota Cirebon, secara umum tema-tema sejarah di kalangan intelektual Republik ini tidak mendapat tempat yang semestinya. Terbukti dengan minimnya doktor atau profesor yang mengambil spesialis jurusan ini di kampus-kampus terkemuka. Padahal kitab-kitab suci dari semua agama yang ada di dunia ini, isinya didominasi oleh sejarah-sejarah para filsuf dan orang-orang bijak di muka bumi ini untuk selalu mengingatkan untuk selalu belajar dari sejarah”.

Kekeliruan bukan kesalahan

Bahkan profesinya sendiri juga tidak luput dari kritiknya. Sukardi menilai, kekeliruan terbesar bangsa kita, dan sampai sekarang kekeliruan tersebut tetap dilakukan, karena menganggap kekeliruan itu bukan sebagai kesalahan. Ini cara memandang persoalan pendidikan secara umum. Khususnya dalam memperlakukan guru sebagai orang yang berdiri di garda terdepan bidang pendidikan. Ironisnya lagi, kekeliruan tersebut oleh sebagian kalangan justru dianggap sebagai sebuah 'kebajikan'.

“Ibarat seorang penggemar burung yang menganggap telah berbuat kebajikan dengan mengurung burung di sebuah sangkar yang harganya ratusan ribu rupiah, dan setiap hari diberinya makanan serta memuji keindahan suara/kecerdikannya kemudian memamerkannya di depan khalayak dalam sebuah kontes. Suatu kebajikan yang sangat subyektif-egois dan terkesan mau menang

sendiri, karena kebahagiaan 'seekor burung' tidak terletak pada bagusnya sangkar atau dengan banyaknya pujian. Tetapi anehnya di kalangan masyarakat perilaku memasung kebebasan hidup burung ini mendapatkan pembenaran, terbukti dengan seringnya diadakan kontes suara burung dan yang sejenisnya."

Lebih jauh ia menulis, "Tanpa bermaksud menyederhanakan apalagi meremehkan profesi guru di mana idealisme menjadi syarat utama dalam aplikasi kerjanya, analogi di atas tidak jauh berbeda dengan kehidupan guru di republik ini. Berbeda dengan profesi lain, profesi guru benar-benar telah diberi 'sangkar' oleh masyarakat kita. Sangkar ini meliputi seluruh aspek kehidupan sosial ekonomi budaya seorang guru dan seorang guru yang menggugat keberadaan sangkar, apalagi berusaha untuk keluar dari sangkar dianggap telah mengkhianati profesi keguruannya."

Sebagai seorang aktivis sekaligus penulis, dedikasi Sukardi dalam dunia keislaman pun menonjol. Namun tak banyak yang mengetahui bahwa Sukardi juga punya keberpihakannya kepada mustadh'afin (kaum terpinggirkan). Bersama sejumlah tokoh aktivis masjid seperti Miqdad Husein, Eman Sulaiman Syahri, Basari Rahmat, Sugeng Prasojo, Zakaria dan Areif, sempat membuat Yayasan Kasih yang didekasikan untuk pengkhidmatan kepada kaum mustadh'afin. Jadi keberpihakannya kepada kaum penggirian bukan sekadar retorika, namun juga ditunjukkan dengan dakwah bilhal.

Perjuangan kaum pinggiran

Komitmen untuk memperjuangkan kaum mustadh'afin terus menjadi cita-cita penulis, terutama kesempatan bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Ia selalu berusaha untuk menyelamatkan siswa-siswi yang secara ekonomi tidak mampu membeli peralatan sekolah atau membayar administrasi sekolah, namun memiliki minat dan semangat belajar yang sungguh-sungguh. Tak hanya itu, kegelisahannya tentang keadilan,

kemiskinan, pedagang kecil hingga mempertanyakan Kota Wali, juga ia tuangkan dalam tulisan-tulisannya.

Setidaknya ada lima tulisan yang ia ulas mengenai hal itu di buku ini. Pertama "Budaya Kemiskinan dan Kemiskinan Budaya" (halaman 105), "Ekonomi yang Adil dan Berkesejahteraan" (halaman 111), "Nyanyian Duka Pedagang Kaki Lima" (halaman 139), "Haji dan Kesalehan Sosial" (Halaman 173) dan "Cirebon Kota Walimah" (halaman 139). Tulisan-tulisan tersebut mengungkapkan kegelisahan seorang Sukardi mengenai berbagai problem sosial yang ia lihat, rasakan dan dengar. Ia ingin mengingatkan kepada kita bahwa kesalehan ritual saja tidak cukup, karena harus diimbangi dengan kesalehan sosial.

Selain mengajar, tampaknya Sukardi ingin lebih banyak lagi berkontribusi kepada masyarakat (umat) dan bangsa melalui aktivitasnya, terutama sebagai aktivis masjid. Hal itu tercermin ketika aktivis masjid bersama kiai kharismatik, KH Ayip Muhammad Yahya bin Syekh (alamarhum) melakukan aksi turun ke jalan memprotes maraknya judi ketangkasan, minuman keras dan judi togel di Kota Cirebon. Aksi yang dinamai "Komite Geger" ini selanjutnya ditulis dengan "tinta emas" karena berhasil menumpas berbagai kemungkaran yang seolah "dilegalkan" oleh otoritas saat itu.

Pikiran-pikiran Sukardi juga cukup fasih mengenai demokrasi, politik, ekonomi, kepemudaan, budaya hingga birokrasi. Dengan gayanya yang tidak tendensius tapi cukup mengena, lebih mudah untuk memahami pesan apa yang ia sampaikan. Ada juga tulisan dengan gaya guyon cirebonan berupa dialog. Dalam "Bobad, Bengkerengan, Bodoran", sejumlah tokoh dengan nama-nama "nyerbon" berdialog tentang singkatan BBB sambil sentil sana sini.

Lepas dari itu, saya menganggap Sukardi sebagai intelektual Islam yang bebas dan berani. Ia sangat kritis bahkan terhadap semua hal. Namun, ia tahu batas-batasnya. Lantaran pembawaannya kalem dan tidak meledak-ledak, jika berbeda

pandangan dengan aktivis masjid lainnya, ia memilih diam. Dan diamnya itu kemudian ia tumpahkan dalam tulisan-tulisannya.

Membaca buku "Sejarah Masih Ditulis" ini seperti diajak ke jejak-jejak aktivis remaja masjid tahun 1990-an. Dan Sukardi adalah representasinya. Ia sedikit pun tidak punya pretensi atau syahwat untuk menjadi sesuatu. Ia potret ideal seorang aktivis masjid di zamannya. Ya, aktivis sekaligus penulis.

Terima kasih Pak Guru Sukardi yang telah membuat buku "Sejarah Masih Ditulis" ini. Terima kasih juga saya diminta untuk memberi pengantar buku ini walau di antara aktivis remaja masjid masih banyak yang senior dan lebih layak menulis pengantar ini. Maturaken kesuwun atas ilmu dan kearifan yang pernah kita "dialekkan" bersama. Sejarah mencatat, aktivis remaja masjid saat itu acap kali tersesat jalan pikirannya dan dirampok di tengah perjalanan oleh penguasa Orde Baru. Pada akhirnya Anda telah banyak menyelamatkan wajah aktivis remaja masjid ke wajah menuju "kafah".***

Cirebon, Juni 2023

IFTITAH

Sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia dan tentang perubahan yang terjadi pada watak masyarakat. Dalam paradigm Ibnu Khaldun, sejarah bukan hanya berisi fakta-fakta historis apa adanya secara eksternal, melainkan lebih dari itu. Setiap fakta historis harus diungkap dan dipahami karakter-karakter internalnya secara rasional.

Sementara menurut Joseph Toynbee, sejarah bergerak dalam satu siklus yang selalu berulang dan dalam pengulangan itu akan menemukan wujud yang berbeda, yaitu berulang dalam bentuk lebih halus dan sempurna.

Seluruh artikel dalam buku ini bisa dikatakan sudah menjadi ‘sejarah’, karena tersebar dan dipublikasikan lebih dari dua dekade lalu oleh Pikiran Rakyat Edisi Cirebon (sekarang HU Kabar Cirebon). Dan meminjam pemikiran Toynbee dengan teori siklusnya, bahwa sejarah akan selalu berulang maka tidak terlalu salah jika artikel yang terserak di beberapa edisi Surat Kabar Mitra Dialog tersebut direproduksi dan disatukan dalam sebuah buku sehingga bisa dibaca secara utuh. Penulis tetap mempertahankan *originalitas* artikel, tidak mengubah tahun, tempat, atau tokoh dalam tulisan.

Terima kasih kepada para sesepuh, sahabat, dan semua orang yang secara intens berinteraksi dengan penulis dan juga menjadi sumber inspirasi tulisan dalam buku ini: kyai Ayip Muh bin Syekh, pak Maksum Mukhtar, mas Nurdin Siraj, mas Nurdin M Noor, mas Dadang, mas Alwy, bung Ajay, ang Mus, semoga Allah SWT menerima amal saleh dan mengampuni amal salahnya.

Juga kepada para penggiat Klub Kajian Gerbang Informasi : bang Miqdad, mas Eman, mas Setyo, ang Taufik, ang Bas, ang

Badar, mas Ayi, mas Pardan, mas Sapta, mas Endang, kang Yani, mas Ugeng, bang Jack, Nardi, cak Nur, etc.

Terakhir, terima kasih dan salut kepada mas Taufik Hidayat, Pemred HU Kabar Cirebon, yang telah memberikan pengantar dan juga kepada Bu Mala yang telah membantu mereproduksi semua artikel dalam buku ini.

Sejarah Masih Ditulis

Menarik, apa yang dipaparkan Guru Besar Unpad Ahmad Mansyur Suryanegara pada pengajian di Masjid At-Takwa pada tanggal 29 Agustus 2004. Perhelatan besar paling tidak dari sisi keilmuan denan mengambil tema sejarah Emas Muslim Indonesia terasa mubazir, karena dihadiri sebagian besar oleh siswa SLTP, sedikit guru pembimbing agama sekolah dan minus intelektual kampus-kampus atau karena tema sejarah bagi komunitas kampus tidak begitu menarik.

Sejarah adalah masa lalu yang hanya akan menyisakan penyesalan serta menyakitkan jika buruk, dan kebanggaan kosong serta menumbuhkan kesombongan belaka jika ditulis dengan tinta emas tapi tidak berarti apa-apa bagi perbaikan kehidupan sosial ekonomi politik masyarakat. Dan tampaknya asumsi ini tidak melulu milik komunitas intelektual Kota Cirebon, secara umum tema tema sejarah di kalangan intelektual Republik ini tidak mendapat tempat yang semestinya. Terbukti dengan minimnya dokter atau profesor yang mengambil spesialis jurusan ini di kampus-kampus terkemuka. Padahal kitab-kitab suci dari semua agama yang ada di dunia ini, isinya didominasi oleh sejarah-sejarah para silsuf dan orang-orang bijak di muka bumi ini selalu mengingatkan untuk selalu belajar dari sejarah.

Bangsa atau komunitas yang selalu mencermati mempelajari dengan seksama, langkah-langkah yang diambil oleh para pendahulunya kemudian mengkreativitasnya dengan konteks kekinian akan menjadi bangsa atau komunitas yang besar dan memegang sejarah di masa kini Atau paling tidak, di masa mendatang dalam bidang *science* dan teknologi, konsep persambungan sejarah jelas sekali terlihat tanpa harus melakukan

studi penelitian. Mesin uap yang ditemukan pertama kali oleh James Watt, atau alat-alat canggih lainnya tidak akan terjadi tanpa ada persambungan sejarah *science*.

Jika dalam bidang *science* dan teknologi saja memerlukan sejarah dalam persambungannya. Apalagi komunitas manusia yang memiliki hasrat, cinta, dan rasa. Pergantian setiap generasi dalam suatu komunitas bukan dimulai dari titik nol melainkan merupakan proses yang berkesinambungan dan menunjukkan pertalian yang bersifat resiprokal. Artinya manakala generasi Yang ada sekarang tidak belajar dari masa lalu, kesuksesan atau kegagalan baik dan buruknya, maka Jangan diharapkan Generasi masa datang akan lebih baik dari generasi sekarang.

Sejarah keberadaan umat Islam di republik ini sarat dengan tinta emas, bahkan khazanah budaya serta cikal bakal keberadaannya dibidani oleh komunitas ini. Istilah pasar (dari kata bazar) yang merupakan institusi sosial tempat berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat berasal bahasa melayu muslim yang kelak kemudian menjadi bahasa nasional, busana batik (dari kata "ba titik" yang berarti "dengan nama" yang merupakan definisi lafadz bismillahirrohmanirrohim), simbol-simbol warna merah dan putih atau lainnya, serta hal-hal lain yang kuat pengaruhnya dalam kehidupan ketatanegaraan maupun dalam kehidupan sehari-hari penduduknya.

Tradisi emas umat Islam bisa dimulai dari Imperium kerajaan-kerajaan Islam, kejuhudan Wali Sanga, kepiawaian politisi muslim sebelum dan setelah kemerdekaan serta kegigihan para ulama dan jamaahnya dalam mempertahankan kemerdekaan sampai Pada masa ini pengguna simbol-simbol serta idiom idiom agama tampaknya efektif dalam menggugah dan memberikan spirit bagi upaya penegakan hak sebagai umat dan bangsa yang merdeka.

Setelah itu, lembaga-lembaga sosial keagamaan, partai-partai politik Islam atau paling tidak yang mengaku milik umat Islam tidak lagi menggunakan simbol-simbol agama kalaupun

simbol dipakai khazanahnya bukan dari sumber keislaman yang murni dengan kata lain telah keluar dari ‘pakem’ sejarah Islam.

Diakui atau tidak realitas politik tiga atau empat dasawarsa ke belakang, Islam sebagai sebuah umat berada dalam kondisi marginal. Berada diantara dua kubu, nasionalis dan sosialis, tampak sekali para politisi muslim tidak menunjukkan *elan vital*nya. Bergantinya rezim orde lama ke orde baru yang disusul rekayasa sejarah atau pemutarbalikkan fakta-fakta sejarah perjuangan umat Islam, penolakan hukum-hukum (adat) islam, dan hal-hal marginalisasi lain yang terang-terangan maupun yang sama terus berlangsung tanpa bisa dibendung.

Warna kematian

Dengan argumen yang didukung oleh fakta-fakta yang terbantahkan, sejarawan yang berusia 72 Tahun ini menyimpulkan bahwa umat Islam terutama generasi pasca revolusi fisik telah melupakan sejarah, bahkan bisa jadi menyalahi sejarah. Terlepas dari kondisi ekstern yang mempengaruhinya, umat sudah tidak lagi meneruskan tradisi yang telah ada dan dilakukan oleh para pendahulunya selama 15 abad lebih.

Dengan tajam Ahmad Mansyur menyoroti hilangnya identitas warna merah (dan putih) yang merupakan simbol Islam dalam tradisi umat Islam. Merah merupakan warna Fitrah yang dikhidmati oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Ibu Hawa istri Nabi Adam, al-alaq yang merupakan surat yang pertama kali diturunkan (dikaitkan dengan Proses penciptaan manusia yang berbentuk ‘nutfah’), adalah beberapa contoh bahwa warna merah merupakan fitrah. Sehingga tidak mengherankan apabila warna tulisan ‘Allah’ dalam Alquran dari berbagai mushaf menggunakan warna merah, bukan warna yang lain.

Warna baju yang disukai Rasulullah, sarung pedang, penggunaan warna bendera menyebutkan kecintaan kepada para istrinya (Humairah, yang kemerah-merahan) mengindinkasikan bahwa warna merah memang menjadi idola Rasulullah. Tradisi mengidolakan warna merah diikuti oleh para sahabat-sahabatnya

dan juga oleh para ulama pedagang yang datang ke nusantara beberapa abad kemudian.

Penggunaan warna merah di hikmati oleh para ulama Indonesia melalui berbagai momen dan kesempatan. Warna merah diekspresikan dalam warna bendera kebangsaan, dijadikan simbol pemersatu dalam memerangi penjajah dan juga dalam kehidupan masyarakat, berpolitik, berbangsa dan bernegara.

Umat Islam Kehilangan *elan vital* nya ketika warna merah tidak lagi menjadi warna idola. Ketika warna hijau mulai 0 vbhhhjn menggeser Dominasi warna merah dalam kehidupan sosial yang membutuhkan keberanian dan persatuan umat Islam. Dalam sejarah nabi dan para sahabatnya (dan beberapa hal hingga sekarang), warna hijau digunakan dalam momen yang mengundang rasa duka. Warna hijau digunakan untuk menutupi keranda mayat baju operasi para dokter penutup meja para hakim yang akan memberikan vonis bersalah, dan momen menyeramkan lainnya. Dengan kata lain, jika warna merah adalah warna dinamis yang memancarkan kehidupan, keberanian dan kemenangan maka warna hijau adalah warna kematian.

Kekalahan partai-partai yang berbasis Islam dalam Pemilu tahun 1999 dan 2004 bisa jadi karena pemilihan warna hijau dalam logo partainya, dan perolehan suara yang banyak PDIP mungkin saja karena logo partainya yang berwarna merah. Hal ini terutama terutama di kantong-kantong umat Islam yang tidak memiliki organisasi keagamaan semacam NU atau Muhammadiyah dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah atau yang fanatisme terhadap warna merah adalah warna yang disukai nabi Islam (Rasulullah Muhammad SAW) tak tergoyahkan.

Gambar logo partai islam bisa saja berlambang bintang, Ka'bah atau bertuliskan huruf-huruf Arab. Tapi dengan kemampuan baca tulis yang amat minim di kalangan akar rumput dan ketika disodorkan sekian banyak pilihan, maka secara instingtif mereka akan memilih gambar partai yang *branded image*, gambar warna partai yang familiar dalam keseharian mereka, yakni warna merah.

Membangun Kesadaran Sejarah

Berbincang dengan Mbah Mingun, satu dari sedikit orang Indonesia yang bisa mencapai usia 90 tahun, ternyata lebih mengasyikan di banding *hearing* dengan para politisi karbitan yang banyak mengobral janji membela kepentingan rakyat ketika pemilu kepada para konstituen nya tetapi setelah terpilih semua janji itu tenggelam dalam empuknya kursi.

Bercakap dengan orang yang tergolong langka di Republik yang kondisinya sekarang serba tidak karuan ini ternyata jauh lebih manfaat dibanding audiensi dengan para birokrat yang untuk menambal sebuah lubang besar yang menganga di sebuah jalan protokol harus menunggu diadakan rapat koordinasi atau harus melewati persetujuan beberapa instansi terlebih dahulu sementara sudah banyak pengendara motor yang terjebak lubang tersebut karena penerangan jalan di jalan tersebut sudah lama tidak berfungsi. Maaf, menyedihkan memang birokrat kita, minim kreatifitas dan selalu terjebak pada sesuatu yang legal formal sementara urusan rakyat kadang memerlukan penanganan yang cepat (dan memang sudah seharusnya pembangunan di era global ini memerlukan akselerasi yang sebaik baiknya) dan efisien artinya instansi mana atau berapa biaya yang dibutuhkan untuk menutupi sebuah lubang rakyat tidak mau tahu karena sudah merasa sudah membayar pajak dan telah mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah tentang urusan yang bersifat umum.

Dari pemikirannya yang sederhana (karena tidak pernah mengenyam pendidikan formal) Mbah Mingun berpendapat bahwa dari 5 jaman yang dialami nya maka dibawah pemerintahan Soeharto lah dia merasa nyaman dan tentram. Pendapat nya itu dikemukakan dengan memberikan argumentasi yang tidak bisa dibantah kebenarannya. Bahwa di pemerintahannyalah desa nya

tidak lagi gelap, jalan-jalan kampung tidak lagi becek, keamanan terjamin dan banyak lagi. Dibawah pemerintahan Belanda memang barang-barang kebutuhan murah, tetapi alat untuk membeli barang ini sulit untuk diraih. Jaman Jepang, setiap individu dijamin dengan 3 liter beras tetapi urusan sandang menjadi persoalan karena harus memakai bahan karet atau karung. Pemerintahan Soekarno sangat sulit untuk memperoleh keperluan hidup serta adanya intimidasi dari anarki PKI membuat traumatik yang berkepanjangan terhadap pemerintahan ini. Pemerintahan pasca Soeharto memang membuat Mbah Mingun makin enjoy dan kian cerdas karena informasi tentang bangsanya mudah diperoleh melalui media TV, tetapi yang tidak bisa dia mengerti adalah kerapnya desa dimana dia tinggal, dan juga desa lainnya terlibat peperangan, kasus pembakaran orang yang dilakukan oleh tetangga sebelah rumah, dan banyak lagi, persoalan lain yang tidak mungkin ditemuinya semasa semasa pemerintahan Soeharto. Sehingga pada akhir perbincangan Mbah Mingun sempat berucap lirih.... "*mendingan dadi wong bodo baelah kaya bengien lagi jamane Soeharto* (tidak tahu tentang Demokrasi ekonomi, politik) daripada perang bratayuda terus-terusan.

Jati Diri Bangsa

Cara pandang Mbah Mingun terhadap kondisi pemerintahan sekarang, barangkali mewakili sekian banyak -untuk tidak mengatakan mayoritas- rakyat dari kalangan bawah yang rata-rata berpikir instan, pragmatis serta sederhana. Mereka hanya tahu bahwa kemakmuran suatu negara diukur dengan kemudahan mereka untuk memperoleh kebutuhan pokok mereka secara minimal serta jaminan keamanan, persoalan apa, bagaimana serta siapa yang memerintah mereka (yang justru menjadi perdebatan yang menghabiskan energi dikalangan polisi) tidak menjadi persoalan.

Setelah 2 tahun lebih reformasi berjalan ternyata banyak memunculkan persoalan yang tampaknya tidak dapat diselesaikan

dengan mudah dan cepat. Perang *statement* antara elit kekuasaan, serta cara-cara yang biadab (diduga) dilakukan oleh kelompok yang terpinggirkan oleh kekuasaan dengan memprovokasi rakyat untuk berbuat anarki atau menghasut mereka untuk melakukan peperangan antar mereka yang berbeda wilayah adalah sekian banyak hal yang mengindikasikan bahwa konflik ini sulit untuk diurai. Belum lagi kasus teror bom yang membuat para investor atau wisatawan mancanegara berpikir belasan kali untuk menginvestasikan/membelanjakan dolarnya di negeri yang dulu terkenal dengan "*toto tentrem loh jinawi*" ini, negeri yang pemerintahannya selama puluhan tahun dulu mempunyai kemampuan intelejen yang luar biasa (sampai-sampai seorang bocah sekolahan yang hobinya membaca buku tentang ideologi, selain ideologi pemerintah ketika itu bisa terdeteksi dan kemudian dengan mudah dijerat dengan Undang-Undang Subversif) tetapi entah kenapa kepiawaian itu kini mendadak lenyap. Pemboman demi pemboman berlalu begitu saja tanpa bisa terdeteksi, kemudian sulitnya menangkap para provokator, dan persoalan-persoalan yang membutuhkan penanganan intelejen lainnya.

Ironis memang, reformasi yang diharapkan akan membuat kehidupan ekonomi sosial masyarakat lebih baik, ternyata justru sebaliknya, bahkan stabilitas keamanan nasional makin tidak karuan. Reformasi terkesan hanya menguntungkan politisi belaka, menangguk rupiah dan kehormatan diri dengan mengatasnamakan demokrasi, saling klaim membawa aspirasi rakyat (baca: konstituennya) di posisinya masing-masing, baik posisi legislatif maupun eksekutif. Perbedaan persepsi yang berawal dari penafsiran hukum dan perundang-undangan negara yang berbeda dan memang mempunyai peluang untuk ditafsirkan berbeda, yang terjadi antara lembaga kepresidenan dan DPR sebenarnya sah saja dalam iklim demokrasi, apalagi mengingat kooptasi yang dilakukan oleh eksekutif tiga dekade belakangan. Tetapi persoalannya menjadi lain ketika yang berbicara massa kalangan bawah yang menjadi gerbong mereka. Kekerasan dilawan kekerasan yang

berujung pada kerugian yang tidak sedikit, baik material maupun spiritual dan kian merapuhnya kesatuan dan persatuan masyarakat sebagai suatu bangsa.

Semestinya para pemutus kebijakan harus banyak belajar kepada Mbah Mingun, manusia lima jaman yang telah melalui pahit getirnya penjajahan dan heroiknya revolusi pisik. Kesabaran dan keuletan dalam menghadapi badai kehidupan, sikap empati yang ditunjukkan dengan tidak menyalahkan pihak lain yang berseberangan pendapat. Meski awam pendidikan dan tidak pernah membaca buku-buku tentang demokrasi tetapi ketekunannya mengikuti pengajian menjadikan Mbah Mingun paham betul bahwa agamanya menggariskan, ketika terjadi perbedaan pendapat harus dikembalikan kepada kitab suci yang telah diturunkan Tuhan melalui nabi-Nya.

Distorsi Informasi

Kitab Suci memberikan rambu yang jelas sebagaimana kita menyikapi suatu perbedaan bagaimana perilaku seorang beragama dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama saudaranya, bagaimana mengelola suatu perbedaan yang bisa mendatangkan rahmat dan kemashlahatan bagi semua. Perbedaan diantara umatku adalah rahmat, demikian kata Rasul dalam suatu kesempatan. Bahkan Tuhan sendiri sengaja menciptakan perbedaan diantara mahluk ciptaannya (misalnya saja dengan tidak adanya pemilikan ruas ibu jari yang sama diantara manusia), dan ternyata hal itu mendatangkan rahmat dan manfaat bagi teknologi penciptaan sensor untuk bisa mengakses/masuk kedalam suatu ruang/data.

Jika dilihat dari komposisi anggota legislatif dan juga para eksekutif semuanya nyaris bukan orang yang awam dalam pengetahuan agama, artinya rata-rata mereka memahami tentang manajemen konflik/perbedaan di atas dari sudut agama. Bagaimana mengelola suatu konflik menjadi suatu sinerji yang merupakan bekal dasar menuju sukses. Tetapi ternyata dalam implementasinya

banyak menemui kendala yang tidak sedikit, terbukti perbedaan yang ada ternyata bukannya mendatangkan rahmat, malah sebaliknya nyaris (atau jangan-jangan sudah) mendatangkan laknat.

Kejahatan lidah terus terjadi diantara para politisi dengan saling melempar statement dengan melandaskan argumentasi konstitusinya menurut penafsirannya masing-masing. Atau kadang saling menuduh, yang satu merasa menghina yang laindan sebaliknya. Dalam bahasa agama saling tuduh dikenal dengan istilah fitnah, dan fitnah itu lebih keji dari membunuh (*alfitnatu asaddu minal qotli*) sebab kalau membunuh hanya satu jiwa yang melayang maka dampak fitnah akan berakibat banyak jiwa yang menjadi korban. Terjadinya saling curiga diantara para pengikut fanatik dari masing-masing tokoh yang berseteru dan dalam jangka waktu tidak terlalu lama akan terjadi pemaksaan kehendak yang berakhir pada peperangan fisik.

Potensi peperangan di kalangan bawah sangat besar, dipicu oleh pemberitaan media massa yang demikian telanjang nyaris tanpa filter dan kadang untuk kepentingan dongkrak tiras tidak segan untuk memberi bumbu penyedap yang sifatnya manipulatif.

Kesadaran sejarah perlu dimiliki oleh orang-orang yang punya keinginan untuk mengurusi rakyat. Bahwa sejarah bukan semata-mata peristiwa masa lalu belaka, kemudian dilupakan. Sejarah bukan hanya kumpulan fakta angka-angka tahun, bulan atau hari dan jam, melainkan kumpulan peristiwa, kumpulan kebijakan penguasa dan respon atasnya. Bagaimana dampak kebijakan terhadap nasib rakyat dan juga perilaku rakyat dalam menghadapi situasi.

Kejelian dan kearifan dari para pemutus kebijakan, baik kalangan sipil mapun militer, serta para petinggi partai politik dalam memahami peristiwa yang terjadi saat sebelum, saat pemilihan dan setelah pemilihan harus benar-benar optimal. Sikap obyektifitas dengan mendahulukan kepentingan bersama, bukan melulu memikirkan kemenangan atau tercapainya rencana yang direncanakan.

Indonesia tidak akan pernah menjadi bangsa yang besar ketika para elitnya tidak memiliki keinginan untuk belajar dari sejarah yang terjadi. Karena diakui tidak, sejarah secara substantif terus akan berulang, terlepas dari perbedaan waktu dan tempatnya.

Membidik Pemilih Pemula, Mendidik Politik

Kelahiran orde reformasi yang dibidani mahasiswa dalam peristiwa Trisakti diibaratkan seorang bayi yang dilahirkan prematur, membutuhkan perhatian ekstra keras serta biaya yang tidak sedikit untuk melangsungkan hidupnya entah berapa biaya lagi harus dikeluarkan untuk membiayai sang bayi agar bisa normal. entah harus berapa nyawa lagi harus dikorbankan supaya bangsa ini bisa hidup dalam iklim demokrasi nyata bukan demokrasi kamuflase seperti dalam orde baru.

Tapi seperti diyakini sebagian besar penduduk Republik ini bahwa keprematuran "sang bayi" mesti disyukuri daripada terjadi aborsi. sehingga berapa ongkos sosial yang diperlukan perjuangan untuk mencapai iklim demokrasi nyata tersebut harus terus dilanjutkan. kemudian juga disyukuri bahwa tidak (atau jangan-jangan belum) terjadi revolusi sosial yang berdasarkan fakta yang terjadi di beberapa negara membutuhkan ratusan ribu nyawa maka sidang umum MPR beberapa bulan lalu meski tidak dapat memuaskan semua pihak dapat meminimalisir bibit munculnya revolusi sosial yang mengerikan tersebut.

Dari beberapa analisis pemerhati sosial politik Indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber konflik yang terjadi adalah pro kontra tentang pantas tidaknya pemerintah Habibie memimpin bangsa ini. Sebab ada anggapan Habibie adalah produk orde baru sehingga pola pemerintahan serta pendekatan yang digunakan dalam pemerintahan negara tidak jauh beda dengan pendahulunya, kabinet sekarang sama seperti kabinet sebelumnya, hanya namanya yang berubah. ditambah lagi berlarutnya penyusutan harta mantan presiden Soeharto, padahal pengusutan harta Soeharto merupakan salah satu tuntutan mahasiswa, bidan lahirnya Orde Habibie dan telah 'distempel legal' oleh rakyat melalui wakilnya di MPR.

Tragedi Ketapang serta tragedi tragedi yang terjadi setelah SU MPR mengidentifikasikan bahwa pemerintah Habibie meski secara *de jure* telah diakui tetapi memerlukan waktu dan energi tidak sedikit untuk diakui secara *de facto*. bahkan ada yang mensinyalir bahwa suatu hal yang mustahil pengakuan diperoleh pemerintahan ini karena sistem politik keamanan serta sistem intelijen sangatlah lemah. kerusuhan yang terjadi secara beruntun pembunuhan beberapa ulama di Banyuwangi dan pembunuhan-pembunuhan lainnya belum terungkap hingga sekarang penarikan perangkat operasi jaringan merah di Aceh digantikan oleh operasi wibawa, pengungkapan kasus Tanjung Priok yang melibatkan mantan pejabat di Orde Baru sampai isu penyadapan percakapan presiden yang sampai isu penyadapan percakapan presiden yang mengemuka di media cetak, adalah bukti konkrit dari sinyalemen ini.

Lepas dari adanya anggapan bahwa kerusuhan yang terjadi merupakan persaingan antar elit politik maka pahaman kelemahan kelemahan bidang sosial politik, sosial ekonomi maupun kelemahan-kelemahan lainnya di era reformasi ini merupakan akumulasi persoalan yang bersumber dari orde baru. sehingga bisa dikatakan bahwa Habibie cs memakan getah nangka sementara nangkanya sendiri telah dihabiskan oleh suharto sekeluarga dan kroninya.

Dari sisi ini kabinet reformasi perlu diacungi jempol atas prestasinya nekat memakan getah tanpa menyiapkan 'makanan penawarnya'. Agaknya siapapun yang memimpin negeri ini akan menemui kesulitan dalam mencari pengakuan *de jure* sekaligus *de facto*. Pemilu reformasi adalah satu-satunya jalan untuk meraih keduanya. Pemilihan umum yang bersih, steril dari rekayasa penguasa serta virus-virus demokrasi lainnya. Sebab jika pemilu model baru yang digunakan maka akan lebih memperburuk keadaan yang sekarang sudah buruk.

Pemilu sekarang ini benar-benar sangat menentukan nasib bangsa, bahkan hancur tidaknya bangsa kita. sebab kondisi chaos

sekarang ini tidak cukup diselesaikan oleh perintah tembak di tempat seorang pangab, atau dengan jaringan pengaman sosial (atau kadang diterjemahkan jaringan pengaman sendiri karena dana yang digunakan masih sering bocor oleh pengelolanya). Kondisi sekarang hanya bisa diselesaikan oleh pemilu reformasi yang jujur dan adil.

Kegagalan pemilu sekarang, karena penyelenggaraannya yang tidak bersih (entah karena ulah penguasa atau sebab lainnya) akan membuat ulah para perusuh, provokator atau apapun namanya semakin menjadi-jadi.

Mereka berusaha mempengaruhi kelompok agama yang satu dan lainnya menebar isu untuk saling perang, Mereka mencoba memanfaatkan fanatisme agama yang salah diartikan oleh penganutnya dibalut dengan kesenjangan ekonomi untuk membuat kekacauan. lemahnya sistem keamanan serta sistem intelijen pemerintah membuat mereka dapat berbuat semaunya.

Sebaliknya, jika pemilu reformasi yang bersih berhasil, maka kemungkinan akan terbentuk pemerintahan yang *legitimate*, yang disetujui oleh semua kelompok di Republik ini dan punya kekuatan untuk menyelesaikan problematika negeri ini tanpa diliputi keraguan.

Persoalannya, untuk mencapai pemilihan umum reformasi yang bersih tidaklah mudah jika para pemimpin partai yang berkompetisi dalam pemilu sekarang berorientasi pada target perolehan kursi, mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan partainya dalam retorika padahal kenyataan justru sebaliknya.

Dan memang tidak mudah menumbuhkan etika politik dalam sekejap setelah kebebasan demokrasi di berangus sekian lama. bukan pekerjaan yang gampang menciptakan orang-orang yang latar belakang sosialnya dipenuhi dengan contoh-contoh perilaku buruk, yang menganggap kekuasaan adalah segalanya, menganggap kekuasaan adalah nikmat bukan amanat,

menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya.

Pemilih pemula yang terkonsentrasi di sekolah-sekolah menengah mempunyai nilai yang sangat tinggi bagi pemenangan suatu partai. Juga bagi pemenangan moral Orde Reformasi terhadap orde sebelumnya. Sehingga pendekatan partai terhadap pemilih pemula kelompok jenis ini harus menggunakan etika politik yang baik, jujur dan tidak saling mencela antara partai satu dan partai lainnya. Karena suatu hal yang pasti lima atau sepuluh tahun mendatang merekalah yang akan menggantikan para pemimpin partai sekarang. mereka yang akan menentukan *policy* bagi kesuksesan pemilu pemilu berikutnya. sehingga pemberian contoh yang baik dalam kebijakan setiap partai untuk pemenangan pemilu merupakan investasi bangsa di masa mendatang. Mereka ada pada tahap usia yang selalu mencari jati diri melalui contoh-contoh yang diberikan lingkungannya. Mereka adalah plagiator plagiator perilaku generasi sekarang.

Kemudian yang harus pula diperhatikan oleh para pengurus partai adalah kemampuan mereka mengapresiasi kondisi sosial politik sekarang ini sangat baik, akibat kehidupan pers yang bebas. Mereka banyak menyerap informasi lebih cepat dan relatif lebih banyak dibandingkan dengan kelas mereka semasa Orde Baru. sehingga tidak mengherankan jika mereka kerap melakukan demo-demo terhadap institusi tempat mereka menuntut ilmu yang mereka anggap berlaku korup atau anti produktif.

Idealisme masih kuat tertanam dalam diri mereka, kesetiakawanan dijunjung tinggi walaupun dalam kasus tertentu menjadi buruk karena bentuk lingkungannya yang destruktif. tawuran, contek mencontek dalam ujian, merusak fasilitas umum dengan coret-coretan dan hal-hal buruk lainnya.

Untuk memperoleh dukungan dari para pemilih pemula sembari menyiapkan generasi mendatang yang berperilaku demokratis perlu diupayakan pertama, menanamkan dalam diri mereka bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi yang

menentukan nasib bangsa sendiri. istilah pesta demokrasi pada sesuatu yang perlu dirayakan, disambut dengan kegembiraan dan menentukan nasib bangsa menjadikan mereka dihadapkan pada situasi yang menuntut mereka menjadi orang penting bagi masyarakatnya.

Sehingga tidak akan ada di antara mereka yang golput atau apatis terhadap nasib bangsanya, dan juga kalah menangnya partai yang mereka pilih tidaklah penting sebab tujuan suatu pesta adalah membuat siapapun peserta menjadi gembira (semua masyarakat mengharapkan negaranya aman, tentram tanpa melihat siapa yang memenangkan pemilu dan siapa yang memimpin bangsa ini).

Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengadakan aktivitas sosial (misalnya festival seni) yang melibatkan mereka dan di sela acara tersebut diberikan bagaimana berperilaku ratis berbangsa dan bernegara tanpa menonjolkan kelebihan-kelebihan partai apalagi menggiring mereka untuk memilih. Kristalisasi pemahaman pemilih pemula diusahakan berlangsung alamiah, mereka cukup cerdas untuk mengapresiasi aktivitas sosial yang terjadi di lingkungannya.

Kedua, sekolah adalah institusi yang bisa diharapkan membentuk generasi yang demokratis, menerima perbedaan dalam satu kesatuan. pluritas bahasa daerah yang digunakan, latar belakang sosial ekonomi agama serta watak dan cara memandang para penghuninya mendukung hal tersebut. Maka tidaklah bijak jika suatu partai mendorong mereka untuk berpolitik praktis (turun ke jalan menggunakan seragam sekolah) dalam *show of force* partai. perbedaan pilihan partai cukup diretorikakan di kelas, tidak dalam aksi.

Ketiga, musyawarah antar partai peserta pemilu untuk merumuskan bagaimana memberikan pendidikan politik kepada para siswa menengah sebagai pemilih pemula perlu diupayakan. Guru sekolah yang telah diberikan status netral oleh pemerintah dapat ikut memberikan masukan bahkan dapat memberikan bantuan dalam proses penyampaian kepada para siswa. Netralitas

sangat menentukan dalam proses ini. walaupun ada kemungkinan adanya kecurigaan terhadap Salah satu partai mantan penguasa akan "bermain" tetapi sejauh pengamatan selama orde baru para siswa bisa memilih dan memilah.

Dahulu sering sekali diadakan pengerahan massa para siswa untuk kepentingan suatu golongan di permukaan tampak meriah dan riuh rendah, padahal justru jadi bumerang bagi golongan tersebut. Tidak sedikit gerutuan dan caci maki secara diam-diam keluar dari mulut para siswa peserta karena mereka dipaksa untuk melakukan kegiatan diluar jam pelajaran dan dijemur terik matahari. Jangan biarkan mereka "membeli kucing dalam karung" memilih suatu partai hanya dari indahnya suatu lambang partai dan gempitanya pawai.

Menggugat Makna Demokrasi

Pengibirian hak-hak demokrasi rakyat yang dilakukan oleh rezim Orde Baru (Orba) bisa dikatakan sangat berhasil karena dampaknya bagi kehidupan demokrasi/prilaku demokrasi penduduk negeri masih kuat mencengkeram. Indikasinya adalah kian banyaknya anggota atau kelompok masyarakat yang dalam penuntutan haknya sangat berlebihan tanpa mengindahkan bahwa tuntuannya tersebut melanggar hak dari kelompok masyarakat lainnya. Padahal esensi demokrasi adalah antara hak dan kewajiban dijalankan secara bersamaan, artinya ketika seseorang yang akan menuntut haknya maka pada saat yang sama dia juga berke wajiban menghormati hak orang lain. Kebebasan seseorang dalam melakukan aktifitas di alam demokrasi dibatasi hak orang lain dalam memperoleh rasa aman.

Ephoria politik yang ditandai dengan munculnya 48 partai peserta pemilu paling tidak mengindikasikan bahwa iklim demokrasi pemerintahan reformasi (atau transisi) lebih baik dibanding pemerintahan sebelumnya. Hanya sayangnya para politisi (baik yang kawakan maupun yang dadakan) jarang yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Ambisi memenangkan partainya dalam pemilu mendatang sepertinya telah melupakan tugas dan peran mereka untuk memasyarakatkan demokrasi di kalangan rakyat. Bahwa perbedaan merupakan rahmat bukan menjadi laknat, kemajemukan yang dimiliki bangsa ini harus disyukuri, bahwa kemenangan suatu bangsa lebih diutamakan dibanding kemenangan partainya

Demokrasi vs demokrasi

Demokrasi merupakan suatu produk masyarakat tertentu sehingga sewajarnya jika suatu kelompok masyarakat mempunyai

kehidupan demokrasi yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Demokrasi sebagai suatu produk suatu bangsa terjadi tidak sekaligus melainkan terjadi bertahun-tahun bahkan berabad-abad sebelum menjadi mapan. Demokrasi liberal (Amerika misalnya) mengalami suatu proses yang panjang serta terbentuk dari interaksi yang intens antarindividu di negara tersebut. Nilai-nilai sosial masyarakat di sana sangat kental dengan nilai individulitasnya, sehingga demokrasi di sana pun lahir, berkembang dan mapan dengan jiwa dan se- mangat individualisme.

Demokrasi liberal ala Amerika akan cocok dikembangkan dan diimplementasikan di suatu negara berkembang yang nilai-nilai sosial masyarakatnya mempunyai karakter yang sama dengan Amerika, sehingga bisa diharapkan negara tersebut akan berkembang pesat dan memperoleh kemajuan ekonomi yang berarti. Karena kemajuan ekonomi yang merupakan syarat mutlak untuk membiayai pembangunan berawal dari kehidupan demokrasi yang sehat yang sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka setengah abad lebih, adalah sangat wajar jika kehidupan demokrasi masyarakatnya belum dianggap diletakkan. dengan sangat cerdas oleh bapak bangsa pendiri republik ini, konsep yang sangat ideal karen digali dari peri kehidupan masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis dan agama.

Sayangnya idealitas konsep demokrasi tersebut tidak diimplementasikan pemerintah Orba. Demokrasi Pancasila, demikian istilah yang digunakan untuk membedakan demokrasi jenis lainnya, yang demikian luhur dan sangat baik (bahkan mungkin terbaik di dunia karena memiliki dimensi keakheratan yang sangat kuat) dalam implementasinya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dikandungnya bahkan cenderung berlawanan. Pancasila telah dijungkirbalikkan maknanya, disakralkan dan "diidiomisasikan" dalam segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat dikondisikan untuk menerima Pancasila sebagai idiologi yang telah ditafsirkan tunggal oleh pemerintah

demi melanggengkan kekuasaan. Sedemikian parahnya penyimpangan yang dilakukan sehingga memasuki era reformasi ini banyak kalangan yang alergi menggunakan istilah Pancasila dalam berinteraksi sosial. Jargon-jargon partai jarang yang menggunakan Pancasila dalam kampanyenya, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi bahkan pidato pejabat kepemudaan pun tidak lagi terdengar. Padahal nilai-nilai Pancasila akan selalu aktual sampai kapanpun (kecuali semua sepakat membubarkan republik ini) karena mengumpulkan persamaan-persamaan yang dimiliki semua etnis yang ada serta tetap mempertahankan atau menghormati perbedaan-perbedaan.

Akibat keterpurukan ekonomi dan pemberangusan hak-hak demokrasi selama berpuluh tahun sedikit banyak memunculkan inferioritas di beberapa kalangan masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi bangsa ini. Adopsi tanpa seleksi perihal demokrasi dari negara-negara maju yang dianggap telah mapan dalam hal ini demokrasi liberal menjadi trend. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang demikian pesat (informasi bisa ditransfer dalam hitungan menit), keterbelakangan pendidikan atau karena kepentingan kelompok.

Sebenarnya sah saja menggunakan sistem liberalisme dalam kehidupan demokrasi di negeri yang kuat dengan nilai religius ini, tetapi demokrasi liberal sebagai produk pemikiran manusia juga sah.

Dalam sebuah media belum lama ini disebutkan adanya kelompok kaum homoseks/lesbi yang menuntut hak agar pemerintahan pasca pemilihan kaum mereka di negara-negara liberal. Mereka meminta pemerintah mengakui eksistensi mereka dan mengklaim mempunyai massa 4 juta lebih, kemudian melakukan lobi kepada pengurus-pengurus partai kontestan pemilu dan akan mencoblos partai yang akan mengakomodasi kepentingan mereka kelak.

Kalau kepentingan mereka benar-benar terakomodasi, misalnya dengan munculnya perundang-undangan yang

mengesahkan keberadaan mereka, maka akan ada kemungkinan muncul gugatan dari kelompok pengidap 'kleptomania' (penyakit doron mencuri barang-barang kecil milik orang lain, padahal dia tergolong orang kaya) menuntut eksistensi mereka dan seterusnya.

Tuntutan hak para kaum homo bertabrakan dengan tuntutan hak perasaan aman masyarakat lain yang menginginkan kehidupan yang bersih dan menginginkan kehidupan sosial yang jauh dari laknat Tuhan (hampir semua agama mengharamkan kehidupan homoseksual yang meruntuhkan nilai-nilai sosial terutama kehidupan rumahtangga dan pengembangan keturunan generasi).

Trias politica

Universalitas yang terdapat dalam demokrasi dan diakui semua bangsa di dunia ini adalah bahwa kekuasan di tangan rakyat. Kekuassan rakyat diterjemahkan dengan berdirinya institusi legislatif yang anggotanya orang-orang yang ditunjuk rakyat untuk mengaspirasikan kepentingan mereka, kemudian lewat institusi ini pula ditunjuk eksekutif yang akan merealisasikan keinginan rakyat dalam korektif sekaligus sanksi hukum bila ada penyimpangan dibentuk pula institusi yudikatif.

Ketiga intitusi memiliki tujuan yang sama yakni setiap aktifitasnya harus beroirientasi kepada kepentingan rakyat, demi kesejahteraan rakyat banyak (bukan sekelompok kecil rakyat) bukan berorientasi nama baik anggota maupun institusi masing-masing. Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap anggota ketiga institusi tersebut harus senantiasa mengikuti perubahan masyarakat. Sebab Pancasila sebagai suatu konsep mungkin sudah final, tapi implementasinya memerlukan penyesuaian dengan perkembangan dan kemajuan ilmu perubahan sosial dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial.

Doktrin demokrasi "suara rakyat adalah suara Tuhan atau merupakan kehendak Tuhan, kepentingan rakyat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan sebenarnya bukan suara rakyat (melainkan hanya rekayasa untuk kepentingan sekelompok rakyat dengan

mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih banyak). Inilah demokrasi yang berakar kuat digali dari bumi Indonesia yang diciptakan pendahulu-pendahulu republik dan seluruh rakyat yang berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang akan menjadikan negara Indonesia menjadi negara *yang thoyyibatun wa robbun ghofur* dan menghantarkan rakyat meraih kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelat.

Belajar pada pengalaman

Sebagai bangsa yang mayoritas beragama tidaklah bijak terperosok ketiga kalinya (idealnya dua kali) dalam lubang yang sama.Maka dengan tidakbermaksud menghujat atau menggugat generasi terdahulu, tidaklah salah bagi para calon legislatif yang bertebaran di 48 partai meneliti serta mencermati kelemahan-kelemahan atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Orla maupun Orba,kemudian secara bersama-sama memformulasikan solusi yang harus diambil agar penyimpangan tersebut tidak lagi terulang. Konsep trias politica dari Montesque sebenamyasangatlah 'ideal untuk pengembangan iklim bangsa yang tercemin dalam kelima sila Pancasila dan konsep inipun sebenarnya dipakai dua pemerintahan kita (Orla dan Orba) hanya terbukti penyelenggaraan, batas wewenang dan tanggung jawab ketiga institusi (legislatif, eksekutif dan yudikatif) direkayasa untuk melanggengkan kekuasaan suatu kelompok.

Beberapa hal yang perlu dikoreksi misalnya:

Pertama, MPR sebagai lembaga tertinggi negaraharus mempunyai kedaulatan penuh, bebas dari campur tangan pemerintah. Selama beberapa dekade keanggotaan lembaga ini dipegang orang yang memiliki kedekatan emosional dengan eksekutif (masih kerabat dekat presiden, mentri, gubenur dan lainnya) sehingga keputusan yang dihasilkan oleh lembaga ini tidak rasional, cenderung menjadi alat legimitasi bagi kebijakan pemerintah. .

Kedua, di tingkat daerah, kelembagaan DPRD Imaupun DPRD II dalam prakteknya seolah menjadi bagian dalam jajaran pemerintah daerah, dengan, dalih untuk menjaga keharmonisan hubungan kedua lembaga. Seharusnya harus dipisahkan antara hubungan sebagai pribadi yang mempunyaietika ketimuran dengan hubungan kerja.

Seorang anggota dewan sudah selayaknya berlaku "galak" dalam mempertanyakan setiap langkah yang diambil pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Anggota dewan harus berani memanggil seorang walikota atau gubemur dan mempertanyakan setiap kebijakan yang ditempuhnya,mengoreksi kalau perlu memberhentikannya, tentunya dengan seijin masyarakat bukan dari birokrat yang lebih atas.

Ketiga, independensi aparat yudikatif menjadi suatu keharusan jika menginginkan tegaknya demokrasi.Selama ini jajaran aparat hukum menjadi bagian dari birokrasi, dari mulai pengangkatan pegawainya bahkan beberapa keputusan peradilannya pun dicampuri atau paling tidak steril dari intervensi kalangan birokrat. Sehingga suprernasi hukum di Indonesia mengalami titik terendah, slogan *justice* for all hanya konsep yang indah di atas kertas.

Keempat, optimalisasi fungsi BPK sebagai badan pemeriksa penggunaan uang rakyat yang digunakan pemerintah, independensi serta peningkatan kualitas personalnya merupakan hal yang mendesak untuk membersihkan praktek-praktek KKN.Juga fungsi lembaga-lembaga LSM diberikan kewenangan untuk memonitor secara aktif kerja BPK ini.

Kelima, banyak lagi hal yang jika dicermati memerlukan perbaikan dan dari sekian banyak hal yang perlu dibenahi maka semuanya bermuara pada niat baik dari orang yang memegang jabatan ketiga institusi trias politica tersebut untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang lebih baik, menjudi pelayan rakyat bukan sebaliknya, minta dilayani rakyat.

Pemuda di Tengah Tantangan Masa Depan

Pemuda memegang peranan yang sangat sentral dalam setiap perubahan peradaban, secara perlahan maupun revolusioner, Timur maupun Barat, dahulu sekarang dan masa datang. Lepas dari baik atau buruknya peran tersebut (karena baik atau buruk dalam sejarah, sangat relatif dan subyektif sifatnya; seorang pahlawan suatu negara dalam sebuah peperangan merupakan penjahat besar bagi negara yang menjadi lawannya) maka sejarah bangsa-bangsa besar di muka bumi ini banyak diwarnai oleh kelompok usia ini.

Tokoh Napoleon ketika hendak menaklukan suatu negara atau ketika seorang Hitler hendak menegakkan keunggulan ras bangsa Arya di Eropa, maka sosok pemudalah yang mereka harapkan untuk mewujudkan ambisi dan akhirnya juga menjadi cita-cita segenap rakyatnya (berkat kepiawaian propaganda dan agitasi sang tokoh).

Perjalanan republik ini juga tidak lepas dari peran pemuda yang begitu menyejarah. Perlawanan fisik untuk menegakkan hak asasi yang paling mendasar yang sifatnya sektoral di beberapa daerah kurang berhasil karena selalu dapat cepat diredam oleh penjajah ditambah lagi dengan makin banyaknya kontak para pemuda terpelajar dengan dunia luar memunculkan kesadaran bahwa perlawanan akan lebih efektif jika dilakukan berkelompok (tidak sektoral) dan perjuangan fisik hanyalah salah satu alternatif. Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 yang dihadiri oleh beberapa kelompok pemuda dari beragam etnis menandakan dimulainya perjuangan pemuda melalui jalur politik. Dengan pengakuan para pemuda bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu juga menunjukkan sampai dimana kebrilianan orang yang dianggap *inlander*, manusia kelas dua oleh para penjajah.

Tujuh belas tahun kemudian, lagi-lagi atas prakarsa serta kecerdasan pemuda yang melakukan improvisasi (kalau tidak bisa dikatakan menculik para seniornya, Bung Karno dan Bung Hatta) hingga dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan yang menentukan arah perahu bangsa.

Komunisme yang mengancam tradisi masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai religius dan santun terhadap sesama dijawab oleh pemuda dengan merapatkan barisan dalam KAMI, KAPI dan kelompok-kelompok pemuda lainnya. Sayang, keberhasilan perjuangan para pemuda dalam menumpas komunis ini nampaknya juga menjadi awal bencana buat mereka. Mencermati gerak dan pola perjuangan para pemuda dalam kelompok serta militansi yang dimilikinya, penguasa (dalam hal ini rezim orde baru) bergegas membuat peraturan perundangan yang membatasi ruang gerak para pemuda, penguasa berupaya untuk memandulkan atau paling tidak meminimalisir kekuatan kelompok pemuda.

Mahasiswa dan pelajar dibentuk menjadi seorang pandai secara intelektualitas semata, mereka tidak boleh mengurusi kondisi rakyat dan bangsa mereka. NKK (Norma Kehidupan Kampus) serta OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) yang aturan mainnya telah ditentukan oleh penguasa adalah satu-satunya aktifitas ekstra yang unsur yang handal dan menampung segenap aspirasi kalangan pelajar dan mahasiswa. KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) suatu organisasi yang anggaran dasar dan anggaran rumahtangganya ditetapkan oleh penguasa adalah organisasi puncak yang mengawasi para aktifis pemuda di luar sekolah. Dirasa masih kurang rezim ini juga membuat undang-undang anti subversi dengan tingkat penafsiran yang sangat fleksibel (baca: seenak penguasa)

Sebuah perjuangan

Tumbangnya rezim Orde Baru, lagi-lagi tidak lepas dari peran pemuda. Jika pahlawan muda Arif Rahman Hakim bersedia berkorban menjelang tumbangnya Orde Lama, maka empat orang

mahasiswa menyusul menjadi tumbal reformasi dalam Tragedi Semanggi tanggal 12 Mei 1999. Gugurnya mereka ibarat bensin yang menyiram percikan api yang selama ini tersimpan dalam sekam. Gelombang protes terhadap kedzaliman rezim yang berkuasa selama 32 tahun terjadi hampir di seluruh pelosok negeri. Sembilan hari kemudian, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah perjalanannya sebagai suatu bangsa.

Pemuda (mahasiswa) terkesan tidak siap setelah perjuangan mereka meruntuhkan Orde Baru berhasil, tercermin dari perbedaan di kalangan mereka dalam menyikapi pemerintahan transisi pasca Orde Baru. Hal ini dimungkinkan karena tekanan yang dilakukan pemerintah sebelumnya dalam hal kebebasan berdemokrasi serta wacana atau literatur yang dipelajari para mahasiswa.

Naluri dasar sebagai manusia yang dimiliki oleh mahasiswa untuk mengekspresikan hak-hak asasi tidak bisa tersalurkan, bingkai "demokrasi semu" yang diciptakan penguasa untuk masyarakat ilmiah tempat dimana mereka menimba ilmu tidak lagi cukup membendung hasrat mereka yang dinamis. Ditambah lagi dengan keberpihakan (sebagian besar) staf pengajar dan institusi akademik kepada kebijakan penguasa (karena tuntutan jabatan sebagai pegawai pemerintah), membuat mereka mencari serta mempelajari dan akhirnya menyerap ide, konsep, ideologi politik yang dimiliki negara lain. Terjadi fragmentasi di kalangan mahasiswa dalam menyikapi suatu rezim, terutama pemerintahan pasca kejatuhan Orde Baru.

Beberapa mahasiswa menghendaki pemerintahan darurat sipil yang dipegang oleh suatu dewan yang beranggotakan empat atau lima tokoh reformis versi mereka dan mempunyai agenda utama menyelenggarakan pemilu. Sebagian mahasiswa yang lain menerima keputusan MPR mengangkat Habibie, yang semula menjadi wakil presiden menjadi presiden, sambil tetap menganggap pemerintahan Habibie sebagai pemerintahan transisi, sampai dilaksanakannya pemilu guna membentuk pemerintahan yang lebih legitimate.

Meski berbeda pandangan dalam bidang politik, tapi ada kesamaan dalam tuntutan mereka, yakni mengusut penyelewengan yang dilakukan mantan Presiden Soharto, dihapuskannya dwifungsi ABRI, serta amandemen UUD 1945. Kuatnya pressure yang dilakukan oleh mahasiswa ditambah lagi dengan keterbukaan politik dalam pemerintahan Habibie dan kebebasan pers dalam mengungkap fakta yang menjadikan masyarakat kian cerdas dalam menyikapi persoalan-persoalan negara yang dulu nyaris tabu diketahui oleh rakyat menjadikan para pemegang keputusan, baik eksekutif, legislatif dan aparat keamanan mengubah kebijakan institusinya secara mendasar, menyesuaikan dengan keinginan publik.

Sikap radikal

Radikalisme di kalangan pemuda sebenarnya bermanfaat manakala menghadapi suatu kedzaliman dari kelompok (penguasa) yang berlagak pilon. Radikalisme diperlukan manakala terjadi stagnasi sosial dalam melakukan kontrol kebijakan suatu rezim.
Ketika institusi formal dan nonformal tidak berfungsi, maka saatnya idealisme pemuda yang radikal muncul meski dalam mengimplementasikannya diperlukan darah atau nyawa sekalipun.

Tetapi idealisme pemuda yang radikal ini pun akan tidak bermanfaat atau malah destruktif ketika situasi sosial masyarakat tidak stagnan. Jika katup demokrasi telah dibuka lebar oleh penguasa, baik melalui media pers atau saluran lainnya.
Artinya radikalisme yang ideal bersifat situasional, tidak *hantam kromo*. Radikalisme tanpa didukung nalar akan menumbuhkan superioritas yang counter productive di kalangan pemuda itu yang pada gilirannya akan memunculkan kedzaliman baru.

Berkaca dari perjuangan pemuda 28 Oktober 1928 dan masa sesudahnya, di sana ada benang merah yang jika dicermati dan dipelajari secara seksama akan nampak jelas bahwa pemuda (terutama mahasiswa/pelajar) di masa apapun harus berjiwa kritis dan independen. Kritis dalam menyikapi situasi sosial politik yang

ada di sekitarnya dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Bersikap tanpa pamrih, tidak terjebak pada 'permainan uang' dalam menyuarakan aspirasinya.

Paradigma Indonesia Baru

Duet Gus Dur dan Megawati dalam mewujudkan kemakmuran rakyat memasuki milenium ketiga harus disikapi secara cerdas. Dengan tetap memposisikan sebagai pengawal demokrasi, pemuda sebagai bagian terbesar dari penduduk republik ini harus tetap memberikan kontribusinya. Setelah melalui sidang umum dan terpilihnya kedua pemimpin tersebut maka tampaknya kehidupan sosial politik yang relatif stabil dan lebih demokratis. Sehingga upaya peningkatan kualitas pemuda sebagai sumberdaya yang sangat potensial untuk mencapai kemakmuran ekonomi rakyat, dan juga sebagai kelompok yang kelak akan memimpin bangsa ini lebih konsentratif.

Aksi turun ke jalan memperjuangkan kepentingan rakyat selayaknya dikurangi. Pemuda harus menjadi pelopor dalam mengisi pembangunan bukan sebagai penyebar teror atau ketakutan karena kerapnya aksi unjukrasa yang berdampak pada instabilitas. Sambil memberi kesempatan pemerintahan baru untuk membenahi kehidupan ekonomi sosial rakyat yang carut marut, maka pemuda harus terus menggali ilmu pengetahuan dan teknologi yang selama ini agak ditinggalkan karena kesibukan memperjuangkan nasib rakyat. Mencoba membentuk sikap demokratis dengan tidak memaksakan kehendak, tidak mudah diajak untuk berbuat anarkis.

Aktualisasi semangat sumpah pemuda 1928 perlu terus dipompakan kepada segenap pemuda. Sudah saatnya kita "berperang" dengan bangsa lain bukan dengan bangsa sendiri dengan mempermasalahkan sistem demokrasi, perwakilan atau langsung, proporsional atau distrik.

Melalui seminar, dialog ilmiah hal-hal tersebut dapat diselesaikan secara perlahan. Menghadapi konstelasi (percaturan) sosial politik dengan negara-negara lain dibutuhkan pemuda-

pemuda yang mempunyai keahlian lebih, baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun mentalitas kewirausahaan yang profesional.

Moralitas hipokrit yang menjadi biang kerok kejatuhan bangsa, yang berdampak buruk terhadap kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia harus dimulai disterilkan. Usaha ini dimulai dari pemuda. Sterilisasi bisa dimulai dengan pembenahan atau peningkatan kehidupan keagamaan, sebab omong kosong menciptakan moralitas suatu bangsa yang kuat dengan nilai religius tanpa kedekatan dengan Tuhannya.

Sumpah satu Tanah Air, satu Bangsa, dan satu Bahasa merupakan modal dasar untuk mengkompromikan persoalan-persoalan sosial yang besar sekalipun. Adanya beberapa pemuda (Sulawesi) yang menginginkan lepas dari negara kesatuan RI dapat dipahami sebagai puncak dari persoalan-persoalan masa lalu yang terlalu sentralistik dalam kebijakan pemerintahan.

Pemuda dan Politisasi Masjid

Astaghfirulloh, sebuah masjid di Jawa Timur dibakar habis oleh massa. Meski masjid tersebut berada di tengah pesantren yang (diduga) seorang kyainya berkunjung ke Gedung parlemen di Jakarta tetapi hal tersebut tidak lah cukup kuat untuk membiarkan perilaku "bar- bar" yang menyakitkan segenap hati kaum muslimin Indonesia itu terjadi. Bandingkan dengan kasus tanjung priok saat rezim orde baru berkuasa yang menewaskan belasan (versi pemerintah, tetapi puluhan nyawa menurut cerita dari saksi hidup kasus tersebut) muslimin yang dipicu oleh perilaku arogan apparat keamanan yang sengaja masuk ke masjid tanpa melepas sepatu. Masjidnya tetap berdiri kokoh, tetapi jamaahnya rela mengorbankan nyawa demi eksistensi serta kesucian masjid mereka.

Dan tampaknya *istighfar* penulis tidak berhenti usai membaca surat kabar yang melansir berita pembakaran masjid tersebut, karena setelah itu tanpa disengaja penulis banyak menemui stiker yang berisi imbauan untuk memberikan dukungan pada salah satu tokoh dari partai politik tertentu tertempel di masjid- masjid di wilayah Kota Cirebon. Masjid yang Rasulullah melarang di dalamnya dilaksanakan aktifitas perdagangan (ekonomi) digunakan semena – mena untuk dagangan (politik), masjid yang semestinya menjadi media pembinaan untuk menyatukan ummat islam dalam melawan kemaksiatan kini terkesan menjadi media ajang pemecah-belah ummat karena sarat dengan stiker yang berisi statement-statement atau dukungan - mendukung terhadap tokoh panutan menurut selera pengurus masjidnya masing-masing.

Masjid milik publik yang berada ditengah-tengah masyarakat yang memiliki keragaman dalam hal pilihan politiknya

tereduksi menjadi masjid milik golongan tertentu. “Pengkotakan” masjid kembali terjadi, bedanya kalau dulu dipicu oleh persoalan-persoalan fiqh (penggunaan qunut, jumlah rakaat shalat tarawih, jumlah azan ketika sholat Jumat). Sekarang bersumber dari persoalan politis.

Fenomena ini nampaknya akan terus berlangsung seiring dengan gonjang -ganjing dunia perpolitikan yang penyelesaiannya sekarang ini ibarat mengurangi benang ruwet yang basah. Dan yang menjad pertanyaan adalah sejauh manakah kewenangan pengurus masjid menyatakan sikap politiknya secara vulgar dengan menggunakan masjid yang dikelolanya sebagai media sehingga jamaah masjid, baik yang tetap maupun yang insidental mengetahui keberpihakan jajaran pengurus terhdap suatu partai politik. Dan bagaimana sebaiknya pemuda/ remaja (aktifis masjid) yang relatif masig memiliki idealisme dan ghiroh keislaman yang baik menyikapi fenomena ini.

Kilas balik dakwah menghadapi pelarangan jilbab bagi siswa di beberapa sekolah menengah di Cirebon pada awal tahun sembilan puluhan memaksa pemuda/remja untuk mencari format organisasi yang agak steril dan jauh dari ranjau serta kooptasi penguasa (melalui keberadaan undang-undang keormasan) ketika itu. Kalau kemudian dipilihnya masjid sebagai wadah organisasi karena pengetahuan agama mereka kebetulan cukup memadai dan memang tampaknya hanya masjid yang sanggup menampung keberagaman latar belakang ekonomi, sosial, politis, para pemuda.

Pilihan Forum Komunikasi Remaja Masjid (FKRM) yang tidak berafiliasi kepada organisasi keagamaan yang telah mapan tampaknya menjadi solusi ideal dalam menyiasati indoktrinasi lembaga sosial politik pemerintah yang merupakan mesin politik Orde Baru dan yang tugas utamanya mengebiri potensi gerakan pemuda. Meski terkesan FKRM ini menjadi tandingan Badan Remaja Masjid bentukan Departemen Agama tetapi penguasa tampaknya “merestui” keberadaan forum ini.

Pertama, karena aktifitas forum ini menekankan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, baik dari sisi keimanan maupun keterampilan sosial (misalnya dengan Festival Anak Masjid, Jambore Anak Islam Cirebon, temu jurnalistik, pendidikan anak yatim, koperasi dan kegiatan keagamaan lainnya). *Kedua*, karena sifat forum yang terbuka dan akomodatif terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan "produk asli"pemerintah (misalnya kerja sama dengan bazkod PHBI dan lainnya).

Idealisme dan kesamaan visi, mengibarkan *izzul islam wal muslimin* serta dengan mengusung jargon *ingsun titip mesjid lan fakir miskin*, menjadikan forum ini secara internal sangat solid dan memperoleh simpati dari, baik masyarakat awam, (sedikit) kalangan birokrat yang "tercerahkan", anggota legislatif, aparat keamanan, akademisi maupun kalangan pesantren. Sehingga akses untuk memperoleh informasi intelijen atau data yang "sangat rahasia" di tingkat penguasa hingga rakyat kalangan bawah sekalipun mudah diperoleh.

Kalau kemudian format forum diganti dengan badan yakni bergantinya FKRM menjadi BKPRMI (badan komunikasi pemuda remaja masjid indonesia) pada tahun 1995 (tepatnya tanggal 27 mei), hal tersebut semata – mata karena didasarkan pada strategi pergerakan dan pengembangan dakwah belaka. Karena wadah atau bentuk organisasi hanyalah media bukan tujuan, meski diakui dalam beberapa hal, misalnya menyangkut legislasi dari pihak penguasa ketika itu mutlak diperlukan.

Dengan "baju"yang baru, format gerakan dakwah pemuda lebih luas, terutama dalam hal penegakan *nahi munkar*. Bahkan boleh dikatakan porsi memerangi kemungkaran ini lebih mendapat prioritas. Sifat akomodatif terhdapat pemerintah kota tetap menjadi standar, dan memang sudah semestinya demikian karena sebagai organisasi yang mengusung nama masjid haram bersifta apriori terhdap ide-ide atau gagasan -gagasan yang berasal dari manapun.

Sayyidina Ali Bin Abi Thalib pernah berpesan untuk menjauhi sikap apriori ini dengan tidak terlalu mempersoalkan

“siapa” tetapi sebaiknya memperhatikan “apa” yang dikatakan dalam hal kebaikan. Hikmah adalah milik umat islam yang hilang, jika kita menemui hikmah tersebut dimana dan dari mana (bahkan dari musuh) maka ambillah.

Kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah kota, terutama mengenai penyalahgunaan perijinan tempat hiburan, restoran dan hotel yang diduga mengadakan praktek-praktek kemaksiatan terus dilakukan. Koordinasi dengan ormas kepemudaan maupun kalangan pesantren terus di galang, juga lobi dengan aparat keamanan sebagai penegak hukum. Kalau kemudian terjadi tindakan anarki dengan dibakarnya alat-alat yang digunakan untuk berjudi karena pemerintah seolah menutup mata terhadap fakta yang terjadi di lapangan.

Potensi Ancaman Konflik di Pilkada

Bak anggota geng motor yang sedang melantik anggota baru, tiga orang warga Sulawesi Selatan tampak dalam layar kaca salah satu TV nasional memporakporandakan kaca-kaca kantor Panitia Pengawas Pemilu daerah setempat. Entah sadar atau tidak bahwa setiap detail pengrusakan mereka dilihat oleh puluhan juta mata pemirsa di seluruh pelosok Indonesia, yang pasti ekspresi muka mereka terlihat sangat emosional. Kalau saja ada kesempatan mereka mungkin akan membakar habis gedung yang bisa dianggap simbol demokrasi tersebut.

Sementara itu, dari jutaan mata yang melihat perilaku destruktif tersebut ada di antaranya dua pasang mata yang justru menyukuri tindakan nekad ketiga orang tersebut. Bahkan dalam hati mereka terbetik harapan bahwa tindakan ketiga orang tersebut diikuti oleh para pendukung lainnya. Dua orang calon yang (mungkin) akan dikalahkan dalam pilkadal tersebut berharap "huru-hara" yang terjadi usai pencoblosan itu akan bisa mendorong KPUD untuk menganulir hasil pemilihan.

Dari narasi berita yang menyertai tayangan gambar tindakan ketiga destruktor itu diketahui bahwa KPUD setempat memang belum mengumumkan hasil pemilihan, tapi dari pengumuman penghitungan suara sementara memang peluang menang sang calon yang diusungnya sangat tipis. Dan kasus kisruh pilkadal tidak hanya di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan beberapa wilayah Nusantara yang kebetulan bersamaan waktu penyelenggaraannya mengalami hal serupa. Robohnya pagar kantor KPUD, unjuk rasa yang berbuntut bentrok dengan aparat, perang antar pendukung dan hal-hal anti demokrasi mengiringi penyelenggaraan pilkadal.

Di mana atau apa yang menjadi akar masalah- nya sehingga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung kerap diwarnai oleh ketidakpuasan dari pihak yang kalah dan berujung pada pengrusakan fasilitas publik. Kekerasan demi kekerasan yang mewarnai pilkada seakan menunjukkan bahwa masyarakat kita belum siap dengan demokrasi langsung. Konflik demi konflik yang mengiringi pilkada seakan mengindikasikan bahwa rakyat lebih memilih demokrasi perwakilan, di mana sang kepala daerah dipilih oleh anggota dewan perwakilan yang ada duduk di lembaga legislatif.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk membandingkan sistem langsung dengan sistem perwakilan dalam demokrasi, apalagi bermaksud menghakimi ketiga orang pendukung yang melakukan tindakan pengrusakan dan memasukkannya sebagai tindakan kriminal sehingga perlu dihukum sesuai dengan KUHP yang berlaku dengan menafikan faktor penyebab (baca: aktor intelektual) yang mendorong mereka untuk melakukan- nya.

Feodalisme akut.

Secara umum masyarakat kita memandang kekalahan sebagai sebuah "aib besar yang tidak bisa diampuni", masyarakat kita tidak memandang kegagalan sebagai-seperti kata iklan sebuah rokok- enjoy yang tertunda. Indikasi ini bisa dibuktikan dalam beberapa momen pertandingan sepak bola dalam Liga Indonesia atau momen pertandingan di tingkat kampung atau RW. Tidak jarang terjadi baku hantam antar supporter seusai pertandingan. Para pemain atau supporter dari kelompok kalah akan memandang setiap keputusan wasit tidak benar, berat sebelah dan dalih lain yang bisa dijadikan alasan untuk melakukan tindakan kekerasan. Penulis sengaja memilih jenis olah raga sepak bola karena sepak bola merupakan salah satu olah raga yang sangat merakyat.

Di sisi lain, para pemain atau para supporter yang menang pun jarang yang menganggap bahwa kemenangannya diperoleh karena pihak lawan kebetulan bermain tidak maksimal, mereka

menganggap bahwa kemenangan yang diraih karena mereka memang hebat sementara lawan merupakan pecundang abadi yang sah untuk dihina atau dilecehkan keberadaannya. Sikap superioritas yang berlebihan ini hampir dimiliki oleh sebagian tim pemenang.

Menyikapi kalah dan menang dengan cara ekstrim yang menumbuhkan superioritas yang berbau narsis ini sebenarnya muncul karena adanya karakter inferioritas akut yang dimiliki mayoritas rakyat kita. Dari sejarah kita bisa belajar bahwa dua setengah abad lebih bangsa kita di jajah. Secara fisik mungkin kita sudah merdeka tetapi kultur feodalisme yang dibentuk oleh penjajah masih melekat kuat dan menjadi bagian kehidupan masyarakat kita. Bahwa kemudian kemenangan adalah menjadi satu-satunya cara untuk mengikis inferioritas ini merupakan konsekwensi logisnya. Akhirnya jadilah setiap orang mendambakan kemenangan bagaimanapun caranya, atau kalaupun dikalahkan harus dicari "kambing hitam" agar kekalahan itu bukan karena kelemahan melainkan karena dicurangi.

Kepiawaian penjajah dalam menafikan nilai- nilai sosial juga terlihat dengan memecah bangsa ini dalam "kasta-kasta". Kasta kaum terpelajar yang jumlahnya relatif sedikit diangkat menjadi pegawai pemerintah yang mengabdi kepada penjajah yang mengatur urusan kasta jelata. Pendekatan yang digunakan oleh kasta pelajar kepada rakyat (yang notabene merupakan bangsanya sendiri) jelas pendekatan dalam rangka kepentingan kekuasaan (penjajah). Orientasi yang digunakan adalah bagaimana cara melanggengkan jabatannya sebagai pegawai pemerintah, soal cara-cara yang digunakan itu merugikan rakyat secara umum tidaklah penting.

Hingga kini, meski kita sudah merdeka tapi kultur bentukan penjajah ini masih sangat terasa, Orang-orang pintar di negeri yang telah merdeka 62 tahun lalu justru menjadi musuh rakyat, Para bankir melego dana BLBI terus kabur ke Singapura, para birokrat yang pintar membuat anggaran memanipulasi dana rakyat, para pemborong mengurangi komposisi bahan untuk membuat projek

rakyat, dan lain sebagainya, Nilai-nilai moral hanya ada di buku-buku sekolah dan dipidatokan di lembaga-lembaga keagamaan belaka. Bahkan hanya di Indonesia, departemen yang mengurusi soal-soal agama justru memiliki tingkat korupsi yang paling tinggi di antara departemen lainnya (setidaknya itulah yang dilansir oleh salah seorang orang nomor satu republik ini pada era yang lalu).

Sistem patron

Meski feodalisme yang dikembangkan terlihat buruk tapi sebenarnya ada sisi positif yang bila dilihat dari sisi komunal bisa menjadi bekal dasar bagi terbentuknya sebuah negara yang solid. Sisi positif itu adalah masyarakat kita sudah terbiasa dengan *sabdo pandito ratu*, ikut kepada pimpinan, tokoh, sesepuh atau seseorang yang dipandang memiliki kelebihan dibanding orang kebanyakan. Seseorang ini bisa seorang tokoh agama, tokoh politik, tokoh pengusaha sukses dan yang lainnya.

Sistem patron (ketokohan) ini dalam setiap orde pemerintahan/rezim di Indonesia tetap berakar kuat dengan segala variasi perkembangan teknologi dan sosial kemasyarakatan. Banyak program-program pemerintah yang ketika menggunakan pendekatan formal kenegaraan sulit untuk "dibumikan" di tengah masyarakat tetapi dengan bantuan tokoh agama/masyarakat menjadi mudah.

Para tokoh politik yang maju dalam pilkada ini tampaknya juga memahami realitas sosial patron yang ada di masyarakat dan memanfaatkan secara sewenang-wenang demi kepentingan individu/kelompok partai politik yang mengusungnya. Sehingga tidak terlalu mengherankan ketika dilakukan perhitungan suara pasca-pemilihan ternyata peluangnya kecil untuk meraih kemenangan, sang tokoh politik tersebut menghembuskan isu terjadinya kecurangan dalam perhitungan maupun dalam proses pemungutan suara.

Sikap tidak mau menerima kekalahan ditambah lagi dengan bayangan menumpuknya utang kepada pihak ketiga yang

jumlahnya mencapai miliaran rupiah saat membayar upeti kepada pengurus partai politik dari mulai pengurus ranting, daerah sampai ke pusat saat pencalonan serta untuk pembiayaan saat kampanye maka kecenderungan para calon yang kalah dalam pilkada akan membiarkan para pendukungnya berbuat anarkis.

Pilkada Cirebon

Friksi yang terjadi di beberapa partai politik di Kota Cirebon saat pemilihan calon wali kota yang akan diusung pada pilkada, juga bukan tidak mungkin akan berpotensi memunculkan konflik antar para pendukung. Tersingkirnya Suryana, Sunaryo dan Agus Alwafier yang bisa disebut sebagai "dedengkot" dari partainya masing-masing sedikit banyak akan membuat suasana Kota Cirebon akan memanas menjelang 6 Januari 2008 mendatang.

Diterimanya pinangan PDIP kepada Sunaryo untuk menjadi calon wakil wali kota yang dianggap sebagai "pengkhianatan" oleh Partai Golkar, upaya Suryan mencari "kendaraan" politik untuk maju dalam pilkada setelah disingkirkan dari PDIP, gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh Agus Alwafier pasca-tersingkir dari PAN untuk membangun koalisi, dan sikap "bingungnya" sikap PKB dalam menentukan pilihan calon menjadikan pilkada Kota Cirebon semakin menarik untuk dicermati.

Meski potensi konflik terus membayangi pelaksanaan pilkada tapi potensi akan tetap menjadi potensi dan tidak berkembang menjadi realitas manakala setiap tokoh-tokoh politik serta politisi *iner circle*nya bisa berlaku sebagai pemimpin yang baik dengan meredam setiap tindakan anti demokrasi atau tampil di muka pendukungnya manakala mereka bertindak anarkis.

Pelaksanaan pilkada hanya tinggal menghitung hari, berhasil tidaknya proses demokrasi di Kota Cirebon tergantung kepada para politisi yang dianggap "wong pinter" oleh konstituennya. Apakah mereka akan menjadi para pendekar demokrasi sejati dengan membangun oposisi yang handal dan bermanfaat untuk rakyat ketika kekalahan menjemput atau mereka

menjadi pecundang dan menjadi pengecut demokrasi yang membiarkan tindakan anarkis dengan mengatas namakan rakyat. Mari kita bersama menunggu perubahannya!

Diakui atau tidak, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sebuah sistem ideal untuk sebuah negara yang memproklamirkan diri sebagai negara demokrasi. Tapi sebagai sebuah sistem yang melibatkan orang secara massif, maka sistem ini pun mengandung risiko yang tidak sedikit dalam mencapai kemakmuran rakyat pasca-pemilihan. Kesenjangan tingkat pendidikan, perbedaan sudut pandang, serta pendekatan yang digunakan oleh para calon atau partai politik kepada para konstituennya menjadi faktor pemicu konflik.

Pengalaman pilkada langsung yang terjadi di Kota Tarakan dan Bau-bau di Sulawesi bisa menjadi contoh rentannya sistem pemilihan pemilihan kepala daerah secara langsung. Konflik yang terjadi antar para pendukung calon yang bertarung tak terelakkan, bahkan para pendukung calon bupati yang kalah dalam perhitungan suara berani bentrok dengan aparat kepolisian karena dianggap pihak keamanan melindungi calon i*ncumbent* yang memenangkan pemilihan.

Prestasi bangsa Indonesia di mata dunia internasional sebagai bangsa yang menunjung nilal- nilai luhur demokrasi pada pilkada di Aceh dan DKI Aceh sedikit agak tercoreng ketika medie massa mem *blow up* lewat tayangan layar kaca saat massa yang meruntuhkan pagar kantor KPUD yang menjadi simbol demokrasi langsung.

Bangsa yang Tak Bisa Bersabar

Ada korelasi kuat antara isu terorisme yang merebak akhir-akhir ini dengan perilaku korupsi yang di era otonomi daerah (otda)) menunjukkan eskalasi yang kian meningkat. Jika sebelum otda perilaku korupsi bermuara dan harus dengan "restu" dari pemerintahan pusat, setelah otda diberlakukan di awal tahun 2000, maka setiap pejabat daerah di level manapun, eksekutif, legislatif dan yudikatif bisa melakukannya.

Sistem hukum Indonesia yang mirip karet, jargon *justice for all* hanya untuk pembahasan diskusi mahasiswa hukum tapi tidak untuk rakyat, ditambah lagi dengan tipisnya rasa malu menjadi jadikan para pejabat makin luasa melakukan praktik korupsi. Filosofi "kekinian dan kedisinian" yang dianut membuat mereka selalu berusaha mengeruk keuntungan sebesar besarnya, bagaimana pun caranya lemahnya penegakan hukum terhadap para koruptor mengusulkan Ketidakpuasan Beberapa kelompok orang beberapa diantaranya melakukan tindakan teror kepada penguasa dengan rakyat dijadikan sebagai tanda sasaran antara. Bertebarannya bom di wilayah republik ini bisa jadi dalam rangka menentang sistem yang korup ini.

Dalam sudut pandang yang lain, koruptor dan teroris ini juga memiliki kesamaan karakter, terutama dilihat dari minimnya kesadaran personal. Ketidakpedulian mereka terhadap nasib masyarakat yang "terluka" oleh ulah yang dilakukannya. Bahwa masyarakat merupakan kumpulan individu yang saling menghormati hak dan kewajibannya tidak dipahami benar. Dalam perspektif pedagogis mereka tergolong pada kelompok manusia yang tidak memiliki kecerdasan emosional yang memadai dalam menempuh kehidupannya.

Atas nama kesejahteraan dan kemewahan keluarga serta para pewaris sampai tujuh turunan para koruptor memanipulasi harta dengan segenap kepiawaian intelektualnya. Atas nama menegakkan hukum Tuhan melawan "sistem kafir" para teroris menebar ketakutan ditengah masyarakat yang dianggap akomodatif terhadap ke kafirkan dengan memasang bom. Tewasnya puluhan, bahkan ratusan orang dianggap sebagai "bumbu pemanis" dalam perjuangan menegakkan hukum Tuhan.

Ideologi khas Marxisme yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang dimiliki para koruptor dan teroris jelas anti produktif dengan cita-cita bersama masyarakat yang adil dan berkeadaban. Cara-cara instan dan radikal yang ditempuh para teroris dalam mengekspresikan keinginannya jelas membunuh rasa aman rakyat sebagai modal dasar untuk melakukan pembangunan.

Keinginan untuk kaya tidak diimbangi dengan sikap sabar, hemat serta ulet dalam melakukan aktivitas ekonomi. Keinginan untuk menegakkan hukum-hukum yang benar tidak diimbangi dengan pengetahuan dan kesabaran memunculkan radikalisme yang justru bertentangan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.

Koruptor menginginkan "surga dunia" berupa kekayaan materi dengan mengorbankan hak orang banyak teroris menginginkan "surga akhirat" Juga dengan mengorbankan hak orang lain, meski diakui bahwa dampak teroris lebih mencekam Dibanding dengan koruptor. Karena meski keduanya sama sama membunuh, tapi teroris melakukannya secara langsung sementara koruptor secara perlahan dengan menebar kemiskinan dan penderitaan di kalangan rakyat kecil.

Kesabaran pekerja pendidikan.

Kesabaran akhirnya memang harus dimiliki tidak hanya oleh mereka para pejabat yang berpotensi untuk korup maupun rakyat yang menghendaki perubahan radikal tetapi juga oleh segenap komponen yang menghuni republik ini. Tanpa kesabaran

bangsa ini tak akan bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan, karena sistem apapun yang telah dirancang dan yang akan atau telah diimplementasikan akan menemukan kegagalan.

Para pekerja di dunia pendidikan termasuk di dalamnya guru dan kepala sekolah yang diserahi tugas oleh bangsa ini untuk menjadi agen perubahan Sosial sekaligus melestarikan nilai nilai moral Luhur berupa kejujuran, kepercayaan diri, Etos belajar, penghargaan kepada orang lain dan lingkungan semesta harus lebih memiliki kesabaran ekstra dibanding para pekerja di bidang lainnya.

Para pekerja pendidikan harus berjiwa merdeka dan cerdas dalam menghadapi sistem pendidikan Indonesia yang cenderung terus berubah. Para pekerja pendidikan harus berani mengatakan tidak terhadap perilaku ABS (asal bapak senang) Dari para pejabat pemerintah yang mengukur keberhasilan pendidikan dari segi kuantitas lulusan Jian para siswa dan ampe terhadap kualitas serta menutup mata dari realitas sosial yang terjadi.

Sistem ujian nasional yang diambil pemerintah melalui departemen pendidikan misalnya, dilihat dari Filosofi dan tujuannya cukup jelas yakni berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Keputusan pemerintah yang memberlakukan nilai ujian nasional menjadi salah satu kriteria kelulusan siswa dalam suatu jenjang pendidikan hendaknya disikapi sebagai suatu tantangan kerja bukan sebagai momok yang menakutkan sehingga memunculkan kebijakan di tingkat sekolah yang cenderung destruktif.

Pembentukan “tim sukses sekolah” (teman penulis, Lamsijan, lebih senang menyebutnya dengan istilah tim kemplud sekolah, atau timlo sekolah alias tim blo'on sekolah yang tugasnya memberikan kunci jawaban kepada para siswa peserta ujian) jelas merupakan langkah destruktif yang bisa membawa siswa ke jurang kehancuran moral.

Di beberapa daerah, keberadaan timlo sekolah ini justru didukung oleh para pejabat pendidikan demi prestise semu atau

dalam rangka melestarikan kedudukan politis. Tidak usah menyebut Komunitas Air Mata Guru di Sumatera Utara yang para anggotanya terancam dikeluarkan dari keanggotaan pegawai negeri, di Kota Cirebon pun terjadi. Terbetik rumor yang kemudian berkembang menjadi fakta sosial ketika seorang pengawas ujian di suatu sekolah menemukan kecurangan yang dilakukan oleh tim sukses sekolah dia mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya saat melakukan komplain. Dinas pendidikan justru menyalahkan pengawas pelapor bukan tim sukses atau kepala sekolah di mana ujian berlangsung karena dianggap tidak menciptakan situasi kondusif dalam pelaksanaan ujian nasional. Ironis memang, dan entah di mana keberadaan tim independen yang disebut-sebut sebagai tim "detasemen 88-nya" pemerintah dalam pelaksanaan ujian nasional.

Laporan investigasi di beberapa media lokal dan nasional tentang kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan ujian nasional tampaknya tidak menyurutkan para pemutus kebijakan di tingkat nasional untuk tetap memberlakukan hasil ujian nasional sebagai kriteria kelulusan siswa. Bahkan tak tanggung-tanggung, untuk kelulusan di tingkat sekolah Dasar pun melalui UN.

Pemerintah tampaknya masih ngotot menggunakan pendekatan hasil dibanding menggunakan pendekatan proses, menomorsatukan kuantitas tapi abai terhadap kualitas. Keberhasilan pendidikan diukur hanya dari presentasi siswa yang lulus UN, persoalan bagaimana cara kelulusannya dari hasil merampok teman, bocoran atau lewat tim kemplud tidak dipersoalkan. Revitalisasi pendidikan melihat bergemingnya pemerintah dalam penyelenggaraan UN serta fenomena yang berkembang di dunia per sekolahan maka satu-satunya jalan terbaik untuk menyelamatkan dunia pendidikan dari kehancuran mental (terutama perilaku permisif yang berpotensi untuk menelorkan koruptor dan teroris) adalah dengan melakukan revitalisasi total pendidikan terutama di kalangan pekerja pendidikan. Mengembalikan segenap proses dan upaya pendidikan kepada

tujuan awalnya, yakni mengembangkan sifat-sifat kemanusiaan yang asasi berupa kejujuran, sikap pantang menyerah, berani menanggung resiko, menyerap nilai nilai ketuhanan, dan hal-hal konstruktif lainnya.

Semua kebijakan, metode, ukuran-ukuran sampai kepada pelaksanaan pendidikan harus berorientasi terhadap nilai-nilai di atas. Tegasnya kurikulum apapun yang akan digunakan berbasis kompetensi 2004 atau KTSP 2006, kriteria UN atau bukan UN yang digunakan untuk kelulusan siswa, dalam aplikasi di tingkat sekolah harus tetap menjunjung nilai-nilai kejujuran.

Kesalahan pemerintah dengan memberlakukan UN kepada para siswa harus dihadapi kesabaran para pekerja pendidikan dengan mengintensifkan pengayaan. Kelemahan mental para kepala daerah yang merasa pamornya akan naik jika prosentasi kelulusan di daerahnya mendekati 100% dengan menghalalkan segala cara dihadapi kesabaran para pekerja pendidikan dengan mengintensifkan remedial bagi siswa-siswa yang gagal dalam try out. Kekhawatiran para orang tua terhadap kemungkinan kegagalan dalam UN bagi anak-anaknya dihadapi kesabaran para pekerja pendidikan dengan cara memberikan kekuatan mental kepada para siswa.

Ibarat jamu, langkah revitalisasi ini akan terasa pahit pada awalnya. Belasan atau puluhan siswa yang kurang cerdas mungkin akan menjadi korban. Tapi pengorbanan mereka dipastikan tidak akan sia-sia, karena generasi di belakang mereka akan terpacu untuk belajar lebih keras. Dan akhirnya sistem UN akan menemukan momentumnya, akan mencapai tujuan awalnya yaitu sebagai alat ukur yang bisa memacu peningkatan kualitas pendidikan.

Persoalannya sekarang, apakah para guru yang tergabung dalam timlo sekolah dalam menghadapi UN ini masih memiliki sedikit kesabaran dan kesadaran nurani untuk melakukan revitalisasi pendidikan, atau malah justru sebaliknya tetap dalam “kejahilan” dan “kebahlulan”- nya. Bahwa dirinya merasa telah

membawa para siswa ke depan pintu gerbang kesuksesan tanpa sadar secara makro langkahnya tersebut merusak tataan UN serta memubazirkan dana miliaran rupiah dalam penyelenggaraannya.

Ujian Nasional menggonggong timlo sekolah berlalu, dan bangsa ini tetap blo'on serta menyukai kamuflase.

Ambivalensi Kebijakan Publik

Premanisme…. siapa takut?

Frase yang diambil dari sebuah iklan suatu produk shampo itu rasanya cukup tepat untuk mewakili kegelian sekaligus kesedihan penulis saat menyaksikan sajian berita sebuah stasiun TV swasta yang menayangkan gelar pasukan yang terdiri dari ratusan aparat satpol pamong praja yang berseragam biru tua dan kesatuan Polri yang tujuan utamanya meringkus para preman di ibukota. Para peserta terlihat berbaris gagah dengan hati yang penuh dengan semangat dan tekad memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Dan seperti yang diduga sebelumnya, *" free man"* (dugaan sementara asal usul dari istilah *"preman"*, manusia yag bebas dari ikatan pranata social sehingga meresahkan masyarakat lainnya) yang berhasil diciduk oleh para petugas adalah *free man* lain yang justru menjadi tulang pungggung Negara ketika bangsa ini menghadapi krisis di tahun-tahun awal reformasi yakni para pedagang asongan, kakilima dan sejenisnya. Birokrat kita tampaknya tidak pernah menjadi pintar (atau jangan-jangan sudah menjadi takdir ketika seseorang menjadi birokrat harus mentransformasi dirinya menjadi tidak cerdas), setiap kali akan mengadakan tindakan pemberantasan penyakit masyarakat, operasi harga pasar atau inspeksi lainya selalu diawali dengan pemberitahuan masa sehingga wajar saja jika pihak yang akan menjadi target operasi sudah melarikan diri sebelum para petugas datang.

Birokrat kita tampaknya tidak pernah mau belajar kepada seorang LB Moerdani, satu dari sedikit tokoh intelejen handal yang pernah dimliki oleh republik ini, ketika masih menjabat Pangkomkamtib dulu. Beberapa kali beliau dengan rela memakai

baju yang belepotan oli ketika menyamar menjadi sopir truk antar kota ketika ingin mengetahui kondisi lapangan yang menjadi bidang tugas operasionalnya. Tidak ada protokoler, pengawalan maupun pemberitahuan di massmedia. Tujuan yang baik jika tidak didukung oleh strategi dan perencanaan yang matang maka hanya akan menghamburkan biaya dengan percuma sementara hasil yang di dapat tidak optimal.

Kasus yang sama terjadi pada pemberantasan minuman keras dibeberapa daerah kota/kabupaten di Indonesia yang berujung pada tindakan anarkis dari beberapa kelompok masyarakat. Kesulitan dalam memberantas penyakit masyarakat jenis ini, (lagi-lagi) lebih di akibatkan oleh kebijakan yang dibuat oleh birokrat tidak tepat.

Melalui sejarah kita bisa bercermin bahwa Amerika Serikat harus mengeluarkan biaya yang besar serta waktu yang tidak singkat dalam upaya menyadarkan masyarakatnya terhadap bahaya minuman keras (miker), demikian juga jepang. Dan ternyata upaya memerangi kecanduan alkohol dari masyarakat kedua Negara yang dari sisi ekonomi berada di jajaran teratas di antara Negara-negara dunia lainnya kandas alias sia-sia. Hal tersebut di tandai dengan dicabutnya undang-undang pelarangan peredaran miker yang sebelumnya diberlakukan secara ketat.

Demokrasi yang dikembangkan disana ditambah lagi dengan budaya sekularisme (pemisahan atau tepatnya marginalisasi agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara) yang dianut mayoritas warganya memang memungkinkan pencabutan peraturan pelarangan tersebut. Jika memang mayoritas rakyat menghendaki "sesuatu" maka pemerintah harus serta merta mengabulkannya, meski sesuatu itu jelas-jelas bertentangan dengan aturan Tuhan.

Perasaan teralienasi serta tekanan yang berlebihan dalam pekerjaan (mereka rata-rata bekerja lebih dari 15 jam sehari) menjadikan orang jepang menyukai miker. Pub-pub disana menjelang tengah malam banyak dipadati oleh para eksekutif perusahaan-perusahaan yang baru pulang dari pekerjaan mereka,

perbincangan diantara mereka pasti diiringi dengan sake, sejenis minuman keras tradisional Jepang.

Kegagalan kedua Negara diatas dalam memerangi minuman keras disebabkan kultur mereka memang "mengharuskan" demikian. Artinya kemakmuran ekonomi menjadikan masyarakat Amerika menghamburkan uang mereka untuk pesta, dan sebagai penyemarak --disamping musik—maka media miker menjadi alternative,*"Workoholic"*yang diidap oleh para pekerja Jepang harus diimbangi dengan alkhol (sake) agar mereka tetap dalam kondisi prima.

Sulitnya penanganan miker bukan hanya menjadi monopoli negara maju, sebagai negara belum maju serta berlandaskan Pancasila dengan Ketuhanan menduduki sila pertama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pun mengalaminya juga. Bedanya jika dinegara maju berangkat dari budaya kerja dan pesta maka disini berangkat dari himpitan ekonomi. Jika disana aktifitas haram ini semata-mata sebagai selingan dari rutinitas kehidupan mereka, disini justru menjadi media untuk melarikan kehidupan ekonomi yang menghimpit atau untuk sekedar gagah-gagahan (meski kadang berakibat fatal).

Tidak sedikit korban meninggal dari minuman keras setelah dioplos dengan obat-obatan sakit kepala atau obat nyamuk cair seperti yang kerap dilansir oleh beberapa surat kabar belakangan ini. Dan yang membuat miris, meski kasus meninggal atau cacat fisik permanen sering di '*blow up*' oleh media massa cetak dan elektronik tetapi kasus tragedi miras ini terus berlangsung. Kendala kedua adalah, jika kesulitan AS dan Jepang dalam pemberantasan miker disebabkan berbenturan dengan budaya (kerja dan pesta) masyarakatnya, maka kegagalan pemberantasan miker di Indonesia lebih disebabkan oleh sistem birokrasi yang punya kepentingan dalam hal pemasukan asli daerah/negara untuk memutar roda pemerintah.

Banyaknya korban meninggal atau cacat permanen yang terjadi di tengah masyarakat tidak membuat para pemutus

kebijakan prihatin dan menghentikan peredaran miras. Ongkos sosial yang berujung pada hancurnya nilai-nilai keadaban dan nilai agama cenderung tidak pernah dihitung secara bijak. Kepentingan rakyat untuk mendapatkan iklim sosial yang baik dikalahkan oleh nafsu angkara materialisme kapitalis.

Reaktualisasi Pancasila Sebagai Ideologi

Ketika menyaksikan peringatan Kesaktian Pancasila di Monumen Lubang Buaya yang meski hanya berdurasi lima belas menit tetapi (seperti diberitakan di mediamassa) tetap mempunyai kadar kekhidmatan yang sama dengan peringatan-peringatan tahun sebelumnya. Kita disadarkan oleh sebuah pertanyaan bahwa masihkah Pancasila ini memiliki kesaktian sehingga sanggup meredam situasi bangsa yang saat sekarang ini sarat konflik, baik konflik vertikal maupun konflik horisontal yang hampir terjadi di seluruh bagian negeri ini.

Jika di tahun 1965, dengan mengusung Pancasila bangsa ini bisa bersatu padu, menghilangkan segala perbedaan suku, ras, kedudukan, status dan atribut kelompok serta ego yang melekat di tiap kelompok, memerangi kelaliman yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). maka di tahun sekarang ini bisakah dengan atas nama Pancasila setiap komponen bangsa ini bahu membahu saling membantu dan siap mengorbankan kepentingan diri dan kelompoknya untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Siapkah pemimpin pemerintahan yang notabene dianggap sebagai pemimpin bangsa memperbaiki citra Pancasila sebagai pemersatu bangsa, misalnya dengan berperilaku atau mengambil kebijakan sesuai dengan pesan yang terkandung dalam setiap sila dalam Pancasila.

Dan memang idealnya Pancasila sebagai sebuah ideologi akan memiliki "kesaktian" selama diperlakukan secara proporsional. Nilai dari sebuah kesaktian selayaknya dimanifestasikan tidak hanya bersifat seremonial belaka tapi lebih ditekankan pada kebijakan publik yang dirancang pemerintah (di bidang eknonomi misalnya) mendukung golongan ekonomi lemah

sebagai bukti ditegakkannya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Sakralisasi dan dehumanisasi

Andai saja Syahrir, Bung Karno atau tokoh pergerakan lainnya diberi kesempatan untuk menyaksikan bagaimana Pancasila diperlakukan selama Orde Baru. mereka pasti akan berulang kali menggelengkan kepala sembari mengelus dada. Pancasila tidak hanya dijadikan pedoman hidup berbangsa dan bernegara, Pancasila ditafsirkan secara tunggal dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat sampai ke hal-hal yang sekecil-kecilnya. Program GHBP (Gerakan Hidup Ber-Pancasila). penataran-penataran P4 dan program-program lainnya yang kesemuanya sebenarnya bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah saat itu. Pancasila bahkan nyaris menjadi agama (atau paling tidak dalam beberapa hal menggantikan/menggeser peran agama).

Kemudian para *founding father* itu akan menghela napas berat seraya menangis pilu manakala menyaksikan fenomena masyarakat Indonesia era reformasi sekarang ini. Konsep Pancasila yang demikian luhur mustahil digali dari kehidupan masyarakat Bumi Pertiwi yang jauh dari sikap penuh welas asih, santun, pemaaf dan saling menghormati perbedaan, masyarakat yang sangat tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Ratusan orang yang dibakar karena kesalahan "kecil yang dilakukan karena tuntutan perut lapar hanya dalam tempo kurang dari setahun, perang antardesa (bahkan antar RT) dengan penyebab sangat se pele yang nyaris tanpa berkesudahan, etnis cleansing yang terjadi di beberapa bagian republik ini karena perbedaan agama mencerminkan hal tersebut. Humanisme, yang merupakan watak dasar atau semangat Pancasila yang paling mendasar dan sebagai identitas luhur serta cerminan makhluk Tuhan yang memiliki derajat tertinggi di antara makhluk lainnya berada di titik terendah.

Jika dicermati lebih jauh, keberingasan massa dan hancurnya nilai-nilai social dengan perilaku yang cenderung

antagonis dengan kemanusiaan yang terjadi di kalangan masyarakat sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari "tuntutan jaman" yang mengarah terbentuknya global village (kampung dunia). Globalisasi di bidang ekonomi menjadikan krisis ekonomi yang terjadi di suatu negara akan berdampak pada negara lainnya.

Indonesia sebagai negara dunia ketiga yang memiliki ketergantungan kuat kepada negara lain (dibuktikan dengan nominal hutang terbesar di peringkat ketiga dunia) sangat rentan terhadap krisis yang terjadi di negara-negara kreditor. Ditambah lagi dengan mentalitas para pengusaha yang memperparah kondisi ekonomi nasional dengan melakukan *capital flight* di saat negara sangat memerlukan modal untuk mengatasi krisis. Dan memang iklim yang dibangun pemerintah selama tiga dekade sangat kondusif untuk membentuk manusia-manusia pengecut yang hanya mementingkan diri dan keluarganya semata.

Trisakti jilid II

Argumentasi yang berbau apologisme diri seraya membebankan kesalahan ter hadap suatu orde sudah bukan saatnya lagi. Perilaku "bar-bar" yang dilakukan masyarakat merupakan akumulasi persoalan yang ditimbulkan pemerintahan yang lalu tidaklah menyelesaikan permasalahan bangsa yang cenderung kian kompleks dan membesar.

Sekarang ini dibutuhkan kesabaran, akal panjang serta kearifan total dari segenap komponen bangsa, terutama dari kalangan eksekutif, legislatif maupun lembaga peradilan yang merupakan wakil yang ditunjuk oleh masyarakat untuk menyelesaikan persoalan mereka. Dehumanisasi yang terjadi di kalangan masyarakat dicari akar persoalannya, tentunya dengan melibatkan kalangan akademisi yang pakar di bidangnya, tokoh agama atau tokoh informal lainnya.

Stabilitas statis yang dipaksakan -meminjam istilah Dr. Alfian, peneliti LIPI- yang sedikit banyak memberi andil terhadap munculnya perilaku destruktif pasca reformasi digantikan dengan

stabilitas dinamis yang memperlakukan rakyat lebih Manusiawi. menganggap rakyat sebagai subyek (bukan obyek pembangunan semata) yang mempunyai kebebasan/ berpikir atau berpendapat yang merupakan karunia terbesar dari Yang Maha Pencipta.

Pendekatan stabilitas yang dinamis bukan tidak mengandung kelemahan, apalagi di negara kepulauan yang rakyatnya pluralistik seperti Indonesia. Beragamnya suku dengan konsekuensi perbedaan tradisi, perbedaan agama yang dianut antara satu pulau dan kepulauan yang lain sedikit banyak berpengaruh terhadap ketidaksamaan pandangan dalam memaknai kebebasan dalam pendekatan ini stabilitas dinamis. Meski demikian Indonesia telah memiliki modal dasar (yang diletakkan oleh pendiri republik ini) yang sangat penting dalam mencapai stabilitas ini, yakni Pancasila.

Sebuah bangsa membutuhkan aturan bersama yang akan menjadi kerangka hubungan antar kelompok masyarakatnya, aturan tersebut idealnya merupakan titik kesamaan di antara sekian banyak perbedaan yang ada di antara kelompok. Titik kesamaan tersebut harus berlandaskan pada fitrah manusia yang paling asasi, sehingga setiap kelompok masyarakat yang ada dapat menerimanya.

Kelima sila dalam Pancasila jika dicermati merupakan hal-hal yang bersifat universal (bandingkan dengan *Declaration of Human Right*-nya badan dunia PBB) dan dibutuhkan semua bangsa di muka bumi yang menghendaki keadilan yang beradab. serta hidup penuh kedamaian dan sejahtera lahir batin.

Pancasila sebagai ideologi pada tataran teoretis bersifat final karena mengandung perpaduan yang harmonis antara kehidupan dunia dan akherat, rohani dan jasmani, meninggikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai luhur lainnya. Tetapi Pancasila pada tataran praktis idealnya bersifat dinamis, artinya disesuaikan dengan konteks kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perubahan menuju kemajuan. Penfasirannya sangat kondisional sekali. Sehingga merupakan kesalahan bila pemerintah

(terdahulu) yang mengklaim bahwa Pancasila merupakan hak miliknya, sehingga berhak untuk menafsirkannya secara tunggal (dalam rangka melanggengkan kekuasaan) dan memaksakan tafsirannya tersebut kepada rakyat dengan cara intimidatif.

Menghadapi situasi krisis multi dimensional sekarang ini, Pancasila sebenarnya belum hilang kesaktiannya sama sekali. Hanya persoalannya adalah sanggupkah segenap pemimpin bangsa sekarang ini mengembalikan Pancasila pada proporsinya, sebab meski dalam setiap mediamassa selalu menyebutkan bahwa negara/masyarakat kita telah memasuki era industri informasi tetapi sifat-sifat kelompok masyarakat agraris .masih melekat kuat pada hampir mayoritas penduduknya, dalam berbuat atau menyikapi sesuatu masih memerlukan contoh ketauladanan.

Dengan kata lain maukah jajaran eksekutif selalu berorientasi kepada konsep ketuhanan sebagai manifestasi sila pertama dalam menentukan kebijakan apapun, mengikuti garis yang telah ditentukan oleh Tuhan dalam kitab suci agama. Perilaku-perilaku yang bertentangan dengan agama (prostitusi, perjudian, atau kemaksiatan lainnya) dengan serta merta diberantas habis tanpa harus mempertimbangkan berkurangnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) atau alasan ekonomis lainnya.

Kemudian jika ada aparat yang melakukan kemaksiatan (dan itu jelas menyakiti hati rakyat dan menjadi contoh buruk) di hukum seberat beratnya. Adakah kemauan jajaran eksekutif atau yudikatif menegakkan *justice for all*, menjadikan hukum sebagai panglima, karena keadilan tak akan bisa tegak tanpa tegaknya hukum. Keadialan yang ditegakkan dengan hukum akan memunculkan bangsa beradab (seabagai manifestari sila kedua), dan sebaliknya keadilan jika tanpa didukung dengan perangkat hukum yang bersih akan muncul bangsa yang biadab.

Konsistensi jajaran legislatif sebagai perwujudan dari sila keempat dalam membela dan berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat (bukan sekelompok rakyat yang menjadi konstituennya saat pemilu) harus benar-benar kuat dan nyata, nama baik partai kalau

perlu dipertaruhkan ketika membuat keputusan dalam rangka membela kepentingan rakyat.

Sila keadilan sosial bagi rakyat Indonesia (mayoritas) bukan lagi sebatas retorika atau dijadikan "jimat" yang ditempel di dinding kantor instansi pemerintah, melainkan diaplikasikan dalam bentuk yang lebih nyata (contoh paling *anyar* adalah kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM 12% pada tanggal 1 Oktober lalu, jelas ini kebijakan yang terkesan *ndagel* dan menyakiti hati rakyat karena, sebelumnya pemerintah melakukan *bailout* menalangi utang Proyek Gresik 2,3 miliar, Chandra Asri dan (diduga) juga akan melakukannya kepada perusahaan-perusahaan bermasalah lainnya). Jangan-jangan pengalihan subsidi BBM yang diduga keliru atau salah sasaran selama ini, malah justru makin jauh kekeliruannya. Pengalihan subsidi BBM untuk sektor riel (khsusunya pengusaha kecil dan menengah) hanya menjadi komoditas politik belaka.

Persatuan dan kesatuan Indonesia akan terbentuk secara alamiah bila kondisi lahir dan batin rakyat secara umum dalam keadaan sejahtera.

Pancasila akan kembali menunjukkan tuahnya jika langkah-langkah di atas dilakukan oleh segenap jajaran eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai pengemban amanat rakyat dalam waktu yang tidak terlalu lama Pancasila akan kembali menjadi alat pemersatu dan motivator bagi seluruh rakyat untuk menghadapi badai krisis - sekarang ini.

Surat Terbuka untuk Wakil Rakyat

Bapak dan Ibu wakil rakyat yang terhormat, disela kesibukan yang mengurus tetek bengek persidangan, cobalah sekali-kali tonton sebuah pariwara bank di TV sembari melakukan kontemplasi maka akan ada penampakan sosial yang bisa dijadikan pemacu kinerja anda semua. Pariwara "Ampuuuun Bukopin .... nabungnya duit hadiahnya duit" ... bila dikaitkan dengan kinerja institusi terhormat maka akan muncul olok-olok sosial yang semestinya bisa menggelitik telinga orang yang menghendaki iklim demokrasi lebih baik ...."Ampuuuun Wakil Rakyat ...milihe kangelan kerjae kangelan".

Olok-olok sosial atau jogregan wong cerbon ini mengemuka, baik di aras akar rumput lewat obrolan di tempat jajanan klemprakan, di kalangan pengusaha kaki lima, pada diskusi terbatas di kantong-kantong LSM kota Cirebon, maupun melalui *statement* para sesepuh, pengusaha besar, praktisi hukum, akademisi yang di *blow up* di media massa.

Kami memang menaruh harapan besar kepada anda semua, kami semua berharap agar hasil pemilu 2004 sekarang ini akan memberi warna kehidupan demokrasi yang lebih baik, suatu demokrasi yang akan berujung pada akselerasi pembangunan yang semakin cepat. Harapan yang sebenarnya tidak terlalu berlebihan, mengingat gelar kesarjanaan yang menempel di depan/belakang nama-nama Bapak dan Ibu sekarang ini lebih banyak dan lebih variatif dibanding wakil rakyat terdahulu. Terlihat dengan jelas kapasitas intelektual anda jauh lebih baik dibanding generasi yang anda gantikan. Indikasinya akan tetap pada kebijakannya akan ditelorkan semestinya akan lebih cerdas, membaca realitas sosial lebih paripurna, keberpihakan kepada urusan kami pasti lebih kuat, anda semua pasti bisa mendahulukan urusan krusial rakyat walau

dengan konsekwenasi akan kehilangan kesempatan untuk menangguk materi lebih banyak lagi karena jabatan yang anda sandang di lembaga terhormat tersebut.

Terus terang kami kecewa, kecewa berat dengan kinerja Bapak dan Ibu yang baru menjabat beberapa minggu saja. Anda semua berebut Ketua Dewan -yang disebut sebut sebagai posisi basah karena berlimpah suap tak terbukti-, berebut posisi strategis yang akan meluluskan kepentingan pribadi atau partai anda tanpa mengindahkan perasaan dan kepentingan kami. Kami gerah dengan segenap perilaku dan jurus yang anda lakukan untuk merebut posisi terhormat di tempat yang seharusnya kami bisa melakukan kritik dengan bebas. Kami sudah bosan dengan perilaku anda yang kerap menyebut sebagai pembawa suara rakyat dalam setiap retorikanya, kami jenuh dengan trik-trik politik dalam memenangkan suatu perdebatan atau dalam memutuskan kebijakan yang berujung pada kebaikan/keburukan nasib kami.

Semua menyebut membawa aspirasi rakyat, semua mengatakan bahwa rakyat di atas segalanya, nasib rakyat harus diperjuangkan, kehidupan demokrasi harus terus dijaga dan dilestarikan. Tapi sejauh mana anda semua melakukan itu, sepintar dan sebijak apa anda melakukan observasi. Turun langsung ke kantong-kantong kemiskinan di beberapa sudut kota, bertatap muka dan mencoba mengkhidmati kehidupan anak-anak jalanan, berlama-lama menghirup udara kotor yang penuh sampah dan kotoran manusia di pinggiran pantai Samadikun, Lemahwungkuk dan Pegambiran.

Bapak dan Ibu wakil rakyat yang terhormat kami awam dengan istilah demokrasi yang, kata wong pinter berasal dari kata ‘demos dan kratos’, dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Kami juga tak paham betul dengan mekanisme demokrasi yang ada di institusi dewan yang menjadi representasi kami di dunia politik, kami buta sama sekali dengan bagaimana suatu fraksi dibuat dan disiasati, kami sama sekali tak mengerti bagaimana proses

pemilihan ketua dewan, bagaimana proses awal pembuatan suatu kebijakan yang akan menentukan kehidupan kami di republik ini.

Satu hal yang pasti adalah, kami muak dengan kebohongan-kebohongan yang harus kami telan mentah-mentah dari para politisi sejak rezim orde baru sampai pada politisi pada rezim megawati yang, selalu mengatasnamakan wakil rakyat, tapi justru perilakunya jauh dari keinginan rakyat. Mereka sangat-sangat menyakiti hati kami, karena mereka dengan sangat arogan memakai dana pembangunan dengan dalih merekalah yang mewakili segala urusan kami di negeri ini, sehingga mereka berhak untuk memakai berapapun dana untuk kepentingan rumah tangga partai, serta memuaskan nafsu konsumerisme anak istri mereka.

Unjuk rasa yang kami lakukan saat pelantikan Bapak dan Ibu beberapa waktu lalu – dan tampaknya fenomena ini terjadi di hampir semua kota republik ini- bukan berarti kami melecehkan proses demokrasi yang sudah menjadi komitmen dan sudah dirancang oleh para ‘founding father’ di tahun 45-an secara cermat. Meski hidup kami susah secara ekonomi, tetapi kami selalu optimis dalam menghadapi setiap pemilu, dalam menghadapi pergantian rezim, dalam menyiasati kebijakan-kebijakan yang diambil oleh rezim baru, dalam menghadapi krisis yang ditimbulkan akibat terimplementasikannya kebijakan tersebut. Kami yakin betul bahwa kami rakyat, adalah pemilik sah republik ini, dan anak cucu kami telah harus hidup dan menghirup kehidupan yang lebih baik lagi.

Dengan susah payah kami terus menyekolahkan anak-anak kami tanpa memperdulikan biaya pendidikan yang semakin mencekik, dari mulai naiknya harga-harga buku pelajaran, iuran tahunan yang terus melambung, serta tetek bengek pungutan sekolah lain, semua kami hadapi dengan ketegaran dan ketabahan khas rakyat. Iuran listrik dan iuran air minum yang tampaknya akan membengkak mencapai 40% besaran nominalnya di masa datang tidak menjadikan kami takut atau pesimis dalam menatap

kehidupan. Kami akan bertahan dan akan terus bertahan dalam menghadapi semua tantangan, tak akan berbuat anarki, atau melakukan perbuatan antiproduktif lainnya.

Kami tak pernah mempersoalkan ‘siapa’ memenangkan ‘apa’ dalam setiap mekanisme demokrasi, atau ‘siapa’ mengalahkan ‘siapa’ dalam suatu perebutan jabatan di tingkat institusi demokrasi. Demokrasi bagaimana kami sangatlah sederhana, demokrasi adalah memilih siapa wakil kami dalam pemilu kemudian menunggu bagaimana kerja para wakil kami. Apakah kehidupan kami pasca pemilihan akan lebih baik, stagnan atau malah lebih buruk.

Kami tak peduli siapa dari partai mana yang akan memimpin institusi legislasi. Partai politik, bahkan figur politisi bagi kami hanyalah wahana atau alat, bukan substansi demokrasi. Partai Golkar, PDIP, PKS, PAN, atau PKB bagi kami tak lebih dari Partai Kaypang, Partai Kunlunpai, Partai Gobipay dan Partai Siaolinpay dalam dunia persilatan cerita klasik yang ada di film atau buku. Banyaknya perguruan silat yang diadakan ditujukan lebih kepada usaha memperkaya khazanah dan daya tarik cerita bagi para penikmat/pemirsanya. Pendekar dari partai persilatan itu tidak pernah mempersoalkan latar belakang perguruan saat mereka bahu-membahu membela kepentingan dan keselamatan rakyat.

Peringatan Keras untuk Para Penguasa

Menyedihkan, sekaligus memprihatinkan memang melihat kondisi Kota Cirebon. Beberapa kali ganti walikota tetap saja perjudian terus merajalela, dengan segala bentuk dan arogansi dari para pelaku yang "pin-pin bo" alias (merasa) pintar tetapi sebenarnya sangat bodoh, bandar yang merasa dirinya sebagai *untouchable man* maupun para backing yang merasa dirinya paling dipercaya masyarakat karena dipilih melalui mekanisme demokrasi yang legal secara hukum dan perundang- undangan sehingga atas nama kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi (segelintir) masyarakat, yakni para pegawai di tempat maksiat tersebut, mereka membiarkan praktik-praktik maksiat itu berlangsung.

Pengetahuan ekonomi kapitalis mereka yang terbatas menyebabkan mereka tega untuk berpura-pura tidak tahu tentang dampak buruk perjudian bagi pembangunan ekonomi makro suatu masyarakat, atau jangan-jangan ada benarnya juga rumor dari beberapa kalangan masyarakat bahwa mereka memanfaatkan kedudukan mereka sebagai *decision maker* pembangunan untuk lebih memilih menerima 'upeti' yang diberikan para bandar untuk memperkaya diri dan keluarganya, mengingat memanipulasi dan mengkorupsi uang rakyat sekarang ini terasa lebih sulit (kasus dugaan penyelewengan APBD tahun 2001 bisa dijadikan contoh).

Dari ketiga pelaku di atas, yang paling bertanggung jawab terhadap berlangsungnya praktik maksiat itu adalah para *backing*. Adalah tidak terlalu berlebihan jika *backing* ini ditengarai berasal dari para oknum penguasa, baik penguasa yang menduduki kedudukan struktur pemerintahan (eksekutif/legisltive), oknum penguasa bidang keamanan (kepolisian/TNI). oknum penguasa modal (pemilik hotel/tempat berlangsungnya perjudian).

Keberadaan institusi pemerintah, institusi keamanan, institusi bisnis sejatinya sangat mendukung bagi kemajuan dan keberlangsungan hidup masyarakat, tetapi akibat ulah para 'oknum' yang membekingi praktik maksiat ini maka sedikit demi sedikit terbentuklah apa yang disebut dengan *bad public image* yang berujung pada penyimpangan perilaku sebagian masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan peraturan-peraturan serta perundang-undangan yang dibuat pemerintah dan pihak kepolisian.

Pelaku perjudian yang nota bene merupakan bagian masyarakat yang sakit serta para bandar yang menghalalkan segala cara dalam memenuhi kebutuhan ekonominya tidak akan bisa melaksanakan hajat iblisnya manakala para penguasa tidak memberikan jalan/pintu legitimasinya.

Dzikir akbar yang dilakukan para ulama/kyai serta masyarakat di Masjid At-Taqwa seusai Sholat Jumat mengindikasikan bahwa keresahan masyarakat terhadap perjudian telah mencapai eksalasi yang seharusnya dijadikan perhatian lebih para penguasa. Masyarakat tidak mungkin tak mengetahui praktik perjudian yang dilakukan di Jalan Pasuketan 18 misalnya, atau masyarakat geram dengan perilaku para pengedar toto gelap yang banyak berseliweran menawarkan mimpi kepada orang yang dihimpit kesulitan hidup serta memiliki pengetahuan tentang ekses buruk judi yang sangat minim. Kekecewaan masyarakat telah mencapai puncak dengan bersama-sama melakukan dzikir akbar, memohon ampun serta ‘berkeluh-kesah’ di hadapan Tuhan Sang Penguasa Semesta tentang buruknya kinerja penguasa dalam menangani praktik perjudian dan lemahnya moralitas sebagian masyarakat dalam menghadapi godaan kemaksiatan.

Kalau saja para penguasa kota Cirebon lebih arif terhadap fenomena dzikir yang dilakukan secara berjamaah di Masjid yang mempunyai sejarah erat dengan keberadaan pemerintah kota ini, maka selayaknya pemerintah melakukan introspeksi secara vertikal-horisontal serta tidak bisa lagi bersikap pura-pura tidak

tahu terhadap maraknya perjudian atau perbuatan maksiat lainnya yang berlangsung di daerah pemerintahan yang menjadi kewajibannya. Tidak lagi saling melempar tudingan atau berdalih menunggu koordinasi untuk memberantas perjudian.

Kalau saja para penguasa Kota Cirebon tahu dahsyatnya kekuatan doa yang dilakukan secara berjama'ah oleh ummat Islam yang ditindas haknya untuk memperoleh hak hidup yang damai dan jauh dari polusi kemaksiatan, maka seharusnya mereka merasa 'takut' laknat yang akan turun dari Raja Para Penguasa, yakni Allah Swt baik dalam kehidupan individu dan keluarga mereka maupun dalam kehidupan kolektif berbangsa dan bernegara. Dzikir akbar merupakan *'hard warning'* bagi para penguasa untuk berhati-hati bertindak dan mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan tugas yang dipercayakan masyarakat, membela kepentingan rakyat banyak dan bukan segelintir rakyat (pemain dan bandar judi).

Dzikir akbar juga secara tidak langsung mencoba memperingatkan kepada para penguasa agar tidak berlaku sok pintar, merasa lebih mengerti tentang apa yang diinginkan masyarakat, lebih mengerti tentang hukum, politik, ekonomi, sosiologis antropologis dibanding masyarakat.

Para penguasa semestinya mengerti bahwa masyarakat bukan kumpulan orang-orang tolol yang tidak tahu apa-apa tentang dunia politik, pemerintahan bahkan tentang dunia intelijen, intrik, konspirasi busuk menggolkan suatu peraturan untuk kepentingan kelompok kapitalis, tentang teori-teori makro ekonomi, teori pertumbuhan dan perkembangan masyarakat urban/non urban, dan persoalan-persoalan lainnya. Sehingga sangatlah menggelikan apabila penguasa memberikan dalih tentang kekacauan yang ditimbulkan ketika praktik-praktik maksiat ditutup/dibubarkan. Hilangnya pekerjaan bagi para pegawai yang bekerja di tempat perjudian sehingga menyebabkan unjuk rasa, berkurangnya pajak pendapatan yang diterima pemerintah kota dan beberapa alasan lainnya khas ucapan penguasa (baca: selalu merasa paling cerdas).

Dilihat dari sudut apapun praktik perjudian maupun praktik maksiat lainnya dipastikan kontra produktif. Dilihat dari sudut makro ekonomi, uang hasil perjudian akan terkonsentrasi pada satu atau kelompok kecil orang (bandar), perputaran uang juga tidak diiringi dengan penciptaan barang yang menyerap tenaga kerja serta menghidupkan ekonomi masyarakat. Penambahan nilai uang tanpa diiringi produksi akan memunculkan fenomena inflasi yang akan mempersulit masyarakat kecil yang berdaya beli lemah. Pajak daerah yang ditarik pemerintah dari praktik perjudian jauh lebih kecil dibanding upeti yang diberikan bandar kepada para oknum penguasa.

Pembelaan terhadap para pegawai yang berada di sekitar praktik perjudian sebenarnya sah saja, tapi jika berpikir lebih cerdas maka bisa dihitung berapa prosen dari jumlah penduduk yang bekerja disana dibanding jumlah masyarakat secara keseluruhan. Terlalu naif untuk mengorbankan kepentingan mayoritas demi keuntungan minoritas dalam kehidupan ekonomi yang jelas-jelas anti produktif.

Masyarakat bagian yang tak terpisahkan dari upaya menegakkan *good governance* atau pemerintahan yang baik, jujur dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah tercipatanya. situasi yang kondusif bagi terwujudnya pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi yang sehat, terjadinya saling kesepahaman antara kemauan pemerintah dengan masyarakat yang pada gilirannya akan memunculkan kekuatan sosial dari masyarakat dan terjelmanya aparat birokrasi yang berperilaku sebagai pengabdi dan pengayom masyarakat. Tugas para penguasa pasca dzikir akbar memang cukup berat. Mereka untuk mencurahkan segenap kemampuan untuk mewujudkan integritas birokasi, berani menyelidiki dan ‘mengadili’ oknum yang mencemari komunitas mereka dengan memberi kemudahan terjadinya praktik perjudian. Para penguasa jujur, baik dari jajaran eksekutif - legislative- yudikatif, dari jajaran kepolisian-TNI, dari jajaran pengusaha yang diyakini berjumlah jauh lebih banyak

sebaiknya berkolaborasi meningkatkan sinergitas di kalangan mereka. Para penguasa yang berkonspirasi melancarkan perjudian jumlahnya sedikit tetapi biasanya solid. Jaringan mereka sangat rapi, nyaris tanpa cela serta minus bukti yang bisa menyeret mereka ke pengadilan.

Keterlibatan para oknum, kolaborasi, konspirasi di bidang perjudian diperoleh dari sumber-sumber informal birokrasi maupun aparat keamanan, melalui 'nyanyian' pegawai di sekitar perjudian yang telah insaf, obrolan ringan wartawan yang mempunyai komitmen terhadap kemajuan masyarakat, investigasi dari remaja dan pemuda aktifis ormas Islam dan sumber-sumber lain. Meski tidak bisa dibuktikan secara hukum, tetapi untuk mengambil sekedar contoh adalah tentang bagaimana hiruk pikuknya ke beradaan JPO (Jembatan Penyebrangan Orang). Hampir semua kalangan memberikan statement, hingga polemik serta friksi di media antara lembaga pemerintahan tak terelakkan, tetapi isu yang berkembang di masyarakat adalah tentang indikasi terjadinya praktik perjudian yang berlangsung di Pasuketan 18, juga dengan maraknya toto gelap (togel) di masyarakat.

Padahal kalau ditelisik lebih jauh, para pejabat daearh yang memegang otoritas kebijakan dan bermain mata dengan para bandar judi itu sebenarnya bagian dari masyarakat juga. Artinya, dengan statusnya sebagai rakayt dan bergaul diantara rakyat mereka tahu betul tentang isu keberadaan praktik perjudian dengan menggunakan alat ketangkasan tersebut. Hanya bisa jadi ketidakpedulian mereka terhadap praktek tersebut dipicu oleh rasa takut karena tekanan politik dari pejabat pemerintah di tingkat pusat.

Kepiawaian para pemilik alat ketangkasan dalam meloby pejabat di tingkat pusat tidak bisa dipungkiri. Uang memang menjadi kekuatan utama mereka dalam melakukan loby, dalih ikut meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan untuk menarik para wisatawan juga tak urung menjadi alasan mereka. Sehingga para pejabat di tingkat pusat akhirnya memberikan ‘rekomendasi

lisan’ melalui telepon kepada pejabat daerah untuk membuka usaha hiburan alat ketangkasan. Karena memang pada dasarnya perizinan resmi tertulis pembukaan usaha suatu daerah menjadi otoritas atau hak prerogative para pejabat daerahnya. Dan ketika dalam perjalanannya alat ketangkasan itu digunakan untuk alat berjudi para pejabat daerah bisa dengan tenang menutup mata, dengan dalih perijinannya memang untuk untuk usaha jasa hiburan.

Menilai Kinerja Kepala Daerah

Menguatnya fungsi lembaga legislatif sekarang ini membuat momen laporan pertanggungjawaban pemimpin eksekutif di suatu daerah menjadi menarik. Berbeda halnya dengan masa ketika kooptasi pihak eksekutif sangat dominan pada legislatif sehingga peran dari lembaga ini relatif termarginalkan.

Julukan wakil rakyat hanya sebatas retorika belaka, dan jika ada seorang anggota dari fraksi manapun yang mempertanyakan kebijakan eksekutif maka ancaman *recall* terhadapnya pasti terjadi, baik dengan cara halus melalui pimpinan partainya maupun cara-cara kasar lainnya sehingga hasil atau proses pertanggungjawabannya pun bisa di tebak sebelumnya.

Melihat fenomena kekuatan yang relatif berimbang antara kedua lembaga demokrasi menjadikan reformasi yang di bayar dengan nyawa beberapa mahasiswa tiga tahun lalu, patut disyukuri keberadaannya. Ditambah lagi dengan sistem desentralisasi pemerintahan yang diimplementasikan dalam bentuk pemberlakuan otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 maka kedaulatan dan kesejahteraan rakyat yang merupakan cita-cita dari kemerdekaan yang di perjuangkan para pahlawan di tahun 1945 akan cepat terealisasikan.

Hanya saja dalam hal penilaian kinerja eksekutif yang dilakukan oleh wakil rakyat ini harus berangkat dari visi yang sama antara pihak legislatif dan eksekutif yakni di dasarkan pada kepentingan rakyat secara keseluruhan dan dalam jangka panjang. Bukan pada kepentingan sekelompok orang. Bukan atas dasar kepentingan politik atau kepentingan sesaat/kekinian dan mengabadikan nasib generasi sesudah masa jabatan yang diembannya. Pihak eksekutif membuat laporan apa adanya sementara pihak legislatif menilainya dengan ukuran-ukuran yang

semestinya, tidak mencari-cari kesalahan eksekutif yang berujung di turunkan dari jabatan yang diamanatkannya.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika menilai kinerja seorang kepala daerah. Yang pertama meliputi variabel-variabel apa saja yang akan di ukur dan yang kedua adalah alat ukur/standar yang digunakan dalam penilaian yang akan menentukan sampai sejauh mana kualitas laporan. Variabel yang diukur meliputi variabel kuantitatif yang berhubungan dengan angka-angka statistik, misalnya tentang pertumbuhan ekonomi, rendahnya tingkat kriminalitas, kian berkurangnya pengangguran. Dan variabel kualitatif yang indikasinya tercermin pada kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah serta *relationship* dari sang pemimpin, kemampuannya berkomunikasi dengan publik, sejauh mana kedekatan (kepekaan) sang kepala daerah dengan rakyat atau sikap akomodatif dari pemimpin tersebut ketika menghadapi perbedaan pendapat di antara rakyatnya yang memang sangat majemuk.

Distribusi pendapatan variabel kuantitatif relatif lebih mudah diukur dibanding variabel yang lain karena sifatnya yang konkret dan berkait dengan angka-angka absolut. Dengan membandingkan angka absolut tahun yang berjalan dan angka absolut tahun sebelumnya mska akan diperoleh kesimpulan baik buruknya kinerja seorang kepala daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon tahun 1999 misalnya, hasil survey Sosial Ekonomi Nasional (susenas) tahun 1999 yang dilakukan BPS menunjukkan kenaikan 7,14%, kemudian produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar Rp. 3,528 triliun dan jumlah penduduk 268.547 jiwa maka PDRB per kapitanya Rp.12,233 juta. Ini merupakan prestasi yang luar biasa jika mengingat kurang sehatnya iklim perekonomian nasional (dan juga jika memperhatikan Gross National product Rp. 376,9 triliun dengan per capita income yang hanya Rp. 4,67 juta).

Artinya kemakmuran masyarakat Kota Cirebon secara ekonomi tiga kali lipat lebih baik dibandingkan kemakmuran

masyarakat Indonesia umumnya. Dengan asumsi bahwa tahun 2000 iklim ekonomi nasional kian membaik maka pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon dipastikan lebih tinggi lagi. Hanya satu hal yang perlu di catat adalah pentingnya pertumbuhan ekonomi terletak pada sumbangannya terhadap kemakmuran masyarakat secara umum. Pertumbuhan sangat diinginkan karena akan memungkinkan masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa lebih banyak serta juga menyumbang pada penyediaan barang/jasa sosial yang lebih besar (kesehatan, pendidikan dan sebagainya), sehingga meningkatkan standar hidup riel. Idealnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus signifikan dengan kian membaiknya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, terutama yang berkait erat dengan jasa-jasa sosial. Di samping hal tersebut di atas, perlu adanya kebijakasanaan pembangunan ekonomi yang memberikan peluang yang sama (proposional) kepada setiap warga masyarakat untuk berpartisipasi.

Jika di tahun 1999 daya serap hanya 15,15% dari 10.893 orang pencari kerja yang ada. Dipastikan selama tahun 2000 jumlah pencari kerja semakin bertambah (dengan asumsi misalnya 50% saja lulusan SLTA tidak meneruskan ke perguruan tinggi) sementara laju pertumbuhan industri berkisar 5-10%, maka pemerintahan Kota Cirebon, seperti juga kota-kota lainnya di Jawa Barat, menghadapi problematika yang cukup serius.

Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang telah di gulirkan beberapa kali (terutama yang ditunjukkan untuk sektor produktif) dan jaringan-jaringan yang lain sebagai upaya untuk membantu memecahkan masalah pengangguran dan pemerataan pendapatan tampaknya belum mencapai sasaran. Dengan pemberlakuan otda, meski dana ini dari pusat yang peruntukannya telah di bakukan, maka pemerintahan daerah tidak salah kalau mengadakan sedikit improvisasi (tentunya dengan persetujuan anggota dewan) agar dana ini tidak hanya berfungsi hanya sebagai tindakan "emergensi ekonomi" atau demonstrasi "belas kasih" penguasaan kepada rakyatnya dalam rangka (melestarikan) kekuasaan suatu rezim

dengan meninggalkan setumpuk hutang bagi generasi berikutnya belaka, melainkan benar-benar suatu upaya untuk menanggulangi pengangguran dan pemerataan distribusi pendapatan

Kontribusi terbesar dari PDRB adalah sektor industri pengolahan (41,7%) disusul sektor perdagangan dan jasa menunjukkan bahwa strategi pembangunan ekonomi kota Cirebon mengarah kepada terwujudnya kota industri dan jasa perdagangan. Strategi ini dianggap tepat karena letak geografis yang mendukung serta keragaman etnis penduduknya, hanya saja perlu di pikirkan dampak dari strategi ini, misalnya masalah polusi lingkungan serta skala dari industri pengolahan itu sendiri.

Penulis mendapatkan informasi bahwa BAT (British American Tobaco) yang pabriknya terletak di jantung kota setiap tahunya menyumbang PDRB rata rata berkisar Rp 1 triliun (kurang lebih 35% dari total PDRB). itu berarti pabrik roko ini menjadi penyumbang terbesar PDRB.

Variabel kuantitatif

Bidang kesehatan, pendidikan dan keamanan tampaknya mengikuti prestasi ekonomi, mengalami peningkatan dan mungkin lebih baik, atau paling tidak sejajar dengan kota lainya di Jawa barat. apalagi di tahun 1999 ada penambahan jumlah rumah sakit umum dari 4 buah jadi 6 buah, bertambahnya sekolah sekolah kejuruan di tingkat SLTA dan bermunculanya lembaga lembaga kursus keterampilan serta sekolah tinggi swasta di bidang kesehatan.

Konflik horizontal, kerusuhan masa yang melanda beberapa kota di tanah air setahun kebelakang tampaknya tidak akan pernah terjadi di kota wali ini. Hal ini mungkin disebabkan kesadaran masyarakat yang tinggi dan di dukung juga banyaknya markas kepolisian serta TNI yang hampir ada di setiap plosok kota.

Mengenai tingginya tingkat pencurian kendaraan bermotor (tahun 1999 menutut data dari kepolisian mencapai 139 kasus dan dengan melihat situasi sekarang ini tampaknya di tahun 2000 tidak

akan berbeda). Hal itu sangat berkaitan erat dengan letak kota Cirebon yang berada di wilayah perlintasan provinsi, riskan dengan intervensi kejahatan dari luar kota. Di sisi lain situasi ekonomi yang masih belum stabil sangat kondusif untuk memunculkan perilaku tersebut.

Berbeda dengan prestasi fisik yang semakin meningkat, maka dalam hal pelayanan publik (terutama aspek humaniora) jajaran pemerintah kota Cirebon tampaknya tidak ada perubahan, cenderung statis (bahkan jangan jangan memburuk untuk tahun tahun kedepan,apalagi setelah di berlakukannya otda yang menjadikan aparat pemerintah daerah kian merasa berkuasa). masih cukup banyak untuk tidak mengatakan seluruhnya para pegawai di rumah sakit umum yang "bermuka masam" tanpa keramahan ketika melayani rakyat kecil yang berobat.

Lemahnya manajemen sumber daya manusia aparat pemerintah, terutama yang berhadapan langsung dengan masyarakat telah menjadi rahasia umum dan menjadi perbincangan publik yang pada akhirnya berimbas kepada memburuknya penilaian kinerja kepala daerah. (Sementara kepala daerah telah memberikan wewenang kepada pimpinan dinas masing masing tentang persoalan ini).

Menyangkut kualitas kepala daerah memang sebaiknya dilakukan polling (jajak pendapat) dari masyarakat dengan teknik yang standar dan di lakukan oleh sebuah badan independen, non partisan serta memiliki kredibilitas dan integritas. badan ini bisa berbentuk LSM atau oleh lembaga pers semacam mitra dialog, misalnya. hasil dari jajak pendapat ini, meski bukan suatu hal yang menentukan tapi paling tidak bisa menjadi masukan berharga bagi kalangan legislatif dalam menilai kualitas kerja dari seorang kepala daerah.

Rekomendasi

Keluarnya PP No. 108 tahun 2000 yang di antaranya berisi apa dan bagaimana sebaiknya menilai kinerja seorang kepala

daerah menjadikan tugas anggota dewan relatif lebih profesional. hanya satu hal yang perlu diingat oleh segenap jajaran wakil rakyat ini adalah, meski jabatan anggota dewan bukan merupakan profesi (?), tetapi profesionalisme dalam menilai kinerja seorang kepala daerah maupun dalam tugas-tugas kerakyatan lainnya perlu dikembangkan. Sebagai lembaga demokrasi yang mewakili rakyat memang seharusnya lebih cerdas dalam bertindak, lebih arif dalam berucap dan selalu mendahulukan kepentingan rakyat, bukan partai atau nama baik pribadi atau kelompok.

Akhirnya pengalaman tahun lalu dimana banyaknya kelompok masyarakat dengan membawa aspirasi yang berbeda berkaitan dengan membawa aspirasi yang berbeda berkaitan dengan di terima atau tidaknya LPJ walikota bisa di jadikan pengalaman berharga. Hal ini bisa jadi mencerminkan bahwa ada sedikit ketidakpercayaan dari masyarakat tentang kinerja anggota dewan atau yang lebih buruk lagi adalah, adanya gugatan telah representatifkah komposisi keanggotaan dewan sekarang ini? dan apakah sistem demokrasi perwakilan yang diterapkan sekarang masih sesuai dengan perubahan kondisi masyarakat yang kian cerdas

Hanya satu hal yang perlu dicatat adalah pentingnya pertumbuhan ekonomi terletak pada sumbangannya terhadap kemakmuran masyarakat secara umum. Pertumbuhan sangat diinginkan karena akan memungkinkan masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa lebih banyak serta juga menyumbang pada penyediaan barang/jasa sosial yang lebih besar (kesehatan, pendidikan dan sebagainya), sehingga meningkatkan standar hidup riel. Idealnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus signifikan dengan kian membaiknya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, terutama yang berkait erat dengan jasa-jasa sosial. Di samping hal tersebut di atas, perlu adanya kebijakan pembangunan ekonomi yang memberikan peluang yang sama (proposional) kepada setiap warga masyarakat untuk berpartisipasi.

Menumbuhkan Etos Kerja Bangsa

Etos kerja bisa diartikan sebagai nilai kerja yang berkait erat dengan orientasi, motivasi dan tujuan kerja bagi pelaku pekerjaan. Orientasi, motivasi dan tujuan kerja ini akan sangat menentukan semangat pelaku pekerjaan yang pada akhirnya juga berakibat pada hasil pekerjaannya, baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Pengertian ini mengindikasikan bahwa etos kerja ideal berkait erat dengan *way of life* (pandangan hidup) atau tempat masyarakat dimana individu itu menjalani hidup dan kehidupannya. Dengan kata lain harus mengikuti kultur masyarakat itu sendiri.

Signifikansi antara etos kerja dan *way of life* ini bisa dilihat di beberapa negara yang penduduknya memiliki *income* perkapita tinggi. Di negara-negara tersebut dalam menempuh kehidupan ekonominya sangat memegang kuat kultur yang ada di masyarakatnya. Amerika dengan doktrin *time is money*-nya menjadikan setiap gerak perilaku masyarakat disana harus mengandung nilai ekonomis. Atau Jepang yang mendapat julukan "Naga Asia" di bidang ekonomi (hanya dalam waktu kurang dari setengah abad bangkit dari puing-puing reruntuhan negaranya menyusul dibomnya Hiroshima oleh Sekutu dalam perang dunia kedua) karena berpegang teguh bahwa bekerja merupakan manifestasi bakti mereka kepada Kaisar yang merupakan wakil Tuhan di bumi.

Indonesia, dengan penduduk kelima terbesar di dunia dan memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah lagi beragam sebenarnya sangat potensial untuk menjadi negara besar di bidang ekonomi. Hanya saja karena terjajah (Belanda) dalam waktu yang sangat lama, menjadikan beberapa sikap yang anti produktifitas kuat berakar di kalangan masyarakatnya. Budaya feodalisme yang

memunculkan inferioritas yang akut yang berdampak memadamkan kreatifitas (atau lebih mengerikan lagi tidak menghargai kreatifitas).

Dikotomi yang dibangun oleh penjajah terhadap pribumi dengan melakukan stratifikasi kelas priyayi dan bukan priyayi, ditambah lagi dengan budaya kekeratonan yang dimiliki oleh hampir sebagian besar komunitas masyarakat di bagian republik ini, sedikit banyak mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam melakukan aktifitas sosial, termasuk di antaranya ekonomi. Sehingga tidaklah terlalu mengherankan jika sebagian besar masyarakat berangan-angan menjadi pegawai pemerintah demi status sosial meski dengan gaji yang kecil dibanding menjadi seorang wiraswasta.

Faktor penyebab

Pilihan menjadi pegawai pemerintah tetap menjadi primadona pada masa pasca kemerdekaan (dan mungkin hingga saat ini). Hal ini disebabkan kebijakan politik penguasa, lingkungan sosial kemasyarakatan, baik keluarga, sekolah maupun lingkungan dunia usaha sendiri, kondusif untuk tumbuhnya mentalitas pegawai (baca: bawahan) yang merupakan syarat mutlak menjadi pegawai pemerintah suatu rezim.

Pendekatan stabilitas nasional yang diambil penguasa cenderung memarjinalisasi nilai-nilai tradisional dan mematikan kreatifitas sosial yang menjadi dasar terbentuknya suatu etos kerja bangsa. Pemberian cara-cara ilegal kepada pengusaha besar (dengan menekan bahkan menghilangkan sama sekali peluang pengusaha kecil dan menengah) yang diperagakan penguasa membentuk opini publik bahwa jika mau menjadi pengusaha harus berani main sikut, suap, menjilat dan cara-cara lain yang tidak etis ditinjau dari moralitas masyarakat Indonesia yang agamis. Sementara agama mengajarkan bahwa berusaha atau bekerja merupakan ibadah, bekerja merupakan manifestasi seorang hamba dalam kerangka penghambaannya kepada Sang Pencipta.

Pendidikan formal disekolah sarat dengan warna verbal, berfungsi sebagai transfer pengetahuan belaka. Kurikulum yang digunakan terlalu sentralistik, tidak memberikan tempat yang cukup bagi kreatifitas budaya daerah (kalaupun ada hanyalah tempelan belakang). Bahkan tidak ada tempat untuk perkembangan jiwa kemandirian/wiraswasta bagi pendidik dan peserta didik.

Literatur yang digunakan di pendidikan formal pun relatif belum disesuaikan dengan kondisi keindonesiaan. Meski sejak pemerintahan Habibie telah diupayakan konsep iman dan takwa (imtak) yang dikembangkan secara komprehensif terhadap semua bidang studi yang diberikan kepada peserta didik di semua jenjang pendidikan, tetapi upaya ini tampaknya belum menampakkan hasil.

Output yang dihasilkan dari pendidikan seperti ini tentu saja merupakan sosok-sosok manusia yang menyikapi perubahan tanpa kreatifitas, sosok manusia yang bereaksi setelah ada aksi (bukan sosok yang antisipatif, yang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas diri, keluarga dan lingkungan sosialnya), yang menerima nasib apa adanya tanpa berusaha menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Kekayaan budaya

Pluralitas etnis serta keragaman alam yang dimiliki menjadikan republik yang berada di khatulistiwa ini memiliki peluang besar untuk menjadi negara dengan kemampuan ekonomi yang sejajar dengan negara lainnya.

Jika saja iklim demokrasi yang dikembangkan memberikan tempat wajar bagi perkembangan budaya setiap etnis, memberikan peluang berusaha yang sama terhadap pengusaha kecil, menengah dan besar, maka waktu setengah abad sudah cukup bagi negara ini memiliki kemajuan ekonomi -paling tidak di tingkat Asia- yang membanggakan.

Kultur berekonomi yang kuat dimiliki hampir semua etnis. Ambil contoh dengan komunitas etnis Padang dengan nasi padang

dan bisnis kaki limanya bertebaran di semua pelosok propinsi. Kepedulian, perasaan sesama perantau menjadikan mereka saling menolong dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Hal yang sama ditemui pada komunitas etnis Madura, Tegal dan lainnya.

Jika ditarik garis merah, maka ada kesamaan tradisi di antara etnis tersebut dalam menghadapi kehidupan ekonomi,tradisi ini tumbuh dari perintah agama yang memerintahkan supaya mereka bertebaran di muka bumi dalam mencari penghidupan. (QS al-Jumu'ah).

Hegemoni budaya (Jawa sentris) yang dilakukan oleh penguasa selama hampir tiga dekade memarginalisasi -untuk tidak mengatakan mematikan- kekayaan budaya ekonomi tradisional ini. Praktek-praktek kolusi, monopoli, dan prilaku korup di kalangan birokrasi di semua level dan di semua daerah ikut andil dalam memadamkan semangat wiraswasta yang berorientasi pada kultur tradisi asli kedaerahan.

Peran Pendidik dan Pendidikan

Konsep ideal bidang ekonomi sebenarnya telah dimiliki ketika berdirinya republik ini, dengan mengambil jalan tengah antara sistem liberalisme dan sosialisme maka bisa dikatakan kita memiliki konsep yang membawa rakyat Indonesia menuju kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan dengan waktu yang relatif singkat.Penyimpangan terjadi dalam implementasi terjadi ketika rezim terlalu lama berkuasa dan lembaga kontrol tidak berfungsi.

Pijakan hukum dan perundang-undangan yang memihak komunitas kelas menengah dan kecil (di antaranya koperasi) telah dimulai dari pemerintahan transisi Habibie. Meski sempat terhenti beberapa waktu (karena terhentinya bantuan dari kreditor luar negeri), akhirnya dengan perubahan beberapa pasal dalam Lol (Letter of Intens) maka bantuan untuk memutar roda perekonomian, khususnya pengusaha kecil dan menengah kembali bisa diteruskan (termasuk juga di dalamnya program jaringan pengaman sosial).

Banyaknya penyelewengan yang dilakukan para pelaksana, baik pada program KUT, JPS atau pelaksana program sejenis mengindikasikan bahwa strategi atau sistem apapun yang digunakan dalam pelaksanaan suatu program akan tergantung pada kualitas manajemen dan juga (utamanya) kualitas moralnya. Bicara tentang manajemen dan molaritasnya maka tidak akan terlepas pada bagaimana proses pendidikan terhadap generasi termasuk di dalamnya bagaimana kondisi atau niat baik dan ketulusan hati dari pendidik.

Proses pendidikan terjadi dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan institusi yang pertama dan utama menanamkan penghargaan pada prestasi kerja, sehingga bisa dikatakan keberhasilan penanaman etos kerja suatu generasi yang sesuai dengan tradisi keindonesiaan sangat dipengaruhi institusi ini.

Juga ditanamkan sejak usia dini untuk memandang sama semua jenis pekerjaan, batas baik buruknya suatu pekerjaan hendaknya dipandang dari profesional tidaknya/dedikasi yang ditujukkan kepada pekerjaan bukan dari siapa dan darimana asal orang yang mengerjakannya. Sehingga derajat antara seorang direktur dan tukang cukur akan sama selama keduanya dilakukan secara baik dan peneluh kesungguhan, lepas dari jauhnya perbedaan penghasilan dari keduanya. Karena masalah penghasilan berkaitan dengan rizki yang telah diatur oleh Yang Maha Pengasih, Tuhan Semesta Alam.

Sekolah sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam membentuk generasi yang kelak akan memimpin masyarakat seharusnya terus melakukan upaya pembenahan, baik bidang kurikulum, teknik pengajaran, guru maupun orang-orang yang terlibat dalam dunia persekolahan (departemen atau dinas). Kurikulum yang selama ada selama ini, terutama bidang yang menitikberatkan pada pembentukan watak dan moralitas diwarnai oleh warna verbalisme yang sangat kental. Penekanan pada segi

kognitif/hapalan sangat kuat, sementara pengembangan kualitas serta penghargaan terhadap kreatifitas berpikir relatif sedikit.

Pelajaran agama (atau lebih tepatnya pelajaran pengetahuan agama) di SMU umum dengan alokasi dua jam setiap minggunya terasa mustahil akan membentuk pribadi yang agamis. Pelajaran PPKn hanya berisi hapalan-hapalan yang mungkin sebagian besarnya telah diterima siswa peserta didik ketika SMP, tidak akan mampu membentuk jiwa nasionalisme atau cinta bangsa. Kepribadian yang agamis dipadukan jiwa kebangsaan merupakan landasan bagi terbentuknya etos kerja sebuah generasi, setelah sebelumnya mereka dibentuk oleh lingkungan keluarganya.

Literatur-literatur di sekolah, terutama ilmu-ilmu sosial yang mayoritas bersumber dari negara-negara barat perlu dinasionalisasi, diberikan sentuhan keindonesiaan agar bisa bermanfaat maksimal bagi perkembangan jiwa peserta didik. Ruh materialisme dalam konsep-konsep ilmu ekonomi misalnya, yang mengabaikan peri kemanusiaan dan keadilan perlu diperkaya dengan ruh agama yang menyeimbangkan antara tujuan dunia dan akhirat.

Sejatinya pers atau media massa berperan sebagai pendidik dalam upaya menumbuhkan etos kerja masyarakat, sehingga penyajian tokoh-tokoh, kisah atau film- film hendaknya tidak melulu menawarkan mimpi, atau demonstrasi keglamouran, serta perilaku konsumerisme dari para selebritis dan tokoh lain yang sebenarnya merupakan bagian terkecil (sangat kecil malah) dari komunitas masyarakat. Jangan memanjakan para pengusaha pemasang iklan dengan memberikan pemirsa "ekstasi layar gelas" melalui sinetron-sinetron picisan demi mendongkrak rating.

Menghitung Ongkos Sosial

Pemberlakuan otonomi daerah (otda) bagi seluruh daerah kota dan kabupaten Indonesia sejak tanggal 1 januari 2001 merupakan langkah pembangunan nasional. Meski strategi ini dianggap menurut beberapa kalangan pemerhati pembangunan terutama yang berkaitan dengan persoalan kemampuan daerah yang berbeda antara satu dan lainnya, tetapi sebagai suatu gagasan pembaharuan yang sifatnya aspiratif (karena sedikit banyak kebijakan ini muncul karena desakan dari daerah juga) ini perlu disikapi secara arif dan bijaksana oleh kalangan *decision maker* di tingkat daerah maupun masyarakat luas.

Kearifan dan kebijaksanaan dari pemda ditunjukkan dengan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, melibatkan masyarakat secara aktif (tidak hanya melibatkan wakil rakyat yang duduk di legislatif yang terus terang saja kemampuannya tidak terlalu super atau serba bisa) sehingga hasil-hasil pembangunannya kelak, sedikit atau banyak, baik atau buruk tidak memunculkan polemik atau konflik yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan.

Pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial suatu masyarakat, menyangkut upaya perubahan mendasar dari seluruh struktur ekonomi dan sosial, sehingga idealnya pembangunan tidak hanya bersegi gagasan mengenai perbaikan-perbaikan ekonomi semata. Bukan hanya sekedar perubahan dari miskin ke kaya, dari ekonomi perdesaan tradisional ke ekonomi perkotaan modern melainkan juga mengenai harga diri manusia, ketentraman, keadilan dan persamaan derajat yang lebih tinggi. Untuk itu pendekatan yang digunakan dalam pembangunan tidak melulu hanya dari sisi

ekonomi, tetapi juga pendekatan sosiologi, antropologi dan agama sebagai kebutuhan dasar manusia.

Perubahan dasar dari struktur ekonomi adalah menyangkut perubahan-perubahan dalam produksi dan permintaan maupun peningkatan dalam distribusi pendapatan dan pekerjaan. Dengan kata lain berkaitan dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pemerataan pendapatan masyarakat. Konsekuensinya adalah pemerintah daerah perlu menciptakan suatu perekonomian yang lebih beragam, dengan berbagai sektor utama yang saling berkait, untuk mengadakan input bagi proses produksi dan memperluas pemasaran hasil produksi.

Perubahan struktur ekonomi ini akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kepada jumlah faktor seperti sumberdaya alamnya, kondisi geografis serta keterampilan-keterampilan penduduknya. Setiap daerah harus menggunakan secara maksimal kesempatan-kesempatan yang tersedia untuk memperkuat pembangunan ekonomi daerahnya masing-masing. Analisis benefit peningkatan produktifitas masyarakat dalam rangka meningkatkan produk domestik bruto (PDB) harus menjadi skala prioritas karena dengan meningkatnya PDB otomatis pendapatan masyarakat juga meningkat. Tetapi dengan mencermati pengalaman pemerintahan sebelum reformasi yang dalam pembangunan ekonominya justru menyebabkan kesenjangan ekonomi yang berujung pada kesenjangan sosial yang rawan konflik karena terlalu menekankan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek yang lainnya (misalnya tentang pemerataan pendapatan, pemerataan dalam bidang sosial keagamaan dan sebagainya, sehingga setiap keputusan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah hendaknya selalu berorientasi pada asas manfaat dan biaya. Setiap keputusan ekonomi yang diambil tidak semata-mata mempertimbangkan/membandingkan besarnya kontribusi yang akan diperoleh secara ekonomis bagi sekelompok (kecil) masyarakat atau besarnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan biaya yang dikeluarkan secara material belaka. Tetapi perlu

dipertimbangkan biaya immaterial yang dikorbankan dalam jangka panjang atas keputusan itu.

Keputusan yang diambil selalu memperhatikan kepentingan rakyat secara mayoritas, dampak negatif pembangunan diupayakan seminimal mungkin. Artinya dampak yang sifatnya alamiah masih bisa ditolerir misalnya proses pembangunan akan menumbuh suburkan sifat-sifat individualistik dan mengikis budaya gotong royong, kekeluargaaan, hubungan kekeluargaan dan yang sejenisnya. Operasionalnya berimplikasi pada, bahwa sebaiknya pemerintah daerah tidak membuat keputusan atau melegalisasi usaha-usaha yang menyakiti hati rakyat, misalnya saja dengan melokalisasi prostitusi dan perjudian dengan dalih aktifitas ini sulit untuk diberantas (sekaligus akan menjadi sumber pendapatan daerah yang nominalnya cukup menggiurkan) seperti yang dulu pernah digagas oleh pemerintah daerah di bagian Utara Jawa Barat.

Dalam jangka pendek mungkin benar bahwa langkah lokalisasi ini merupakan solusi yang baik, karena penyebaran AIDS bisa di kontrol, lapangan kerja berhasil diciptakan tetapi dalam jangka panjang tak terbayangkan ongkos sosial yang harus di bayar oleh generasi selanjutnya. Akan muncul asumsi bahwa potensi dan perjudian adalah perbuatan yang halal dan disahkan oleh negara. Kerusakan moral generasi dan menurunnya etos kerja akan terjadi dengan kecepatan yang mencengangkan.

Sinkronisasi

Cirebon sebagai kota yang secara geografis strategis dan menjadi kota satelit bagi kota-kota sekelilingnya memiliki potensi ekonomis yang cukup besar dalam pelaksanaan otda ini. Selama potensi ini ditanggapi secara cerdas dan ditangani dengan strategi yang komprehensif oleh pemerintah daerah, maka potensi ini akan berubah menjadi daya dorong dalam mensukseskan pembangunan daerah Cirebon. Tanggapan yang bagaimana dan strategi apa yang perlu diambil memang memerlukan pemikiran yang mendalam dan tidak hanya melibatkan jajaran legisllatif belaka tetapi juga komponen masyarakat lainnya (ulama, LSM, akademisi).

Tanggapan yang tidak populer serta strategi yang kurang tepat, alih-alih potensi ini menjadi kunci keberhasilan malah justru menjadi penghambat bagi keberhasilan pembangunan itu sendiri.
Sdr. Irsad Sidik SH di media ini edisi 21-22 November 2000 menulis tentang fungsi Kota Cirebon di persimpangan jalan. Beliau memberikan alternatif tentang bagaimana idealnya strategi pembangunan ekonomi kota Cirebon tercinta ini.

Beliau memberikan dua alternatif yang sifatnya. paradoksal, artinya dua pilihan tersebut tidak bisa diwujudkan secara bersamaan. Alternatif pertama dengan memfungsikan Kota Cirebon sebagai kota jasa pelabuhan, perdagangan dan pariwisata dengan tentu saja menyiapkan sarana dan prasarananya. Untuk mencapai itu. Alternatif kedua adalah memfungsikan Kota Cirebon sebagai kota pusat pengembangan agama (kota aulia).

Pandangan Sdr. Irsan Sidik SH ini barangkali bersifat stereotipe bagi sebagian besar eksekutif dan legislatif kita selama ini. Secara ekstrem (maaf), pembangunan ekonomi suatu kota harus steril dengan hal-hal yang berbau agama. Artinya peran suatu agama harus dimarginalkan kalau mau berhasil dalam membangun perekonomian suatu masyarakat.

Dan sebaliknya jika pembagunan sektor sosial keagamaan yang didahulukan maka kemajuan kehidupan ekonomi masyarakat akan terhambat. Dengan demikian ada interpretasi (dan ini memang sudah menjadi opini publik) bahwa untuk mewujudkan kota jasa pelabuhan, perdagangan dan wisata harus disediakan sarana dan prasarana atau praktek-praktek yang antisosial dan agama. Misalnya tempat-tempat hiburan malam (dengan bisnis syahwat terselubungnya), amusement (dengan segenap penyalahgunaan untuk perjudiannya), hotel-hotel (dengan pelayanan haramnya), dan sebagainya.

Hal ini memang bisa dimaklumi karena realitas sosial di negara-negara maju yang menganut sekularisme liberal memang sukses dengan langkah-langkah di atas. Tapi kita lupa bahwa konsep pembangunan suatu daerah akan berhasil bila didukung

atau sesuai dengan budaya masyarakat dimana konsep itu diimplementasikan. Karena masyarakat, di samping sebagai obyek pembangunan, juga sebagai subyek.

Yang perlu dipahami oleh segenap *decision maker* pembangunan adalah semua agama (termasuk Islam tentunya) tidak anti pembangunan, bahkan sangat mendorong pemeluknya untuk senantiasa memperbaiki kehidupan sosial ekonominya. Tidak salah kalau kita mencoba mempelajari sejarah beberapa hal kekhalifahan pemerintahan Islam masa lalu (artinya dari konsep pembangunannya), kemudian memadukannya dengan teknologi dan manajemen yang ada di negara-negara yang telah maju sekarang ini. Perpaduan ini tetap dengan mengambil sikap kritis zit dalam impelementasi, karena-sekali lagi setiap daerah mempunyai budaya yang berbeda. Kekhalifahan Abbasyiah misalnya, berhasil mencipatakan fungsi kota yang memiliki dimensi yang lengkap, dari mulai kota pelabuhan, perdagangan, wisata, budaya, pendidikan maupun pusat pengembangan ilmu.

Dari itu menurut hemat penulis, kunci keberhasilan dari pembangunan ekonomi Kota Cirebon era ota adalah memadukan kedua alternatif yang diberikan oleh Sdr. Irsan Sidik diatas wisata alam dan budaya akan lebih berkembang jika nilai-nilai religius yang dipunyai kota ini lebih dari berabad-abad lalu digali dan dilestarikan keberadaanya, hal itu akan bisa menyedot wisatawan baik lokal maupun mancanegara dibandingkan dengan membuat "*Disney Land Cirebon"*. Apalagi jika nilai-nilai religius ini diupayakan untuk diaktualisasikan oleh segenap jajaran pemerintahan maupun masyarakat maka akan memunculkan masyarakat yang mempunyai etos kerja dan sportifitas tinggi yang merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya fungsi kota yang multi dimensional.

Sinerji pembangunan

Bercermin kepada keberhasilan pembangunan beberapa negara maju dimulai dari tingginya tingkat PDB yang mayoritas

mengandalkan sektor industri, dagang dan jasa. Dan ternyata pembiayaan pembangunannya rata-rata disumbang oleh pajak yang berasal dari para industriawan, pedagang dan pemilik jasa, maka diambil satu kesimpulan bahwa ternyata keberhasilan pembangunan suatu daerah sedikit banyak ditentukan oleh partisipasi aktif dan kejujuran dari segenap komponen yang terlibat dalam pembangunan itu sendiri. Optimisme akan terus menyertai pembangunan Kota Cirebon era otda, terutama pada kian banyaknya investor yang telah dan akan menginvestasikan modalnya melihat dari kondisi geografis kota, tingkat keamanannya (markas TNI dan Brimob/kepolisian ada di setiap pojok kota) dan juga sikap wellcome para penduduk terhadap pendatang.

Hanya yang menjadi sedikit persoalan adalah tentang kejujuran para investor dalam menyetor pajak (baik PPN maupun PPh) masih menjadi pertanyaan besar. Telah menjadi rahasia publik bahwa mayoritas pengusaha kita kerap melakukan *window dressing* atau manipulasi data laporan keuangannya untuk menghindari pajak sehingga sistem *self assesment* yang digunakan, dimana wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak dan juga penyetorannya, perlu diimbangi dengan peraturan (daerah) lain yang mencegah serta memaksa para wajib pajak untuk berlaku jujur dalam pembayaran pajak dari hasil usahanya.

Peran masyarakat dalam pembangunan harus lebih dioptimalkan (tentunya dengan teknik dan metode tertentu) sehingga mereka akan lebih memiliki kotanya. Kebersihan akan terjaga, penanganan kejahatan tidak hanya menjadi urusan aparat keamanan belaka, dan perilaku-perilaku positif lain akan dengan sendirinya tumbuh. Penyakit masyarakat yang merebak, yang sesungguhnya merupakan dampak alamiah suatu pembangunan hendaknya disikapi secara bijak oleh pemerintah dengan terus menerus mengadakan pendekatan-pendekatan persuasif sambil mengupayakan jalan keluarnya.

Anomali Sebuah Sistem Pemerintahan

Ada tiga syarat utama jika sebuah negara akan berdaulat dan diakui keberadaannya dalam pergaulan internasional. Pertuna harus mempunyai wilayah, kedua adanya rakyat yang merupakan *stake holder* dan ketiga mempunyai pemerintahan yang mengatur kepentingan rakyat, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal pemerintah mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan antar warga negara, warga negara dengan pemerintah, sedangkan kewenangan eksternal dimiliki pemerintah dalam hal hubungan bilateral maupun multiteral.

Dari sekian banyak sistem pemerintahan di dunia, para *founding father* lebih dari setengah abad lalu- bersepakat untuk mengadopsi sistem demokrasi. Pilihan sistem ini bukan tanpa alasan, meski secara substantive semua sistem pemerintahan, baik monarki, sosialis, teokrasi dengan berbagai macam variasinya maupun sistem demokrasi itu sendiri mempunyai kesamaan yang fundamental, yakni akan berorintasi pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Beragamnya etnis dengan konsekuensi logis munculnya pluralitas budaya yang menjadi fakta obyektif masyarakat adalah salah satu dari sekian banyak alasan mengapa demokrasi menjadi pilihan. Dan secara etimologis kata demokrasi mengandung makna kedaulatan di tangan rakyat sehingga tidaklah berlebihan jika sistem ini merupakan pilihan terbaik bagi ke berlangsungan suatu negara.

Dalam lingkup yang lebih mikro, sebuah kota/kabupaten juga memerlukan ketiga syarat di atas. Dan perkembangan politik , pasca tumbangnya rezim orde baru dengan diberlakukannya otonomi daerah menjadikan sebuah kota/kabupaten benar-benar merupakan miniatur sebuah negara yang berdaulat. Sebuah

kota/kabupaten mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur siapa yang akan menjadi presiden kota/kabupaten'nya, membuat peraturan daerahnya sendiri, membuat anggaran belanja daerahnya dan sebagainya. Dalam konteks inilah, tidak semestinya keputusan terpilih tidaknya seorang bupati/walikota, sah tidaknya seorang walikota untuk dilantik, diberhentikan atau tidaknya seorang walikota untuk meneruskan jabatannya ditentukan seorang gubernur.

Desentralisasi yang dilakukan Pemerintah Pusat bisa dikatakan tidak optimal jika dalam persoalan daerah yang mendasar semacam penentuan walikota bupati harus diserahkan kepada pejabat di tingkat yang lebih tinggi (gubernur). Dan jangan-jangan jika *dead lock* penentuan walikota/bupati kian banyak terjadi, maka bisa jadi pemerintah pusat akan kembali mencabut desentralisasi yang dilakukan. Kebijakan ini diambil mengingat, bukan hanya persoalan penentuan orang nomor satu daerah saja, tetapi ratusan kebijakan yang dihasilkan penguasa daerah cenderung kontra produktif, keberanian pejabat daerah untuk melakukan tindakan korupsi, kasus kriminalitas yang kian meningkat dan berbagai macam persoalan lainnya.

Daerah Ciayumajakuning mungkin ditakdirkan menjadi *pilot project* bagi menguatnya masyarakat sipil atau bisa jadi sebaliknya, menjadi contoh ketidaksiapan daerah untuk menentukan nasibnya sendiri. Pelantikan bupati Kuningan yang sempat diguncang isu pemalsuan ijazah kandidat bupati terpilih yang memaksa tim verifikasi dari Jawa Barat untuk turun tangan, pemilihan bupati Majalengka yang dinodai kasus politik uang dari anggota dewannya, dan terakhir kasus interpelasi terhadap walikota Cirebon yang berujung pada impeachment dengan 19 suara dari 30 anggota dewannya dan, lagi-lagi minta petunjuk dari gubernur.

Ada keserupaan dari ketiga tragedi di atas, yakni berangkat dari lemahnya kinerja anggota legislatif ketiga daerah tersebut. Dengan dalih mereka merupakan representasi dari rakyat (melalui pemilu 1999), mereka seolah bebas menentukan sikap dan

menghasilkan kebijakan tanpa mencoba menyerap dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Arogansi anggota legislatif Kuningan misalnya, terlihat sekali ketika mereka menentukan walikota. Entah karena akurasi pemberitaan media massa yang tidak valid yang menganggap mereka tidak aspiratif atau memang demikian kondisi obyektif aspirasi mayoritas masyarakat sehingga sempat memicu ketidakpuasan sebagian kalangan menjelang pelantikan walikota daerah tersebut. Bagaimanapun realitas yang sebenarnya, tapi bisa disimpulkan bahwa gugatan pasca pemilihan bupati menunjukkan tingkat kepercayaan sebagian masyarakat Kuningan terhadap anggota legislatifnya tidaklah menggembirakan.

Kasus politik uang yang melibatkan beberapa anggota dewan saat pemilihan bupati Majalengka jelas merupakan indikasi betapa menyimpangnya perilaku dari pelaksana sistem pemerintahan dari yang seharusnya. Interpelasi yang berlanjut dengan *impeachment* kepada walikota Subardi yang baru berjalan delapan bulan mengindikasikan bahwa para anggota dewan kota Cirebon tidak serius dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu pilar pemerintahan dalam sebuah sistem demokrasi. Meski walikota merupakan jabatan politis, bukan berarti jabatan ini melulu diselesaikan dengan cara- cara politik dan menafikan perasaan rakyat, memperlakukan rakyat sebagai penonton yang tidak mengerti apa-apa. Mengangkat kemudian memberhentikan walikota hanya dalam durasi waktu kurang dari satu tahun benar-benar menunjukkan bahwa betapa rendahnya pandangan anggota dewan kepada rakyat. Mereka terus menutup mata, tidak mencoba menerima kenyataan bahwa tidak sedikit rakyat yang mempunyai kemampuan intelektualitas dan pandangan politik lebih arif dan lebih bijak dibanding mereka.

Sumber konflik / persoalan yang menjadi alasan interpelasi boleh dikatakan hanya terletak pada perbedaan persepsi antara kedua lembaga terhadap bagaimana membuat rakyat sejahtera, bukan persoalan korupsi maupun kriminalitas. Persoalan galian, kutiong, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), bando sebenarnya

bukan persoalan krusial yang sangat strategis, artinya masih bisa diupayakan untuk didamaikan atau dicari jalan keluamya.

Absolutisme menjadi anomali yang mengerikan dan niscaya dalam suatu sistem pemerintahan, apapun bentuk sistemnya. Bedanya jika sistem monarki, teokrasi dan yang sejenisnya, terjadi kekuasaan mutlak yang anti kritik dari seorang raja/kaisar/amir, maka dalam sistem demokrasi terjadi arogansi dari institusi legislatif dan eksekutif. Arogansi kedua institusi demokrasi ini bisa dalam bentuk kolusi atau kontradiksi dalam menentukan kebijakan diantara keduanya, dengan mengabaikan suara rakyat dan jika diperlukan kepentingan rakyat pun dikorbankan. Mereka merasa telah dipilih rakyat untuk lima tahun, maka apapun yang dilakukan mereka pasti disetujui rakyat.

Praktik kolusi terjadi ketika kesepakatan dalam penyusunan APBD, dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat banyak, kesejahteraan para anggota legislatif terus meningkat sementara pihak eksekutif terpaksa mengabulkan karena takut diimpeach. Kasus APBD Gate kota Cirebon semasa pemerintahan Lasmana mungkin bisa dijadikan representasi praktek ini. Sedangkan interpelasi dan impeachment Subardi beberapa hari terakhir bisa dijadikan contoh bentuk kontradiksi antara kedua lembaga demokrasi ini.

Bagaimanapun keputusan akhir kasus *impeachment* yang dilakukan anggota legislatif kepada Subardi, demikian juga dengan penyelesaian kasus pemilihan bupati Kuningan dan Majalengka, tampaknya tidak mempengaruhi persepsi sebagian masyarakat tentang lemahnya kinerja kedua lembaga dalam sebuah sistem demokrasi. Diakui atau tidak, persepsi ini akan mempengaruhi partisipasi rakyat dalam pembangunan di ketiga daerah tersebut.

Satu hal yang perlu dicatat, baik oleh para penguasa maupun para kandidat yang akan berkuasa pasca pemilu, bahwa vokalitas anggota legislatif bukan semata-mata untuk mengkritik dan menyalahkan kebijakan dari pihak eksekutif, apalagi untuk menurunkan pimpinan eksekutif. Sebaliknya, pihak eksekutif untuk

lebih teliti dalam membuat kebijakan dalam rangka kesejahteraan rakyat banyak dan tidak takut untuk 'melawan' kemauan yang berlebihan dari para anggota legislatif berkait dengan dana rakyat. Uang *kadeudeuh,* uang pesangon, uang purna bakti atau sejenisnya jelas-jelas merupakan kemauan yang anti rakyat, berapa pun jumlahnya harus ditolak mentah-mentah.

Sebaiknya semua anggota legislatif di seluruh pelosok negeri ini bisa bercermin kepada 'keberanian anggota legislatif dari provinsi banten yang menolak dana bantuan perumahan yang diberikan pihak eksekutif. Para anggota legislatif di provinsi yang relatif baru ini berusaha mencukupkan diri dengan gaji yang diterima tiap bulan. Dan dengan arif mereka mengatakan, sebaiknya dana perumahan tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat banyak.

Mereka bukan tidak butuh rumah atau fasilitas tambahan lainnya, tetapi mereka paham benar kalau pemberian bantuan perumahan akan menyakiti hati rakyat. Dan mereka tahu benar bahwa gaji yang mereka jauh di atas rata-rata para konstituen mereka.

Kalau saja kualitas sebagian besar orang yang terlibat dalam sistem pemerintahan daerah di republik ini seperti mereka, bukan para pecundang, perampok, dan pengemis uang rakyat sembari menyebut jasa-jasa mereka selama menjabat maka dijamin negeri ini akan menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi, sejajar dengan negara-negara lain.

Last but not lease, satu hal yang perlu dan harus diingat, bahwa sejatinya para pejabat pemerintah, baik yang berada di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif, memiliki status ganda. Bahwa mereka memiliki peran ganda di republik ini, sebagai pejabat dan pada saat yang sama mereka juga adalah rakyat, menjadi bagian dari masyarakat. Peran sebagai rakyat semestinya berimbang dengan peran sebagai rakyat, artinya sebagai rakyat dan hidup di tengah masyarakat mereka harus bisa menyerap aspirasi rakyat dan berusaha sekuat tenaga, karena posisinya

sebagai pejabat, untuk berusaha sekuat daya dan upaya mewujudkan aspirasi tersebut secara maksimal.

Buruh di Tengah Kekuatan Birokrasi dan Kapitalisme

Dengan harga bensin Rp 4.500.00 per liter dan beras Rp 3.500.00 per kg, sosok buruh di Indonesia yang hidup dengan isteri dan seorang anak, bisa disebut merupakan sosok yang memiliki ‘kecerdasan finansial’ yang luar biasa. Bisa jadi Kiyosaki salah seorang pakar yang menggagas kecerdasan finansial akan mengacungkan jempol sembari menggelengkan kepala tanda takjub tak terkira dengan kemampuan para buruh dalam mengatur *cash flow* mereka.

Jangankan berpikir soal kualitas pendidikan anak atau investasi untuk menghadapi kebutuhan yang paling mendasar berupa sandang, pangan dan papan pun para buruh harus bisa benar-benar cerdas menyiasatinya. Dengan UMK yang tidak lebih dari kisaran 500 ribu, jurus-jurus gali hutang tutup hutang, pagi makan dengan ikan asin plus cabe, sore makan cabe plus ikan asin, tidak pernah terlewatkan.

Mengapa nasib buruh di negera yang disebut-sebut sebagai negara dengan upah paling rendah di dunia ini tidak sebaik buruh di negara-negara Eropa, yang dengan kemampuan manajerialnya bisa menghimpun diri dalam satu wadah sehingga mempunyai posisi tawar yang kuat dengan para majikan, bahkan beberapa diantaranya mempunyai kekuatan politik dan memenangkan pemilu. Mungkinkah para buruh di Indonesia akan juga bisa menata diri dan mempunyai sebuah organisasi yang solid sehingga bisa sekuat seperti saudara-saudaranya yang berada di Eropa. Mungkinkah partai politik dengan 'nuansa buruh' yang dikomandani Mochtar Pakpahan bisa meraih suara signifikan di pemilu tahun 2009 mendatang, sehingga bisa mewarnai pembahasan rancangan undang-undang ketenagakerjaan di parlemen?

Satu-satunya jalan agar posisi buruh bisa bangkit dari marginalisasi yang dilakukan para majikan serta pemerintah adalah dengan berbenah terlebih dulu secara internal. Serikat pekerja, serikat buruh dan serikat-serikat lain yang bernafas buruh harus bisa bersatu dan menentukan agenda bersama dalam mengatasi berbagai persoalan buruh, baik yang berkaitan dengan internal-regional maupun yang eksternal internasional. Persoalan internal-regional berhubungan dengan perlindungan hak-hak buruh yang diimbangi dengan pemahaman kewajiban buruh serta pemahaman terhadap kondisi-kondisi keuangan dan prospek perusahaan dikaitkan dengan kondisi makro ekonomi negeri ini. Sementara persoalan eksternal internsonal berkaitan dengan persoalan regulasi perundangan buruh serta peraturan-peraturan buruh internasional yang telah diratifkasi pemerintah. Komunikasi dengan ILO dan serikat pekerja di negara- negara lain juga termasuk di dalamnya.

Serikat harus bisa melakukan penyadaran kepada para buruh bahwa mereka bukan sekadar salah satu dari faktor produksi disamping bahan baku, serta mesin belaka. Fungsi mereka tidak hanya menjadi materi yang dihitung secara matematis serta mempengaruhi besarnya *cost product* perusahaan belaka. Tetapi lebih dari itu, mereka harus mampu memberikan kontribusi lebih kepada perusahaan dengan cara berinteraksi, menghimpun diri, membenahi tempat kerja dan bersama-sama melakukan penyadaran bahwa perusahaan merupakan 'rumah kedua' bagi mereka. Terus-menerus meningkatkan motivasi kerja, melakukan perbaikan kinerja tanpa harus menambah biaya *overhead* perusahaan.

Para anggota serikat sedikitnya harus berusaha memahami bagaimana kesulitan para majikan dalam menghindari 'biaya siluman' yang dikutip para preman berdasi (oknum brikorat pemerintah) yang berdampak pada membengkaknya harga pokok produk dan berkurangnya daya saing produk di pasaran regional maupun internasional.

Tuntutan kenaikan upah tanpa diimbangi pengetahuan informasi keuangan perusahaan menjadi anti produktif, karena

kemampuan perusahaan yang terbatas dalam menghasilkan keuntungan. Alih- alih buruh sejahtera, justru musibah yang didapat karena para majikan akan menutup perusahaan akibat jumlah penjualan tidak bisa menutupi *cost product* yang dikeluarkannya.

Idealnya buruh harus menjadi mitra bagi para majikan atau sebaliknya, karena diakui atau tidak terjadi simbiosis mutualisma di antara keduanya. Kinerja perusahaan tidak bisa lepas dari kontribusi positif para buruh sehingga majikan semestinya sadar bahwa dengan makin meningkatnya omzet maka hak buruh untuk mendapatkan upah harus ditunaikan, terlepas ada atau tidaknya tuntutan.

Revisi undang-undang keberpihakan pemerintah kepada para majikan dibanding kepada para buruh dalam penyusunan revisi UU Ketenagakerjaan bisa dipahami jika dipandang dari sudut kepentingan pemerintah yang sedang menggenjot investasi asing di dalam negeri, peningkatan pertumbuhan ekonomi minus pemerataan, pemasukan pajak, serta hal-hal lain yang berkait erat dengan kepentingan pelestarian ekonomi pasar.

Dengan ketergantungan perekonomian Indonesia kepada pihak pihak asing (lembaga/negara donor) yang indikasinya adalah jumlah hutang yang demikian besar maka tidak salah kalau beberapa pengamat mengatakan kalau pemerintahan Indonesia merupakan kepanjangan tangan kapitalisme negara asing. Tidak heran kalau kasus Freeport, Busang, Newmoont, Cepu tidak pernah selesai (baca: dengan berbagai cara bisa dipastikan pihak asing akan dimenangkan).

Globalisasi ekonomi yang oleh komunitas masyarakat di beberapa negara semakin ditolak keberadaannya, oleh pemerintah Indonesia diterima sebagai sebuah keniscayaan yang tidak perlu dikaji ulang. Kesepakatan APEC, AFTA dan kerja sama lainnya terus digalang pemerintah, sementara pemerintah menutup mata terhadap praktek-praktek kotor yang dilakukan oknum birokrasi dan para preman jalanan (kasus terakhir adalah mogok kerja yang

dilakukan armada angkutan di 4 pelabuhan besar di Pulau Jawa karena pemberlakukan PPN 10% dari pendapatan mereka, sementara pungutan-pungutan liar yang dilakukan petugas di lapangan serta para preman tidak diurus atau diberantas).

Pressure para buruh dengan melakukan unjuk rasa atau mogok kerja sedikit banyak mengganggu aktivitas produksi di perusahaan masing-masing, dan diakui atau tidak langkah ini tidak lagi efektif. Ketika perimbangan kekuatan eksekutif dan legislatif relatif sama Pembentukan opini publik bahwa pemerintah telah melakukan 'kedzhaliman' terhadap buruh dengan munculnya produk perundang-undangan ketenagakerjaan melalui media massa mungkin lebih efektif. Serikat pekerja harus bisa menjalin kerja sama dengan para buruh atau kuli tinta media massa alias wartawan. Komunikasi dengan para lembaga-lembaga kemahasiswaan, LSM, keagamaan juga layak dilakukan.

Terakhir, dan ini harus dilakukan, konsolidasi internal di antara elemen buruh harus terus menerus dilakukan, pemupukan rasa senasib dan sepenanggungan, perjuangan tanpa kenal lelah terkait dengan hak-hak buruh, pemahaman tentang realitas ekonomi secara utuh; kesepakatan memerangi budaya korupsi birokrasi dan memahami kesulitan para majikan dan pemerintah dalam menghadapi tekanan globalisasi. Memang merupakan kerja besar yang menyerap banyak energi dan memerlukan waktu yang cukup lama. Tetapi jika ini berhasil dilakukan maka marginalisasi kaum buruh tak akan terja di lagi. Para buruh semakin cerdas, tuntutannya rasional, persoalan buruh mungkin tidak hanya semata-mata menjadi urusan buruh tetapi akan menjadi isu nasional yang diperjuangkan oleh segenap elemen masyarakat.

Pertanyaan yang muncul sekarang, untuk mencapai hal-hal yang diharapkan di atas, langkah pertama dan utama yang dilakukan adalah, mampukah atau tepatnya adakah dari para buruh itu, berapa orang yang memiliki idealisme untuk keluar dari pekerjaannya dan rela mengurusi persoalan-persoalan buruh dengan gaji yang sangat minimal.

Birokrat, Guru dan Burung Beo

Kekeliruan terbesar bangsa kita, dan sampai sekarang kekeliruan tersebut tetap dilakukan karena menganggap kekeliruan itu bukan sebagai kesalahan, adalah cara memandang persoalan pendidikan secara umum. Khususnya dalam memperlakukan guru sebagai orang yang berdiri di garda terdepan bidang pendidikan. Ironisnya lagi kekeliruan tersebut oleh sebagian kalangan justru dianggap sebagai sebuah kebajikan.

Ibarat seorang penggemar burung yang menganggap telah berbuat kebajikan dengan mengurung burung di sebuah sangkar yang harganya ratusan ribu rupiah, dan setiap hari diberinya makanan serta memuji keindahan suara/kecerdikannya kemudian memamerkannya di depan khalayak dalam sebuah kontes. Suatu kebajikan yang sangat subyektif-egois dan terkesan mau menang sendiri, karena kebahagiaan seekor burung tidak terletak pada bagusnya sangkar atau dengan banyaknya pujian. Tetapi anehnya di kalangan masyarakat perilaku memasung kebebasan hidup burung ini mendapatkan pembenaran, terbukti dengan seringnya diadakan kontes suara burung dan yang sejenisnya.

Tanpa bermaksud menyederhanakan apalagi meremehkan profesi guru di mana idealisme menjadi syarat utama dalam aplikasi kerjanya, analogi di atas tidak jauh berbeda dengan kehidupan guru di republik ini. Berbeda dengan profesi lain, profesi guru benar-benar telah diberi 'sangkar' oleh masyarakat kita. Sangkar ini meliputi seluruh aspek kehidupan sosial ekonomi budaya seorang guru dan seorang guru yang menggugat keberadaan sangkar, apalagi berusaha untuk keluar dari sangkar dianggap telah mengkhianati profesi keguruannya.

Secara historis proses terbentuknya sangkar dimulai dari berabad lalu yang dimotori oleh para keluarga kerajaan di seluruh

wilayah nusantara, kemudian karena pertimbangan politis-praktis diteruskan hingga sekarang dan dimotori oleh para birokrat para penguasa rezim. Seorang begawan/guru adalah sosok manusia paripura yang mempunyai kecerdasan intelektual dan kepiawaian dalam memberikan pelajaran kepada para ksatria/murid serta mempunyai watak sederhana, *nrimo* apa adanya, tidak *neko-neko*, jauh dari kemewahan dunia. Profesi guru dipuja dan dipuji, dimuliakan sebagai pahlawan yang tidak pernah menuntut tanda jasa serta harus siap menerima kehidupan ekonomis yang jauh dari mencukupi karena justru di situlah kelebihan profesi ini, makin jauh dari standar kehidupan ekonomi maka makin baik pula bagi pembinaan watak kesederhanaannya.

Sejak berdirinya republik ini, para birokrat dari setiap rezim yang berkuasa boleh dikatakan cukup berhasil membentuk guru menjadi seorang yang sederhana secara ekonomis. Dengan dua anak dan seorang istri seorang guru cukup memberikan keluarganya makanan empat sehat dan lima yang jauh dari sempurna, apalagi membiayai pendidikan anaknya hingga ke perguruan tinggi. Dan yang lebih seru lagi dengan gaji sedemikian besar, masyarakat masih mengharapkan guru yang profesional yang mampu mengikuti perkembangan tekonologi.

Memang gaji guru (dan gaji PNS pada umumnya) pasca keruntuhan rezim Orba mengalami kenaikan secara nominal, tetapi secara riil (dibandingkan dengan laju inflasi) kenaikan tersebut tidaklah berarti apa-apa. Dan ketika himpitan kehidupan ekonomi makin tak terperikan, diiringi kesadaran/ motivasi untuk lebih memberikan kehidupan yang layak kepada keluarganya banyak para guru yang *nyambi* profesi yang lain (menjadi tukang ojeg, tukang becak atau pekerjaan kasar lainnya). Respon para birokrat maupun masyarakat lainnya terkesan tidak responsif karena nyambi kerja kasar dianggap akan mengganggu kualitas saat mengajar. Ketika muncul peluang nyambi kerja halus misalnya menjadi komisioner buku-buku pelajaran non paket dengan mendapatkan komisi dari hasil penjualan, lagi-lagi masyarakat beranggapan itu

hal yang tidak etis dilakukan oleh seorang guru (baca: tidak bermoral/merusak citra guru). Bahkan tidak tanggung-tanggung beberapa wakil rakyat di lembaga legislatif suatu kota dengan kecerdasannya mengkritisi perihal kerja nyambi guru menjadi komisioner buku ini.

Sudah sedemikian kapitaliskah masyarakat kita? Ada kesan seolah-olah yang berhak memperoleh komisi harus yang mempunyai modal, harus sebuah institusi profit, entah toko buku, koperasi atau institusi profit lainnya. Sampai sejauh mana stigmatisasi profesionalisme guru kaitannya dengan jabatan rangkap komisioner yang dianggap kontroversial itu. Dan pertanyaan yang mengemuka dan harus dijadikan diskursus para ahli pikir maupun pemutus kebijakan adalah, apakah fatwa haram anggota wakil rakyat yang secara fungsional mewakili suara rakyat telah proporsional sekaligus profesional (untuk ukuran jabatan yang sestrategis itu).

Mengubah paradigma

Lompatan teknologi khususnya teknologi informasi yang luar biasa menjelang tahun 90-an mendorong hampir semua bidang profesi mengubah paradigmanya dan berusaha mempelajari serta memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal demi kemajuan bidang yang menjadi bidang garapannya. Dengan berkembangnya teknologi informasi maka potensi terbentuknya suatu kampung dunia (global village) yang meniadakan sekat-sekat geografis, politis, ekonomis dan sekat-sekat lainnya menjadi niscaya. Diakui atau tidak, profesi yang sangat lambat dalam memahami/mempelajari apalagi memanfaatkan adalah para praktisi pendidikan alias guru. Meski belum pernah diadakan pendataan secara akurat tetapi dengan melihat minimnya minat baca di kalangan guru maka bisa dikatakan bahwa sangat sedikit sekali jumlah guru yang menguasai atau paling tidak memahami teknologi informasi ini (karena biar bagaimanapun membaca merupakan syarat mutlak untuk mengembangkan pengetahuan).

Minimnya minat baca di kalangan guru telah lama menjadi keprihatinan beberapa kalangan, tetapi hingga saat ini keprihatinan itu tetaplah menjadi keprihatinan belaka. Apa dan mengapa serta bagaimana mencari solusi agar minat baca para guru meningkat tetaplah menjadi polemik tanpa ada kemungkinan diimplementasikan secara konkret, baik di tingkat birokrasi maupun di pihak guru itu sendiri. Rencana birokrat untuk menaikkan gaji guru ditelan hiruk pikuknya rekapitalisasi perbankan serta pembayaran hutang luar negeri yang mulai jatuh tempo, sementara idealisme serta kesadaran guru untuk selalu meningkatkan pengetahuan sebagai syarat mutlak suksesnya profesi keguruan kian habis digerus oleh pemenuhan kebutuhan hidup minimal maupun oleh gaya hidup konsumerisme.

Bercermin kepada negara-negara yang memiliki perekonomian yang cukup baik (padahal melakukan 'start pembangunan' dalam waktu yang tidak jauh berbeda dengan kita) maka didapat fakta bahwa rata-rata mereka menjadikan sektor pendidikan sebagai starting point atau titik berangkat dalam melakukan pembangunan. Malaysia, untuk dijadikan contoh, di tahun 70-an memiliki income perkapita yang relatif rendah dan tidak sedikit tokoh mudanya yang belajar di perguruan-perguruan tinggi Indonesia. Kemudian mereka (terutama para birokrat dan dibantu oleh para cendekiawannya) dengan serius membenahi sektor pendidikan setelah belajar banyak dari negeri ini, dan ternyata setelah 5-10 tahun *income* per kapita mereka melesat tinggi, bahkan jauh melebihi kita.

Tidaklah terlalu berlebihan jika kunci sukses negara kita pun sebenarnya ada di bidang pendidikan, tetapi jujur saja dengan kondisi (baca: kualitas) guru seperti sekarang ini nampaknya akan cukup sulit untuk meraih itu. Karena menghadapi tantangan globalisasi dibutuhkan strategi dan kesiapan yang tidak hanya meliputi aspek intelektual belaka. Etos kerja, sikap, kemampuan berkomunikasi serta hal lain yang lebih baik lagi, sementara data empiris menyebutkan bahwa para sarjana kita yang menjadi tenaga

kerja di luar negeri menduduki peringkat yang cukup memprihatinkan. Hal ini mengindikasikan mutu pendidikan kita memang masih jauh dari yang diharapkan.

Sudah cukup rasanya para guru menceritakan kesulitan ekonomi yang menghimpit diri dan keluarganya, baik kepada birokrat, wakilnya di legislatif melalui media massa maupun berunjuk rasa. Dan sudah saatnya para guru tidak menunggu kenaikan gaji untuk meningkatkan kualitas penguasaan teknologi, komunikasi global dan terus mengasah serta mempertahankan idealisme demi kemajuan bangsa di masa datang. Ada baiknya untuk terus berhemat dan kalau perlu memangkas keperluan yang sekunder agar bisa menyediakan biaya untuk peningkatan kualitas diri.

Sangkar yang selama ini terbentuk melalui proses perjalanan panjang kehidupan bangsa ini hendaknya tidak menjadikan para guru bersikap apatis, anti kritik dan anti perubahan. Biarkan para birokrat melakukan kekeliruan, alias menganggap guru ibarat burung beo yang cukup dipuji dengan nyanyian pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi bukan berarti guru harus terus 'membeo' dalam arti menerima nasib apa adanya. Kekurangan bidang ekonomi tidak menjadikan guru frustasi, tidak menjadi halangan untuk selalu belajar dan mengikuti/menguasai teknologi, untuk terus melakukan introspeksi serta melakukan peningkatan kemampuan pengajaran.

Perubahan status kepegawaian dari pusat ke daerah, tidak menjadikan independensi serta sikap kritis berkurang, terutama ketika menghadapi perilaku pejabat sekolah maupun dinas yang memanipulasi dana pendidikan (termasuk uang mutasi siswa yang katanya menjadi hak prerogatif kepala sekolah perlu diluruskan kebenarannya), menghadapi merebaknya kasus narkoba, perjudian, prostitusi, dan penyakit sosial lainnya.

Peran guru era *cyber space* sekarang ini tidak lagi dibatasi oleh ruang dan status, guru harus lebih mengembangkan wawasan keilmuan, bersikap inklusif, akomodatif terhadap perubahan

dengan tetap mempertahankan idealisme. Peran seperti itu memang membutuhkan pengorbanan waktu dan biaya yang tidak sedikit, agak sulit memang untuk mewujudkannya, apalagi dengan situasi ekonomi yang tidak stabil serta gaji yang hanya cukup untuk beli tahu. Tetapi memang untuk itulah guru diciptakan, harus selalu siap berada di garda terdepan dalam membangun masyarakat serta mampu menghadapi situasi yang paling buruk sekalipun. Dan tampaknya itulah satu-satunya gerbang sukses untuk memulai recovery jika mengharapkan negara ini berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Melangkahlah *Oemar Bakri!*

Eksekutif dan Legislatif Berseteru

Dramatis sekaligus ironis. Begitu kesan yang penulis tangkap dari pelaksanaan Forum Koordinasi dan Dialog Pembangunan (FKDP) yang digagas oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cirebon beberapa waktu lalu di sebuah hotel berbintang. Dramatis karena dalam acara tersebut hampir semua peserta mengetahui bagaimana "harmonis"nya hubungan eksekutif dan legislatif kota yang mempunyai maskot seekor udang yang menyimpan potensi mencerdaskan otak manusia.

Secara demonstratif dan sedikit arogan anggota legislatif memperlihatkan sikap tidak cerdas menolak untuk duduk semeja dengan walikota denagn alasan yang boleh dikatakan tidak masuk akal untuk sebuah institusi yang menjadi salah satu pilar demokrasi (yaang tentunya mempunyai sistem manajemen dimana koordinasi dan pendelegasinya tertata baik). Apa ada yang salah dengan hubungan keduanyan? Karena ternyata dalam sesi selanjutnya, yang membahas persoalan-persoalan krusial kemasyarakatan dan bisa menjadi masukan bagi pengambilan keputusan pembangunan justru tidak ada seorang pun wakil dari legislatif.

Kemudian lewat forum ini makin terlihat jelas keanehan fungsi lembaga demokrasi Kota Cirebon. Pihak legislatif yang seharusnya mengakomodasikan kepentingan rakyat justru malah menjegal dengan dalih demi tegaknya superrmasi hukum, dipatuhinya peraturan perundang-undangan dan menjaga kewibawaan pemerintah serta hal lainnya (yang semuanya dianggap "pepesan kosong" oleh rakyat kecil). Kasus penempatan pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kota Cirebon bisa dijadikan contoh. Jikadi kota-kota lain biasanya pihak eksekutif (walikota beseerta jajarannya) yang *nyinyir* dan selalu mempersoalkan

keberadaan PKL dengan mengusir, menggaruk, membubarkan mereka karena dianggap mengganggu keindahan kota, ternyata di Cirebon hustru terbalik. Walikota justru memfasilitasi keberadaan mereka dan pihak legislatif malah menabuh genderang perang kepada para PKL dan juga LSM yang mendukungnya. Ironis sekali!

Pertanyaan yang kemudian mengedepan adalah masih layakkah para anggita legislatif mengatsnamakan rakyat ketika memberikan statemen, baik yang langsung ketika berhadapan pihak eksekutif maupun lewat media massa untuk dikonsumsi publik selaku konstituennya. Apakah cukup dengan bekal legimitasi yang diraih dalam pemilu dua tahun lalu mereka berbuat arogan, serba benar, saenake dewek dan merasa apapun yang mereka putuskan pasti disetuji rakyat.

Terlampau gegabah untuk mengambil kesilmpulan seperti itu, terutama buat siapa saja yang masih mempunyai hati nurani serta meyakini bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Tidak layak bagi seorang wakil rakyat yang berstatus makhluk untuk berperilaku arogan karena arogansi adalah milik Sang Pencipta semesta.

FKDP yang merupakan kelanjutan dari aktifiktas forum masyarakat pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan bertujuan menggali dan atau membahas berbagai macam aspirasi ataupun permasalahan yang berkembang di masyarakat untuk dijadikan sebagai rencana pembangnan kota, terutama dalam menentukan daftar skala prioritas yang akan diimplementasikan pada tahun anggaran 2002 atau dijadikan agenda.

Prioritas dalam jangka menengah. Dengan pardigma bahwa pembangunan merupakan tanggungjawab bersama dan bukan monopoli pemerintah, maka forum ini mengundang semua elemen yang dianggap menjadi stake holder, mulai dari ketua komisi DPRD, dinas/instansi/I.SM, organisasi profesi, kalangan dunia usaha, tokoh masyarakat yang semuanya berjumlah kurang lebih 150 orang. Obsesinya dari penyelenggaraan acara ini adalah

terwujudanya pembangunan yang lebih aspiratif dan terlalu mengejar target tanpa memeperhatikan aspek-aspek yang lain dalam hal mencari alternatif solusi menghadapi persoalan-persoalan pembangunan sosial ekonomi yang beberapa di antaranya merupakan dampak dari pembangunan itu sendiri.

Pemecahan 44 permasalahan, dari mulai yang mikro teknis semisal pendapatan cukai rokok BaT yang tidak jelas sampai masalah makro-strategis semisal tenaga kerja pengangguran yang hingga bulan Juli 2002 mencapai 15.992 jiwa yang diinventarisir dan diidentifikasi oleh BAPPEDA pada peserta hanya diberi waktu 1 jam dalam suatu diskusi kelompok yang keanggotaannya telah ditentukan sebelumnya, ini jelas suatu proses yang mission impossible karena pembangunan dengan segala kompleksitasnya, hanya dibahas sekilas oleh beberapa orang. yang meskipun boleh dikatakan mempunyai kompetensi memadai tetapi dengan waktu yang sedemikian singkat, di samping itu dari sisi representasi juga dipertanyakan (peserta diskusi hanya tersisa sekitar 75 orang dengan komposisi yang tidak ideal seperti yang direncanakan sebelumnya). Meski demikian upaya pemerintahan kota untuk mencoba pola bottom up dengan melibatkan lebih lagi partisipasi semua komponen masyarakat berkaitan erat dengan perencanaan atau perencanaan kebijakan pembangunan patut diacungi jempol.

Adapun persoalan kurangnya respon dari para *stake holder* yang dianggap representasi dari entitas masing-masing atau tidak optimalnya hasil pertemuan, bisa dilihat dari dua sisi/kemungkinan: pertama, kelemahan teknis administrasi penyelenggara dalam hal sosialisasi FKDP serta hal-hal mendesak apa saja yang membutuhkan pemecahan kepada stakeholder non birokrat.

Undangan partisipasi kepada para akademisi ormas/LSM, organisasi profesi, kalangan dunia usaha tokoh masyarakat sebaiknya dilakukan beberapa minggu sebelum pelaksanaan dengan disertai draft yang berisi tentang persoalan-persoalan yang perlu dikaji sehingga mereka bisa mengadakan diskusi diantara anggota masing-masing.

Kedua, keengganan para birokrat untuk mengikuti FKDP bisa jadi dikarenakan mereka belum terbiasa untuk memperlakukan pembangunan sebagai sesuatu yang bisa dinegosiasikan dengan kalangan non birokrat. Pembangunan diasosiasikan atau identik dengan marak menemukan skala prioritas.

Kelemahan SDM

Isu kelemahan sumber daya manusia senantiasa menjadi isu yang aktual di negara-negara dunia ketiga apalagi Indonesia yang pernah mendapat predikat bangsa paling korup oleh sebuah lembaga internasional independen titik sehingga tidak terlalu salah jika isu sumber daya manusia ini pun menjadi salah satu sentra pembahasan/kajian yang mendapatkan porsi waktu yang cukup berlebih di samping isu tata ruang kota dan pengembangan dunia usaha.

Dalam kajian terungkap bahwa ditengarai ada tiga kelemahan yang sangat mengganggu kinerja pembangunan, pertama kelemahan bidang pendidikan, kedua bidang moralitas, dan ketiga bidang pengabdian/identifikasi titik dari observasi lapangan yang dilakukan FORKASI, sebuah lembaga yang *concern* terhadap persoalan-persoalan kerakyatan,ternyata kendala yang sangat menentukan bagi-bagi keberhasilan upaya pemberdayaan rakyat adalah sikap para birokrat yang tidakkondusif dan mendukung. Fakta ternyata kendala yang sangat menentukan bagi-bagi keberhasilan upaya pemberdayaan rakyat adalah sikap para birokrat yang tidak kondusif dan mendukung. kelemahan birokrat ini terletak pada sangat minimalnya kemampuan moralitas serta pengertian marka kepada tugas yang diembanny diterimanya dana pemberdayaan masyarakat pantai atau pesisir yang hanya Rp.2.750.000 dari jumlah yang seharusnya Rp.5.000.000 penambahan deretan panjang bukti tentang bagaimana buruknya sumber daya manusia yang bekerja di institusi eksekutif ini.

Tersendatnya program pemberdayaan masyarakat tidak hanya terkendala pada ketidakjujuran birokrat dalam penyaluran dana tetapi diyakini juga terletak pada tidak tepatnya pola

pendekatan yang digunakan titik superioritas jajaran eksekutif maupun legislatif yang berimplikasi para relasi subjek objek dalam proses pembangunan secara perlahan menumbuhkan inferioritas bahkan mungkin juga sikap apatis di kalangan masyarakat dalam menyikapi pembangunan yang manifestasikan pada pengangguran dana bantuan untuk kebutuhan non produktif mengembalikan pinjaman pemerintahan, dan perilaku-perilaku tidak komutatif lainnya dengan berlaku hanya sebagai fasilitator (mencari bantuan dari negara sahabat untuk lembaga keuangan internasional) dan dengan melibatkan masyarakat secara optimal, mulai dari tahapan pembuatan keputusan, aplikasi, pemanfaatan hingga evaluasinya merupakan langkah genial jika pemerintah kota Cirebon yang menjadi prioritas utama dalam rancangan pembangunannya sehingga kesan publik mengenal program pemberdayaan masyarakat miskin yang justru membuat masyarakat miskin menjadi semakin tidak berdaya akan hilang bahkan akan memunculkan simpati masyarakat (terutama dari kalangan *the have)* untuk memberikan bantuan dana sehingga pemerintah tidak perlu merunduk-runduk menghinakan diri di depan bangsa lain memohon pinjaman.

Dengan lokasi strategis serta potensi alamiah yang dimiliki tidak terlalu berlebihan jika kota Cirebon menjadi penopang dasar bagi keberhasilan pembangunan Jawa barat. Hal itu bisa terlihat pada rencana strategis Jawa barat yang secara ringkas dipaparkan oleh bab beda Jawa barat dengan pembangunan infrastruktur yang tampaknya mengarah kepada kian beragamnya/luas aksibilitas ke Cirebon.

Dengan pencanangan visi pembangunan Jawa barat dengan iman dan taqwa sebagai provinsi termaju di Indonesia dan mitra terdepan ibukota negara tahun 2010 dan misi pembangunan yang mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya daerah tampaknya obsesi pemerintah Jawa barat ini bukanlah sesuatu yang utopis. karena memang hanya melalui keimanan dan ketakwaan akan

terselenggara suatu pemerintahan bersih dan berwibawa yang merupakan persyaratan utama keberhasilan suatu pembangunan.

Keterkejutan mungkin akan muncul, terutama bagi mereka yang memperlihatkan detail kehidupan masyarakat Cirebon. juga memantau secara cermat bagaimana kalangan eksekutif legislatif menata kota dan sejauh mana mereka menangkap aspirasi warga kotanya. dengan visi Cirebon menjadi kota perdagangan dan jasa yang maju tahun 2005 maka adalah wajar jika segenap kebijakan diarahkan untuk mewujudkan visi tersebut titik ditambah lagi dengan misi mengembangkan pariwisata yang bertumpu pada nilai-nilai tradisi dan budaya Cirebon serta yang mampu mengakomodir tuntutan pertumbuhan dan perkembangan kota maka jangan terlalu dibuat heran apabila kelak bermunculan usaha jasa yang tidak selaras dengan nilai-nilai agama.

Tampaknya julukan kota wali dianggap tidak mempunyai nilai jual, bisa jadi julukan terlalu abstrak dan sulit untuk diterjemahkan dalam bentuk kebijakan yang lebih konkret, atau jangan-jangan julukan itu secara psikologis dianggap akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan upaya peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) kalau anggapan-anggapan tersebut benar maka tampaknya pemahaman tradisi keagamaan para pemutus kebijakan masih terlalu dangkal, bahwa agama hanya mengurusi persoalan-persoalan ritual bahwa agama tidak bisa memberikan solusi bagi kemajuan ekonomi suatu masyarakat

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan budaya bangsa, meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah kota yang menjadi misi kesatua dan kedua kota Cirebon. sebenarnya bertitik tekan pada persoalan moralitas/akhlak. pembenahan moral garis filing akhlak yang efektif adalah melalui agama, sementara konsep visi serta misi kota Cirebon benar-benar steril dari kata-kata yang berkaitan dengan idiom agama bandingkan dengan visi provinsi Jawa barat yang ada kata iman dan takwanya.

Budaya Kemiskinan dan Kemiskinan Budaya

Memahami kebudayaan kemiskinan atau budaya orang-orang miskin menjadi sangat penting terutama bagi tokoh informal masyarakat, birokrat sebagai pemutus kebijakan formal, bagi aktivis LSM yang bergerak di bidang pengentasan kemiskinan atau bagi semua warga negara negara yang seharusnya memahami bahwa kemiskinan merupakan realitas sosial yang (selalu ada disekitar mereka dan semestinya) harus dihadapi/ditanggulangi secara bijak bukan untuk dijauhi apalagi dimusuhi.

Kebudayaan kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian, dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualistis dan berciri kapitalisme (meski tidak diakui secara eksplisit oleh masyarakat itu sendiri). Kebudayaan tersebut mencerminkan suatu upaya mengatasi rasa putus asa dan tanpa harapan, yang merupakan manifestasi dari kesadaran bahwa mustahil dapat meraih sukses dalam kehidupan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan masyarakat yang lebih luas.

Oscar Lewis dalam buku "La Vida" memberikan beberapa ciri budaya orang-orang miskin, di antaranya: 1) Partisipasi dan integrasi kaum miskin dalam lembaga-lembaga utama masyarakat cenderung kurang efektif. Hal ini merupakan akibat dari berbagai faktor termasuk langkanya sumber-sumberdaya ekonomi, diskriminasi, kecurigaan dan apatis. Mereka umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, mempunyai sikap kritis terhadap beberapa pranata yang mendasar yang didominasi "kelas" yang berkuasa serta cenderung menentang ketentuan-ketentuan sosial yang ada.

2) Pada tingkat keluarga, ditandai oleh masa kanak-kanak yang singkat dan kurang pengasuhan orangtua dan cenderung cepat dewasa, kuatnya kecenderungan ke arah otoriterianisme, kurangnya hak-hak pribadi, penekanan pada bentuk solidaritas yang hanya dalam batas retorika tetapi jarang dilakukan dalam tindakan di antara kerabat karena keterbatasan barang-barang berharga.

3) Pada tingkat individu, kuatnya perasaan tak berharga, tak berdaya, ketergantungan dan rendah diri. Lemahnya struktur pribadi, kurangnya kendali diri dan dorongan-dorongan hawa nafsu, kuatnya orientasi masa kini serta kekurangsabaran dalam hal menunda keinginan dan rencana masa depan. Perasaan tidak berguna dan pasrah, meluasnya anggapan terhadap superioritas lelaki dan merajalelanya berbagai jenis penyakit kejiwaan.

Mereka yang berkebudayaan kemiskinan berorientasi pada kejadian-kejadian dalam batas-batas lokal dan tidak mempunyai kesadaran sejarah. Mereka hanya mengetahui kesulitan-kesulitan, kondisi setempat, lingkungan tetangga dan cara hidup mereka sendiri. Mereka tidak mempunyai pengetahuan, pandangan dan ideologi untuk melihat persamaan masalah-masalah yang mereka hadapi dengan yang dihadapi oleh golongan yang sama dengan mereka di daerah lainnya. Mereka tidak mempunyai kesadaran kelas meskipun sebenarnya sangat sensitif terhadap perbedaan-perbedaan status.

Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*, ADB) dalam suatu laporan terbarunya menyatakan bahwa Asia akan terbebas dari kemiskinan pada tahun 2025, itupun dengan catatan bahwa pemerintahan dimana terdapat kantung-kantung kemiskinan harus terus menerus berusaha menciptakan *clean government* yang merupakan syarat mutlak untuk keberhasilan pengentasan kemiskinan di suatu negara. Dalam bagian laporan lainnya, ADB mensinyalir bahwa kemiskinan yang muncul di negara-negara berkembang, terutama Asia, penyebabnya adalah buruknya kinerja para birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, akutnya

penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme (tanpa profesionalisme, karena nepotisme dengan tetap mengutamakan profesionalisme sebenarnya masih bisa ditolerir) yang mengurat daging di setiap detil dan hampir semua profesi ekonomi dalam kehidupan masyarakat, sehingga meminimalisir bahkan menghilangkan sama sekali peluang rakyat kecil untuk berusaha.

Orang-orang miskin baru mengadakan adaptasi dengan kondisi sosial ekonomi yang dihadapinya sehingga memunculkan budaya kemiskinan yang telah disebutkan di atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya kemiskinan disebabkan dari perilaku kelompok masyarkat yang mempunyai kemiskinan budaya. Jika budaya kemiskinan timbul dari kalangan marginal, baik secara ekonomi maupun poitis, maka kemiskinan budaya bisa saja timbul/muncul dari kelompok ini.

Kelompok yang memiliki kemiskinan budaya (tidak mempunyai etika moral layaknya manusia yang mempunyai kecenderungan untuk berbuat baik) ini bisa terdiri dari "kapitalis birokat" maupum "kapitalis borjouis" (meminjam istilah PKI, dulu) atau bahkan dari tokoh masyarakat yang memiliki ideologi marxis (meski tidak mengkuinya secara terang-terangan), menghalalkan segala cara demi kemakmuran diri dengan mengorbankan orang lain.

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan suatu upaya pengentasan kemiskinan yang mulai berjalan pelaksanaannya di Kota Cirebon. Berbeda dengan JPS yang sifatnya konsumtif dan dalam bentuk hibah/bantuan murni, maka proyek ini lebih diarahkan pada pengentasan kelompok miskin dari keterpurukan ekonomi dan bersifat/pinjaman modal. Artinya seseorang setelah melakukan program ini selama beberapa waktu (pinjaman dikembalikan berangsur, setelah lunas kemudian pinjam lagi) dapat bangkit dari kemiskinan yang melilitnya.

Kendala dari pihak calon penerima adalah asumsi yang telah disebutkan diatas bahwa ciri/kebudayaan kemiskinan masyarakat dimana ia tinggal telah membentuknya menjadi orang

yang mempunyai struktur pribadi yang lemah, kurang bisa mengendalikan bahwa nafsu dan kesabaran dalam menahan diri. Dan dalam realitasnya bantuan proyek P2KP ini dibelokkan kepada pemenuhan kebutuan konsumtif (membeli TV misalnya) bukan untuk keperluan berusaha yang menghasilkan profit. Di samping karena memang pengaruh budaya, ada asumsi bahwa bantuan yang diterimanya merupakan hibah/bantuan murni yang kalau tidak perlu dikembaikan (kalau memang tidak mampu) tanpa ada sangsi hukum, mengingat banyak kasus yang beredar di masyarakat tentang permainan hukum bagi pidana korupsi yang tidak pernah tuntas.

Gerdu Taskin Gagasan mutakhir yang sekarang berkembang adalah munculnya program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) yang beberapa bulan terakhir terus digodok dalam simposium, seminar atau pertemuan-pertemuan informal lain di kalangan birokrat maupun akademisi. Mengambil pengalaman program-program terdahulu memang sebaiknya pemerintah tidak terburu-buru menggulirkan suatu program apalagi tidak mengindahkan masukan dari berbagai kelompok lainnya di masyarakat karena kemiskinan bukan semata-mata masalah ekonomi tetapi merupakan masalah multi dimensional yang penanganannya harus lebih komperensif. Dan dalam realitas sosial menunjukkan bahwa hambatan-hambatan utama bagi pengentasan kemiskinan bersarang dalam struktur ekonomi, politik dan sosial yang beroperasi untuk melindungi serta meningkatkan harta kekayaan mereka, yang memang sudah termasuk golongan orang kaya.

Pengentasan kemiskinan idealnya memang harus melibatkan berbagai komponen dalam masyarakat (tidak hanya pemerintah semata), dan mengacu pada program-program yang telah berjalan maka konsep/kebijakan programnya sebaiknya tidak melulu harus dari pemerintah yang cenderung lebih kental politisnya (dan kadang justru malah menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pengentasan), tetapi peran pemerintah lebih

diarahkan pada peran fasilitator belaka, sementara pengentasan dilakukan oleh masyarakat (tentunya dengan tetap dengan pengawasan yang memadai), baik dari kalangan akademisi, tokoh spiritual atau tokoh masyarakat lainnya

Ide atau masukan ini perlu dipikir serta direspon secara bijaksana karena selama ini pemerintah berlaku seolah-olah setiap kebijakan yang ditelorkannya pasti baik, setiap langkah yang diambilnya nyaris tanpa cacat, termsuk dalam penanggulangan kemiskinan.

Masyarakat lebih tahu akan apa dan bagaimana kebutuhan mereka termasuk cara-cara pemenuhannya sehingga konsep *bottom up* lebih rasional dibanding *top down*, sehingga implementasi program lebih realistis dan tepat sasaran.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah lebih bersifat persuasif dan dengan tetap mendahulukan kepentingan masyarakat miskin dibanding kepentingan politis, lebih bersifat kemitraan dibanding sebagai penguasa. Pemerintah hanya berperan sebagai penyandang dana, dan itupun tidak harus melibatkan beberapa departemen dalam pengalokasian/pengucuran dana pengentasannya yang mengakibatkan lambannya proses pencairan dan membengkaknya biaya operasional.

Dan satu hal yang penting dan menentukan dalam keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah kampanye dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa kemiskinan hanya akan bisa ditanggulangi oleh semua komponen masyarakat dengan di dukung pemerintah, bahwa membiarkan atau tidak memperdulikan kemiskinan (apalagi menghinanya) merupakan suatu dosa, baik ditinjau dari sudut agama maupun kehidupan sosial. Dan kampanye ini akan efektif jika pemerintah menganggap bahwa kemiskinan adalah luka yang perlu disembuhkan dengan obat yang tepat dan penuh kesabaran bukan merupakan borok yang menjijikan bagi pemerintahannya yang harus diamputasi atau dijadikan komoditas politik atau kepentingan ekonomi lainnya (dengan menjual program

pengentasan ini kepaada IMF).

Kemiskinan tidak hanya diperlakukan sebagai angka-angka statistik dan dijadikan komoditas politik oleh sebagian kelompok. Dan orang miskin adalah korban dari keberadaan sistem kapitalistik semu yang dipraktikan sekarang serta minimnya kepedulian para orang kaya yang berada disekelilingnya.

Ekonomi yang Adil Berkesejahteraan

Amanat *founding father*s di bidang ekonomi sangat menekankan pada keadilan yang berkesejahteraan dengan "negara berhak atas bumi Indonesia dan memanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat" sangat mencirikan hal tersebut. Kemudian untuk keadilan juga tidak ada/diperkenankan adanya akumulasi kekayaan yang berputar hanya dalam satu kelompok sehingga muncul UU perpajakan yang mengantisipasi hal tersebut. Jika suatu kelompok usaha memperoleh laba bersih Rp10.000.000.000,00 wajib memberikan (15% nya) Rp.1.500.000.000,00 untuk kesejahteraan rakyat melalui institusi pajak.

Kelemahan sistem perpajakan (atau mungkin sumberdaya manusia yang terlibat dalam pemungutan pajak) memperburuk kondisi perekonomian rakyat. Jumlah pajak penghasilan dari sektor pengusaha yang di negara menjadi primadona sumber pemasukan negara ternyata tidak di negara kita. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penggelapan pajak yang terjadi selama setahun mungkin bisa menutup biaya APBN.

Sudah waktunya pembangunan ekonomi berpihak rakyat banyak bukan pada sekelompok rakyat, Dengan dikomandani seorang yang dari dulu komitmen dengan pengusaha kecil dan juga mantan anggota LSM yang sedikit banyak mengetahui kondisi rakyat kecil maka ekonomi kita dan sektor ini akan lebih baik"

Ketika persoalan ekonomi mengemuka maka suatu masyarakat yang kental dengan warna religius serta ramah berubah menjadi masyarakat yang mudah terbakar dengan sedikit kericuhan antar individu yang bisa dikatakan sepele. Masyarakat yang semula santun berubah menjadi beringas melibas semua norma agama dan norma sosial yang selama ini dipegang teguh.

Perihal amuk masa yang melanda bangsa kita bisa dipahami dalam konteks manusia terdiri dari jasmani dan rohani dan berkecenderungan melindungi anak keturunannya. Jika kebutuhan rohani bisa dilakukan secara perlahan maka tidak demikian halnya dengan jasmani, memerlukan makanan dalam hitungan jam. Jika seorang pria dewasa (suami) sanggup bertahan tidak makan, maka buat anak-anaknya pasti menjadi persoalan yang sangat serius. Dalam kondisi tensi ekonomi tinggi, di mana mayoritas penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang minim sekalipun, maka kerusuhan akan timbul di mana-mana tanpa memperdulikan dampak buruk bagi generasi mendatang.

Sebenarnya masyarakat kita mempunyai tingkat toleransi yang luar biasa mencengangkan dibanding masyarakat di negara lain. Ketika sebagian besar hak-hak yang sangat asasinya (hak kebebasan berpendapat, politik dan lainnya) dikebiri rezim terdahulu mereka pasrah saja, *nrimo* tanpa *reserve*. Tapi itulah persoalannya lapar tidak bisa menunggu tidak ada toleransi jika berhubungan dengan perut. Sehingga siapapun yang akan memimpin bangsa ini, kabinet reformasi maupun kabinet pasca Pemilu 7 Juni 1999 jika mau mendapatkan dukungan dari rakyat harus benar-benar serius menggarap bidang ini sesuai dengan yang diamanatkan para pendiri republik ini yang tersurat dalam pasal 33 UUD 1945.

Tidak diimplementasikan

Konsepsi dasar ekonomi yang diletakkan 53 tahun lalu ternyata tidak diimplementasikan secara konsekuen oleh rezim orde baru, sehingga mengakibatkan ambruknya perekonomian Indonesia sekarang ini. Direstuinya praktek monopoli, oligopoli menyebabkan kesejahteraan ekonomi hanya berputar pada satu kelompok masyarakat.

Dengan dalih kepentingan negara, sumber-sumber alam dieksplorasi secara semena-mena (bekerja sama dengan perusahaan asing) dan pembagian keuntungan yang sangat tidak rasional

mengiringi hampir semua proyek pengeksplorasian sumber alam yang *notabene* milik rakyat (rata-rata penduduk asli tempat proyek tersebut memperoleh 2% seperti dilansir oleh media massa dan dalam realitas entah buat apa dan kemana uangnya).

Kelemahan sistem perpajakan (atau mungkin sumber daya manusia yang terlibat dalam pemungutan pajak) memperburuk kondisi perekonomian rakyat. Jumlah pajak penghasilan dari sektor pengusaha yang di banyak negara menjadi Primadona sumber pemasukan negara ternyata tidak di negara kita. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penggelapan pajak yang terjadi selama setahun mungkin bisa menutupi biaya APBN.

Kondisi ini diperburuk lagi dengan pengusaha bidang perbankan yang meloloskan proposal pengajuan kredit suatu perusahaan padahal proposal ini tidak *feasible* atas perusahaan pengaju itu merupakan anak cabang bank yang bersangkutan. Macetnya kredit bernilai ratusan triliun rupiah cukup dengan dihapusbukukan, dan ketika giliran bank-bank tersebut dilikudasi maka menutupi simpanan-simpanan nasabah (seperti biasa) pinjam ke IMF atau lembaga keuangan internasional lain. Lagi-lagi rakyat juga yang menanggung hutang dan beban bunganya (yang hampir menyamai akumulasi hutangnya).

Koperasi pengusaha kecil dan menengah

Kalau saja *decision makers* bidang ekonomi rezim terdahulu jujur, jika pengusaha sektor informal plus koperasi diberi kesempatan dan peluang untuk bersaing dengan pengusaha lainnya dengan memberikan kredit yang sewajarnya maka kondisi ekonomi tidak seburuk ini. Terbukti ketika sejumlah usaha besar berjatuhan dalam hitungan puluh bahkan ratus, maka sektor informal relatif lebih eksis di sela krisis yang hampir melanda hampir semua negara seperti sekarang ini.

Langkah maju kabinet reformasi bisa kita acungi jempol karena terlihat kebijakan ekonomi kerakyatan yang diterapkan mendekati semangat keadilan ekonomi berkesejahteraan yang

dicanangkan para *founding father*. Keberpihakan ekonomi kepada rakyat banyak bukan sekelompok kecil rakyat, sangat kuat. Skim kredit dalam berbagai bentuk ditujukan kepada koperasi dan pengusaha kecil yang memang menjadi komunitas mayoritas di republik ini.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat masih sangat sesuai dengan masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi kebersamaan/kegotongroyongan dalam menghadapi masalah. Hanya supaya koperasi bisa berfungsi maksimal serta dari beberapa kejadian selama Orde Baru perlu dibenahi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, kelemahan sumber daya manusia. Ini berlaku untuk pengurus, pegawai (Manajer) serta anggota koperasi umumnya. Rata-rata Para pengurus koperasi bukan dari kalangan profesional atau bukan dari orang yang mempunyai wawasan usaha yang memadai. Juga para manajernya (jarang ada koperasi yang mempunyai manajer dari lulusan IKOPIN atau seorang pemegang MBA). Kemudian kesadaran para anggota koperasi yang belum mempunyai pengetahuan perkoperasian yang mengakibatkan para pengurus/manajer tidak terpacu untuk memajukan usahanya (bahkan tidak mengetahui kalau modal koperasi di korupsi oleh pengurusnya seperti yang terakhir terjadi di Ujung Pandang yang mencapai ratusan miliar rupiah)

Kedua, diversifikasi usaha. Pada umumnya bidang usaha koperasi masih berkutat pada usaha peminjaman konsumtif para anggota (kalaupun ada yang produktif relatif sedikit), dan pemenuhan kebutuhan barang konsumtif untuk kebutuhan anggotanya (itupun dengan harga yang relatif lebih mahal dari toko yang bukan koperasi). Padahal banyak sekali garapan usaha bisa dilakukan oleh koperasi, apalagi setelah munculnya UU No. 24 1994 yang menyebutkan koperasi menjadi lembaga ekonomi yang benar-benar berorientasi profit yang watak sosialnya ditunjukkan dengan keanggotaan keanggotaan koperasi yang *egaliter* dan kontribusi pembagian SHU bagi lingkungan dimana tempat beradanya koperasi.

Ketiga, kelemahan permodalan. Jika sebuah lembaga ekonomi semisal CV atau Firma akan mengadakan ekspansi, maka laba yang diperoleh pada suatu periode bisa digunakan sepenuhnya untuk membiayai ekspansi tersebut, tapi koperasi yang terikat perundang-undangan dan juga dimiliki oleh banyak anggota (yang masing-masing anggota mempunyai hak suara yang sama) akan cukup kesulitan untuk membiayai ekspansi dengan dibiayai sepenuhnya dari laba yang diperolehnya.

Keempat, Inferioritas. Rasa rendah diri diidap oleh koperasi karena nasibnya selama ini dianggap sebagai benalu oleh lembaga ekonomi lainnya. Adanya pertemuan Jimbaran di mana seorang presiden mendesak pengusaha pengusaha besar untuk memberikan 2% keuntungan bersihnya untuk koperasi menjadikan koperasi dianggap sebagai lembaga ekonomi kacangan. Sehingga tidak heran jika sarjana ekonomi atau manajemen enggan menjadi manajer sebuah koperasi (di samping honornya tidak menggiurkan)

Harapan yang Berkunjung

Beberapa hari setelah pelantikannya, Habibie menegaskan sudah waktunya kita tidak terlalu membesarkan kue pembangunan dengan mengabaikan pemerataan pembagian kuenya. Sudah waktunya pembangunan ekonomi berpihak rakyat banyak bukan pada sekelompok rakyat. Dengan dikomandani seorang yang dari dulu komitmen dengan pengusaha kecil dan juga mantan anggota LSM yang sedikit banyak mengetahui kondisi rakyat kecil maka ekonomi kita dari sektor ini akan lebih baik.

Hanya untuk keberhasilan ekonomi umumnya maka perlu adanya faktor pendukung yang ikut juga menentukan, dan ini barangkali juga menjadi pekerjaan pertama dan utama bagi pemerintahan pasca Pemilu 7 Juni:

Pertama, lembaga yudikatif yang *qualified*, mendahulukan kepentingan rakyat dari kepentingan lainnya, mendahulukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan (kalau perlu sering

menggunakan hak amandemennya demi untuk membela kepentingan rakyat).

Kedua, aparat birokrasi yang bersih, dimulai dari Presiden sebagai orang pertama Indonesia Yang menjadi panutan rakyatnya dan juga aparat pembantu-pembantunya hingga tingkat Kelurahan.

Ketiga, sanksi yang berat bagi pelaku penyelewengan uang rakyat. Banyaknya pelanggaran korupsi yang dilakukan diantaranya diduga karena hukuman yang sangat ringan. Banyaknya penyelewengan dana JPS, kredit petani dan lain-lain sebagai indikasinya. Di beberapa negara yang menerapkan hukuman kepada terdakwa dengan sangat berat cenderung menurunkan praktek-praktek kejahatan.

Keempat IKOPIN (Institus Koperasi Indonesia) sebagai institusi ilmiah tempat candradimukanya calon manajer koperasi harus terus memberikan dorongan moral akan pentingnya kemajuan koperasi bagi kemajuan ekonomi Indonesia dan terus mengadakan penelitian-penelitian dalam rangka pengembangan koperasi. dan, *Kelima* pemulihan sektor perbankan umumnya.

Memang bukan pekerjaan gampang. Tapi dengan usaha keras dan sambil tetap bermohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semuanya bisa dapat terwujudkan.

Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan pendapatan

Salah satu kelebihan bangsa Indonesia dibanding negara lain adalah dalam hal kemampuan membuat atau menciptakan retorika, slogan atau hal-hal lain yang kesemuanya masih berada dalam tataran konsep, idealisasi ide, konsep yang dimiliki bertebaran pada hampir semua bidang kehidupan, baik bidang sosial, ekonomi, ideologi, politik, maupun hankam. Dari mulai GHBP (Gerakan Hidup Ber-Pancasila), GDN (Gerakan Disiplin Nasional) sampai gerakan-gerakan lain-nya.

Jika diteliti sebagian besar konsep yang ada ternyata menyamai atau bahkan mengunggguli konsep-konsep yang dimiliki negara lain. Sistem ekonomi misalnya, dunia umumnya mengenal sistem kapitalisme yang menekankan pada kebebasan setiap individu untuk menguasai sumber-sumber produksi dan sistem sosialisme yang menekankan pada monopoli pemerintah dalam kegiatan ekonominya. Indonesia mengadopsi sistem keduanya dan menelorkan konsep ekonomi Pancasila yang tertuang pada pasal 33 UUD 1945.

Setelah merdeka lebih dari setengah abad dan mengalami beberapa pergantian penguasa, terlihat bahwa dalam tataran praktis, baik dalam mengambil kebijakan maupun dalam implementasinya terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan bisa jadi diakibatkan dari keterbatasan kemampuan para cendekiawan (yang masuk dalam sistem kekuasaan) dalam menangkap pesan/konsep yang ada, kepentingan penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya atau kepentingan ekonomis politis segelintir kelompok. Pembangunan ekonomi Indonesia selama tiga dasawarsa terakhir (era orde baru) bisa dijadikan sebagai contoh.

Para ekonom Kelompok Barkley yang menjadi *thing tank* bidang ekonomi ketika meletakkan kebijakan dasar ekonomi pembangunan Indonesia dihadapkan pada persoalan klasik yang

juga dihadapi oleh ekonomi negara berkembang lain, yakni mendahulukan pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan pendapatan atau sebaliknya. Pilihan ini sangat dilematis karena setiap pilihan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dan setiap pengambilan alternatif pilihan akan berdampak kontradiktif bagi pilihan lainnya, artinya jika mendahulukan pertumbuhan ekonomi maka dipastikan sedikit banyak akan mengabaikan pemerataan.

Dan bukan merupakan keanehan jika kelompok ini mendahulukan pertumbuhan ekonomi dibanding pemerataan melihat latar belakang kota (negara) di mana mereka memperoleh pendidikannya, di samping literatur-literatur ekonomi (baik makro maupun mikro) didominasi oleh contoh-contoh negara-negara maju yang tentunya menekankan pada pertumbuhan ekonomi (dengan asumsi makin tinggi pendapatan nasional maka makin baik tingkat ekonomi negara tanpa melihat sejauh mana tingkat penyebaran pendapatan tersebut di kalangan masyarakat).

Hal lainnya adalah strategi pembangunan ekonomi dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi mudah dalam pelaksanaan dan juga tidak sulit untuk mengukur keberhasilannya, karena pertumbuhan biasanya berkaitan dengan modernisasi, teknologi dan alat padat modal. Dan kesemuanya bisa diperoleh dengan cara alih teknologi dan meminjam modal dari negara-negara maju atau lembaga keuangan internasional.

Kebaikan dan keburukan peranan teknologi dan alat modal modern menyebabkan hasil produksi mempunyai tingkat kualitas dan kuantitas yang melimpah serta kompetitif di pasaran internasional (dengan demikian cadangan devisa bisa meningkat), otomatisasi dan komputerisasi menyebabkan timbulnya bidang-bidang usaha baru sehingga kesempatan kerja semakin bertambah, produk nasional akan terus meningkat bukan saja dalam jumlah tetapi juga dalam jenis dan kualitas barang yang diproduksinya. Hal ini tentunya berdampak pada peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita penduduk, struktur ekonomi yang semakin variatif serta peningkatan prestasi kerja dan produktivitas produksi. Kebaikan pembangunan ekonomi dengan menekankan pertumbuhan ekonomi di atas akan menghadapi risiko yang sangat

besar jika dalam pelaksanaannya mengalami kegagalan, diantaranya:

Pertama, untuk dapat mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, diperlukan dana yang tidak sedikit, dan satu-satunya cara adalah dengan berhutang kepada negara lain, sehingga jika konsep ini gagal maka negara akan terlibat hutang (saat ini Indonesia merupakan negara yang memiliki hutang ketiga terbesar di dunia).

Kedua, ketergantungan negara debitor kepada negara/lembaga donor mendiktekan kemauannya. (Kasus IMF yang dengan arogansinya lewat *letter of intens*, atau kasus ekspor tekstil ke Amerika dapat dijadikan contoh bidang ekonomi yang transparan. Belum lagi dalam hal persoalan politis dan hal lain yang dapat diketahui oleh para elit).atau kasus ekspor tekstil ke Amerika dapat dijadikan contoh bidang ekonomi yang transparan. Belum lagi dalam hal persoalan politis dan hal lain yang dapat diketahui oleh para elit).

Ketiga, pertumbuhan ekonomi suatu negara yang diukur dengan besarnya GROSS NATIONAL PRODUCT (GNP) belum menggambarkan pemerataan pendapatan masing masing warga negara karena kenaikan mungkin hanya untuk sekelompok kecil warga saja (di antaranya para penguasa yang mendapatkan monopoli usaha karena kedekatannya kepada penguasa atau para pejabat yang ada di "daerah basah"), sehingga bisa dikatakan bahwa peningkatan GNP tidak secara otomatis menggambarkan peningkatan taraf hidup rakyat.

Dan keempat, munculnya kesenjangan antara desa dan kota, dan daerah yang mendapat posisi sebagai pusat pertumbuhan yang meninggalkan daerah-daerah lain yang tidak bernasib seperti itu.

Idealisasi pembangunan pembangunan ekonomi, meski merupakan syarat pokok, tapi bukan merupakan satu-satunya indikasi keberhasilan pembangunan suatu negara. Karena hakikat pembangunan mencakup paling tidak tiga hal pokok yakni kemudahan dalam memperoleh kebutuhan hidup, dihargainya martabat harga diri dan kebebasan yang menggambarkan tujuan-tujuan umum yang diusahakan oleh semua individu dalam masyarakat.

Artinya bukan suatu hal yang bijak jika dalam pencapaian pembangunan ekonomi mengorbankan aspek-aspek lainnya. Jadi pembangunan merupakan proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah melembaga, dan lembaga-lembaga nasional termasuk dalam akselerasi pembangunan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro P Michael, dalam *Economic Development In The Third World*). Pembangunan adalah merupakan proses yang melibatkan secara aktif semua individu/kelompok yang ada di suatu negara, bukan monopoli segelintir penguasa atau pemerintah semata.

Ketidakberhasilan -untuk tidak mengatakan gagal sama sekali- pembangunan ekonomi yang dialami oleh rezim orde baru lebih banyak diakibatkan oleh faktor-faktor di luar ekonomi. Terlalu lamanya rezim ini berkuasa dan tidak adanya mekanisme kontrol yang efektif, praktek-praktek korupsi kolusi nepotisme yang hampir melekat pada semua jajaran birokrasi dari setiap tingkat menjadikan pembangunan tidak sesuai dengan konsep yang dibangun.

Peningkatan produksi dari segi kualitas karena penggunaan alat-alat modern menghadapi kendala dalam hal *market* di pasaran internasional, karena *Cost Product* telah ditambah dengan "biaya-biaya siluman" yang dikutip oleh hampir setiap jajaran birokrasi yang terlibat dalam sistem ekspor, sehingga daya saing produk nasional, terutama dalam hal harga di pasaran internasional menjadi lemah.

Pemerataan pendapatan pun bukan tidak diupayakan dalam pembangunan ekonomi, terbukti dengan dipungutnya pajak penghasilan dari para pengusaha kaya maupun subsidi yang diberikan kepada para petani misalnya, atau subsidi BBM, listrik dan keperluan publik lainnya. Tetapi semuanya ternyata dimanipulasi orang-orang yang sebenarnya mempunyai tingkat ekonomi serta pendidikan tinggi lebih atau kelemahan sistem yang diterapkan dalam upaya pemerataan tersebut. Pajak, yang di negara-negara lain merupakan sumber utama pemasukan negara bagi pembangunan masyarakat ternyata tidak di negara kita (ternyata para orang kaya kita bukanlah orang-orang bijak,

melainkan mayoritas dari kalangan bajak alias perampok, sesuai dengan "orang bijak taat pajak" maka istilah pembajak cocok untuk orang yang tidak membayar pajak yang merupakan hak rakyat).

Pemerataan keadilan pembangunan ekonomi kabinet reformasi yang dikomandani oleh Habibie, meski merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dalam implementasi programnya telah menitikberatkan pada pemerataan pendapatan sebagai *counter* dari strategi, pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Perhatian pemerintah transisi kepada rakyat kecil yang termarginalisasi, terutama keberadaan program jaringan pengaman sosial (JPS) yang menyentuh hampir aspek kehidupan sosial ekonomi bahkan pendidikan.

Keberpihakan terhadap kelompok pengusaha kecil dan menengah (termasuk koperasi) sangat nyata, sehingga sampai-sampai ada kesan pemerintahan ini 'meninggalkan' pengusaha besar (atau lebih tepatnya dibesarkan oleh pemerintahan sebelumnya). Keberhasilan Habibie dalam meletakkan demokratisasi baik di bidang politik maupun ekonomi ternyata tidak diimbangi oleh para birokrat bawahannya, terutama di tingkat departemen. Praktek-praktek KKN masih tetap membayangi (mencemari) kerja pemerintahan yang disebut-sebut paling demokratis sepanjang usia republik ini.

Kabinet persatuan nasional yang lahir dari hiruk pikuk euphoria politik yang terjadi di hampir seluruh pelosok negeri, dan juga hasil tawar-menawar antarberbagai kekuatan politik ini dalam kebijakan ekonominya tampak mengikuti jejak pemerintahan sebelumnya, yakni menekankan pada pemerataan pendapatan. Peletakan dasar ekonomi yang memenangkan pemerataan pendapatan telah dirancang sedemikian rupa- paling tidak pada tingkat perundungan-perundungan oleh pemerintahan Habibie, sehingga tugas kabinet yang dipimpin presiden paling lucu tetapi cerdas ini relatif lebih mudah. Kendala yang dihadapi justru ada pada para pembantunya, terutama bidang ekonomi dan keuangan.

Apapun persoalannya (apalagi pemilihan menteri atau pembantunya memang hak prerogatif presiden sehingga sebaiknya mediamassa tidak usah repot-repot mengurusi hal ini), diharapkan jangan sampai mengganggu kinerja pemerintahan ini dalam:

a. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat umum, seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.
b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, termasuk menambah dan mempertinggi penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang menandai, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan.
c. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang atau negara-negara lain tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan manusia.

Imlek, Penguasa dan Wong cilik

Tidak perlu heran jika seorang Tionghoa pemilik toko kelontong di Jalan Pekiringan yang beromzet miliaran rupiah kerap mengucap kata *Alhamdulillah, Insya Allah* atau idiom-idiom Islam lainnya saat berinteraksi dengan para pelanggan, tukang becak atau para karyawannya. Fenomena ini hampir ditemui pada hampir setiap entitas bisnis yang dimiliki etnis Tionghoa di jalanan Kota Cirebon.

Interaksi yang intens dan berlangsung dalam hitungan puluhan tahun menjadikan perbedaan etnis,ras,suku,bahasa dan agama di antara penjual dan pembeli serta jasa layanan lainnya, alih-alih menciptakan jarak, malah justru terjadi akulturasi budaya dan harmonis. Para pelanggan yang rata-rata muslim tidak canggung ketika mendengar istilah-istilah Tionghoa yang kadang menyelip diantara percakapan bisnis dan sebaliknya pemilik toko menghormati ucapan pelanggan yang kental dengan ungkapan reliji semua mengalir alamiah tanpa paksaan apalagi Intimidasi dari kedua belah pihak

Obsesi Pengurus Pangayuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Cirebon, D.Suryapranata saat merayakan Tahun Baru Imlek 2555 di Vihara Dewi Welas Asih untuk membangun ke bersamaan,cinta kasih,bersatu atas nama Indonesia untuk level Cirebon sebenarnya bukan barang baru. Tanpa basa-basi atau anjuran dari pihak penguasa melalui Kesbang(dulu Sospol, hubungan antar Etnis Tionghoa dengan masyarakat lainnya telah terjalin harmonis,bahkan telah terjadi asimilasi(perkawinan antara etnis)meski dalam skala yang tidak terlalu sugnifikan serta luput dari sorotan media massa.

Terjalinnya harmonisasi antara etnis Tionghoayang minoritas dengan etnis lainnya di Kota Cirebon tak lepas dari karakter dasar kosmopolit yang dimiliki warga kota dalam menyikapi perbedaan. Bahwa semua manusia merupakan makhluk

Tuhan yang bertugas memakmurkan bumi bahwa semua semua manusia terlepas darimana dia berasal mempunyai hak untuk hidup dan mengembangkan kehidupannya di muka bumi ini. Adapun tentang keyakinan agama diserahkan kepada pribadinya masing-masing dengan melandaskan pada konsep *"lakum dinukum waliyadin"* (Qur'an Surat Alkafirun).

Sikap *welcome* yang ditunjukan etnis mayoritas (non Tionghoa) terhadap etnis Tionghoa (atau etnis minoritas lainnya) secara faktual terlihat dengan perkembangan yang begitu pesat kehidupan etnis Tionghoa di kota Cirebon ini, terutama dibidang ekonomi. Ditahun 70-an etnis Tionghoa ini hanya terkonsentrasi di jalan protokol pusat kota Cirebon dan bisnis mereka yang terkenal adalah tembakau. Karena keuletan, kegigihan dan kepiawaian mereka dalam berbisnis, dua puluh tahun kemudian tidak ada satu pun bisnis dengan prospek yang minimal dikota ini yang tidak dirambah mereka. Bahkan tidak ada pintu masuk wilayah kota Cirebon yang sepi eksistensi ekonomi pertokoan etnis Tionghoa. Sebut saja pintu masuk kota dari arah utara (Tangkil) berjajar tokoh kelontong, dari arah barat (Tuparev) berbaris toko otomotif, dari arah selatan (Kanggraksan) terdapat deretan toko besi, dari arah timur (Mundu) berdiri kokoh pabrik-pabrik . Selama kurun waktu tersebut nyaris tidak ada gejolak atau konflik etnis yang mengganggu aktifitas ekonomi. Etnis mayoritas tidak pernah merasa "gerah" dengan keberadaan dan kiprah minoritas. Etnis Tionghoa yang dengan tenang dan damai membangun imperium ekonominya yang luar biasa itu.

Memasuki era informasi, meski tanpa penelitian akademik bisa dikatakan bahwa andil etnis Tionghoa di bidang perekonomian kota Cirebon sangatlah besar. Penguasaan etnis Tionghoa terhadap aset ekonomi kota ini boleh dikatakan mayoritas. Eksistensi budaya (dan agama) etnis Tionghoa mulai dihargai oleh penguasa/pemerintah. Tanpa perasaan bersalah, mereka menganjurkan agar pribumi lebih menghargai kebudayaan etnis Tionghoa dan tidak mempersoalkan SARA. Padahal selama hampir tiga dekade justru pemerintahlah yang memarjinalisasi etnis Tionghoa dengan menjadikan isu SARA sebagai komoditas politik dalam rangka hegemoni dan pelanggengan kekuasaan.

Diakui atau tidak, realitas sosial ekonomi Kota Cirebon beberapa tahun terakhir berkembang dalam situasi yang tidak seimbang, sempoyongan dan hampir *klenger*. Terutama jika ditinjau dari kehidupan mayoritas penduduk yang berpredikat *wong cilik*. Predikat kota dan ekonomi daerah terbaik yang diberikan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) sepertinya ditunjukan kepada para pembisnis di tingkat menengah ke atas, bukan untuk para pembisnis dengan modal dan kepastian pas-pasan yang dilakoni oleh wong cilik.

Iklim usaha yang kondusif memang terlihat nyata di kawasan kota, sehingga tidak heran jika Kota Cirebon menjadi kota satelit bagi daerah sekitarnya. Menjadi tempat ekspensi para kapitalis untuk menangguk rupiah, menjadi tumpuan harapan bagi rakyat kecil yang memiliki modal kecil atau masyarakat luar Kota Cirebon yang gagal panen/tidak punya tanah untuk digarap untuk mencoba mengais rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya.

Tak pelak, *Darwinisme* ekonomi pun terjadi, dimana wong cilik dengan modal dan skala usaha kecil berhadapan dengan kaum kapitalis pemilik modal besar untuk mempertahankan eksistensinya masing-masing. Sayangnya pemerintah kota dalam kedudukannnya sebagai fasilitator/wasit dalam pertarungan kedua kubu,yang bisa diibaratkan layaknya pertarungan ‘’David and Goliath’’ tidak mempunyai kualitas memadai dalam membaca pertarungan yang tidak seimbang tersebut. Sebagai fasilitator selayaknya pemerintah bisa memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang lebih kepada ‘’David’’, dan tidak menekan ‘’Goliath’’ dengan pungutan-pungutan liar yang pada akhirnya akan memunculkan efek ekonomi biaya tinggi dengan membumbungnya harga pasar karena ‘’Goliath’’ memasukkan pungutan tersebut ke dalam cost barang/jasa yang ditawarkan kepada masyarakat.

Membantu menekan harga produk dari pengusaha kelas David sangatlah mustahil ditempuh pemerintah karena hukum ekonomi menyebut bahwa tinggi rendahnya harga sangat ditentukan oleh kekuatan permintaan serta kejelian penawaran dalam mendistribusikan barang/jasa, pemerintah dapat membantu

dalam hal memberikan bantuan permodalan,kemudahan dalam menjalankan usaha, serta hal-hal pendukung lainnya. Dengan kemampuan serta akses yang sang sangat minim untuk memasuki dunia perbankan,lahan usaha kota yang kian sempit sangatlah wajar jika pemerintah melakukan upaya afirmatif semacam itu kepada para pengusaha kecil.

Tetapi realitas sosial yang berkembang beberapa bulan ke belakang terlihat bahwa keberpihakan pemerintah kota terhadap usaha kecil sangatlah minim, bahkan ada kesan dengan mengatasnamakan keindahan dan ketertiban kota dan dipayung oleh peraturan daerah pemerintah kota menekan, menggulung, mengganyang habis-habisan usaha wong cilik. Tenda-tenda kaki lima yang berada di pinggir-pinggir jalan disikat habis, beca-beca yang beroperasi harus disertai STNK, SIM, dan tetek benger lain yang dipastikan tidak akan dipatuhi oleh penarik becak yang hasilnya pas-pasan. Semua kebijakan dan tindakan pemerintah kota tampaknya berujung pada harapan musnahnya usaha wong cilik dan eksisnya kaum kapitalis.

Asumsi ini kian menguat manakala melihat kebijakan yang ditelorkan oleh jajaran eksekutif dan direstui para anggota dewan yang nota bene mewakili suara mayoritas wong cilik di bidang ekonomi, alih-alih membela malah mereduksi membonsaikan usaha wong cilik. Pemerintah hanya bisa membongkar usaha kecil yang berada di trotoar kota tanpa bisa memberikan pilihan menempati tempat selainnya.

Pemerintah seolah mencukupkandiri diri dalam hal pembelaah kepada usaha wong cilik dengan menggulirkan dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dan P2KP,kemudian menutup mata rapat-rapat tentang informasi yang menyebutkan bahwa dana-dana JPS dan P2KP gagal mencapai target karena tidak didistibusikan kepada usaha kecil sejati melainkan kepada saudara,teman dekat,tetangga para distributornya belaka.

Andai saja pemerintah kota bisa membaca betapa maraknya para pedagang kaki lima di Kota Cirebon, maka fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak pernah mempersoalkan ada tidaknya dana JPS dan P2KP, apalagi meminta pertanggung jawaban sumber maupun penggunaan dana-dana tersebut.

Masyarakat tidak pernah peduli tentang kericuhan pihak eksekutif dan legislative berebut komisi dari para kapitalis melalui pendirian bangunan JPO. Bando dan lainnya atau mempersoalkan interpelasi yang menunjukkan arogansi sekaligus kepintaran dan ketenangan untuk mengais sedikit rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang sangat elementer. Dan kalaupun trotoar memang bukan tempat dibolehkan mereka sangat berharap terhadap solusi positif yang diberikan pemerintah bagi keberlangsungan usaha mereka, bukan hanya main bongkar dan angkut paksa belaka.

Etnis Tionghoa yang ditengarai menguasai sebagian besar aset ekonomi di kota Cirebon sepantasnya mulai langkah konkret mengimplementasikan substansi perayaan imlek yang mengusung kebersamaan dan menebar cinta kasih di bidang ekonomi dengan menolak secara tegas pungutan liar yang dilakukan oleh pengusaha dan membela kepentingan usaha wong cilik (baik dari aspek permodalan maupun tempat usaha). Masyarakat kota Cirebon secara umum tidak pernah mempersoalkan etnis dalam berinteraksi ekonomi atau interaksi sosial lainnya. Etnis Tionghoa atau yang lainnya adalah warga bangsa dari apa yang disebut negara Indonesia.

Interaksi antara etnis tionghoa dan para pedagang yang berbelanja di toko merekayang terjadi puluhan, bahkan ratusan selama ini di kota Cirebon tidak hanya dilakukan saat mereka melakukan jual beli. Pada saat imlek, dodol cina yang merupakan makanan khas etnis tionghoa dibagikan kepada para pelanggan dagangan mereka yang sebagian besar terdiri dari beragama Islam. Dan para pedagang muslim tidak pernah mempersoalkan pemberian dodol cina, meski tidak pernah ikut merayakannya. Bahkan bisa disebut beberapa diantaranya, -untuk tidak menyebut banyak-, mengharapkan pemberian tersebut.

Kesewenang-wenangan terhadap etnis Tionghoa selama ini tampaknya dilakukan hanya oleh oknum penguasa demi kepentingan materi pribadi semata. Pemberantasan perilaku korup seperti ini memang selayaknya menjadi kewajiban bersama organisasi masyarakat, OKP, LSM dan organisasi sosial lainnya. Dan tampaknya saatnya tepat bila barongsai yang menari dalam acara imlek untuk menunjukkan taring dan jurus kungfu nya

kepada para pejabat yang korup. Basmi habis koruptor serta oknum penguasa negeri yang mempolitisasi keberadaan etnis Tionghoa untuk kepentingan kekuasaan atau kepentingan sesaat lainnya.

Manajemen Konflik Aparat Birokrasi

Dari sekian banyak wong cerbon yang skeptis dengan kemajuan Kota Cirebon menyusul terjadinya interpelasi yang dilakukan oleh anggota dewan kepada walikota yang berlanjut dengan cerita ketidakberdayaan birokrat khas Cirebon dalam mengelola konflik yang terjadi di antara mereka, penulis mungkin bisa dikategorikan sebagai orang yang justru optimis dengan konflik yang terjadi.

Meski segmentasi skeptis atau optimis terhadap realitas konflik yang terjadi diantara *elite* politik Kota Cirebon bisa jadi tidak tepat, karena seperti yang dimaklumi bahwa tidak ada permusuhan/pertemanan abadi dalam politik, tetapi untuk kepentingan analisis, terutama untuk kepentingan penulis, maka hal tersebut terpaksa penulis lakukan.

Landasan berpikir penulis tentang optimisme konflik mungkin jauh dari apa yang dikatakan sebagai *scientific management*, sangat sederhana bahkan terkesan emosional. Tetapi kadang kala dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik dimana para *elite* seperti yang selama ini terjadi kerap bermain-main dengan nasib rakyat, emosi kadang mengalahkan logika. Sistem demokrasi yang disebut-sebut sebagai sistem terbaik (tetapi sebenarnya juga menyimpan banyak kelemahan), dalam implementasinya kadang memerlukan sentuhan emosi dan logika yang minimal. Itulah yang terjadi ketika para mahasiswa melakukan aksi mogok makan selama hampir tiga minggu dalam upaya menggugat pihak berwenang untuk menuntaskan kasus APBD *Gate*. Emosi mereka melihat keborokan eksekutif dan legislatif yang berkolaborasi membodohi rakyat serta lambannya pihak yudikatif untuk menyidik sampai pada puncaknya, kerusakan fisik sementara maupun permanen karena tidak mengkonsumsi makanan tidak lagi dipikirkan.

Pihak legislatif pasca keruntuhan rezim orde haru bisa dikatakan relatif lebih kuat, bahkan cenderung mempunyai

kekuatan sedikit lebih dari pihak eksekutif. Julukan "*nibber stamp*" atau tukang stempel terhadap kebijakan-kebijakan yang ditelorkan oleh eksekutif berangsur lenyap. Konsekwensi logis dari kondisi ini, maka munculnya gesekan karena perbedaan sudut pandang, latar belakang keilmuan, pengalaman birokrasi, budaya dan seribu perbedaan lainnya pasti tak terelakan. Konflik di antara keduanya, dengan bentuk yang paling halus, yakni berupa friksi melalui media massa/sidang, bahkan yang paling kasar dengan melakukan interpelasi atau penolakan LPJ pasti akan terjadi.

Perbedaan paham, gesekan, dan konflik diantara komunitas manusia adalah merupakan sunatullah, atau dalam bahasa ilmiah psikologis sekulernya merupakan *law of nature*. hukum alam. Konflik merupakan sifat alamiah dasar mahluk Tuhan yang dikenal dengan julukan *zoon politicon*, disisi lain Tuhan juga memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengelola konflik tersebut. Manusia mampu membuat "*thesa*", kemudian dalam jangka waktu tertentu manusia juga mampu membuat "anti thesanya kemudian pada puncaknya memunculkan suatu sinthesa. Barangkali bisa disebut bahwa kesempurnaan manusia dibanding malaikat ataupun mahluk lainnya justru karena adanya konflik serta kemampuannya untuk mengelola konflik tersebut secara baik. Dari situlah kebudayaan salah satu aspek yang hanya bisa dilakukan oleh manusia bisa berkembang.

Sebuah entitas bisnis yang berkeinginan untuk tetap eksis dalam bidangnya, kadang-kadang harus menciptakan konflik di antara bara pegawainya dengan cara melakukan kompetisi antar di-isi/bagian, mencari kelemahan-kelemahan antara divisi satu dan divisi yang lainnya, saling menonjolkan prestasi divisi masing-masing, menciptakan inovasi dan semua hal yang mengarah kepada muncuinya konflik. Kemudian dalam waktu tertentu secara rutin temuan-temuan tersebut dikomunikasikan dan dibahas oleh semua divisi untuk dicarikan sebab sekaligus solusi terbaiknya. *Reward and punishment* untuk divisi atau individu juga bukan sesuatu yang tabu dipraktikkan.

Prasyarat kesuksesan manajemen konflik sebuah entitas bisnis adalah dibangunnya terlebih dahulu kesadaran setiap aparat/pegawai yang terlibat dalam perusahaan tentang peran dan

posisinya masing-masing. Aparat yang aktif dalam entitas birokrasi idealnya memahami betul tentang filosofi konflik dan mampu mengelola konflik tersebut menjadi pendorong untuk menciptakan layanan kepada publik secara lebih baik. Teori *Montesque* sebagai paradigma sebuah sistem demokrasi yang mensyaratkan adanya tiga pilar, legislatif, eksekutif dan yudikatif, seharusnya dipahami bahwa ketiganya berkompetisi untuk melakukan kompetisi dalam rangka mencapai tujuan utama, yakni kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Saling koreksi di antara ketiganya memang harus dilakukan, seraya tetap menjunjung tinggi cara dan etika dalam mengadu argumentasi, melakukan kritik, atau melakukan gugatan suatu kebijakan.

Siap salah dan kalah Penyakit kronis yang akut diidap oleh hampir sebagian besar individu dan komunitas yang ada di republik ini adalah penyakit merasa paling benar, anti salah dan tidak mau kalah. Penyakit ini menjangkiti di setiap lini sosial dari tingkatan paling bawah sampai tingkat paling atas. Klub sepak bola sebuah RT atau bahkan tingkat nasional sekalipun, tidak jarang yang melakukan kerusuhan saat menderita kekalahan. Pengurus partai politik di tingkat kelurahan sampai tingkat pusat juga tidak segan ni melakukan kecurangan dalam rangka beroleh suara dalam pemilu. Dan banyak lagi contoh lain yang semuanya berangkat dari penolakan berkhidmat kepada, bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya salah atau bisa jadi dari tidak adanya kesadaran bahwa dalam setiap kompetisi harus ada menang kalah, harus siap untuk menerima kekalahan.

Adu konsep, adu argumentasi dalam menciptakan suat peraturan daeran atau dalam menghitung angka-angka RAPBD harus terus dipelihara. Saling mengingatkan, saling mengoreksi dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah disepakati bersama harus tetap dipertahankan, dengan meminimalisir mungkin penilaian antar pribadi yang di pastikan banyak kelemahan. Dan sebagai entitas birokrasi yang mengusung nilai-nilai demokrasi sudah selayaknya kedua institusi ini bersikap elegan ketika konsep dan argumentasi itu terdapat kelemahan. Mengakui kesalahan dan menerima kekalahan dalam sidang maupun ketika diadakan 'uji

publik' melalui media massa adalah satu sikap terpuji yang harus ditempuh.

Konflik dan manajemen untuk mengoptimalkan konflik diantara entitas birokrasi menjadi niscaya dalam sebuah pemerintahan yang dihuni oleh komunitas masyarakat yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Harmoni dan stabilitas yang menjadi syarat mutlak dalam proses pembangunan bukan berarti tanpa konflik. Harmoni yang diciptakan adalah harmoni yang tegak di atas kesejahteraan rakyat. Stabilitas yang dibangun bukanlah stabilitas semu, melainkan stabilitas dinamis yang sarat dengan kesiapan saling memberi dan menerima kritik dari berbagai elemen bangsa ini.

Harmoni yang ada dan tercipta antara pihak eksekutif dan legislatif sebelum pemerintahan Walikota Subardi ternyata berujung pada terungkapnya 'kolaborasi hitam' antara keduanya dalam penetapan APBD dengan manipulasi dana rakyat lebih dari satu miliar rupiah. Stabilitas yang dibangun waktu itu ternyata stabilitas semu dalam rangka kepentingan kedua institusi tersebut (tetapi dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak).

Hanya saja yang perlu dijadikan pegangan utama, baik oleh pihak eksekutif maupun legislatif adalah, paradigma usang politik menjadi panglima' harus secepatnya ditinggalkan, diganti dengan paradigma baru 'hukum dan rakyat harus menjadi panglima' dalam mengelola atau memenej konflik yang terjadi. Sehingga konflik yang terjadi di antara keduanya tidak membuat rakyat gelisah, deg-degan, *kemringet*, karena kekhawatiran terganggunya roda pembangunan kota.

Dan ketika kedua institusi demokrasi tersebut sudah mengelola konflik dengan sebaik-baiknya, dalam pengertian bahwa konflik yang di dalamnya sarat dengan etika serta mengedepankan kepentingan rakyat yang sebenar-benarnya, maka tidak perlu ada lagi aksi mogok makan dari kalangan mahasiswa yang akan ber akibat buruk bagi fisiologis, tidak usah ada lagi aksi mogok mengajar bagi guru yang tergabung dalam PGRI yang secara tidak langsung memperkosa hak murid yang telah menunaikan kewajiban finansialnya kepada sekolah untuk menerima pengajaran.

Mengurai Konflik Internal Bangsa

Hegemoni yang dilakukan oleh rezim Orde Baru (Orba) dalam hampir semua bidang kehidupan masyarakat Indonesia di satu sisi berdampak positif (minimal dilihat dari pandangan dunia internasional) dalam upaya menciptakan stabilitas nasional yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup lumayan selama tiga dekade belakangan, meskipun faktor pemerataan menjadi persoalan utama karena kebijakan ekonomi yang diambil bertumpu pada para pelaku ekonomi dengan modal dan skala usaha besar yang relatif minoritas sementara kelompok pemodal menengah dan kecil diberikan porsi yang sangat kecil. Sehingga pendapatan per kapita yang nyaris mendekati US $ 1.000 terkonsentrasi pada sebagian kecil warga.

Indikasi lainnya adalah Indonesia yang semula pengimpor beras telah berhasil menjadi negara yang berswasembada beras (bahkan pengekspor). Lembaga-lembaga keuangan internasional mengucurkan pinjaman dengan amat mudahnya (tanpa kontrol yang ketat apa dan bagaimana pinjaman tersebut digunakan), para investor asing berlomba menginvestasikan modalnya karena tergiur akan tingkat profitabilitas yang cukup menggiurkan (di antaranya dengan menekan upah buruh sedemikian rupa). Meskipun belakangan terjadi *misunderstanding* antara Indonesia dengan negara donor (perubahan dari IGGI ke CGI). pemindahan kreditor ini semata mata pertimbangan politis, bukan karena kesalahan pengelolaan hutangnya.

Semua keberhasilan di atas bisa dicapai berkat stabilitas keamanan yang diciptakan oleh penguasa. Disamping itu kepercayaan dunia internasional bisa diraih karena faktor kekayaan alam yang melimpah serta jumlah penduduknya terbesar kelima di dunia yang sangat potensial untuk pemasaran produk. Setelah berlangsung selama tiga dekade, keberhasilan yang dibangun oleh

rezim Orba ternyata keberhasilan semu belaka. Keberhasilan yang diraih ternyata harus dengan mengorbankan banyak aspek kehidupan masyarakat, bahkan mungkin mengorbankan semua aspek atau sendi -sendi kehidupan masyarakat sebagai suatu bangsa yang beradab. Kerusuhan demi kerusuhan terus melanda republik ini tidak lama setelah rezim ini *lengser*, pembunuhan demi pembunuhan terus terjadi tanpa dapat dicegah baik oleh pemerintah, maupun para tokoh masyarakat, apalagi oleh para politisi, ditambah lagi dengan status sebagai negara pengutang terbesar dan tingkat korupsi ketiga di dunia, maka lengkap sudah penderitaan bangsa ini. Isu Sara dan keteladanan.

Pendekatan represif (baca: kekuatan militer) dalam menangani persoalan-persoalan sosial dan keagamaan yang terjadi di masyarakat yang digunakan rezim terdahulu ternyata hanya efektif dalam jangka pendek tetapi tidak untuk jangka panjang. Bahkan secara psikologis memunculkan persepsi di masyarakat (awam) bahwa pendekatan inilah yang ideal dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka. Merebaknya perang antar desa yang terjadi belakangan di beberapa bagian republik ini mengindikasikan hal tersebut.

Budaya masyarakat agraris yang merupakan mayoritas penduduk yang mempunyai pola pikir sederhana sangat rentan terhadap pengaruh dari luar. Selama puluhan tahun mereka terus diintimidasi dan diberikan contoh buruk dari penguasa yang notabene merupakan pemimpin formal mereka, sementara para pemimpin informal semisal tokoh masyarakat, ulama dan yang sejenisnya terkesan terkooptasi (baik karena diintimidasi maupun pertimbangan dakwah keagamaan) oleh penguasa formal. Minimnya contoh yang baik dan benar selama puluhan tahun ditambah lagi dengan keberpihakan hukum kepada orang-orang kuat meskipun salah menjadikan masyarakat mengalami kegamangan dalam menilai budayanya sendiri. Nilai-nilai sosial yang selama ini diyakini keluhuran dan kebenarannya (yang benar pasti mengalahkan yang salah) ternyata dalam tataran praktis tidak terjadi.

Kegamangan budaya, ketidakpercayaan masyarakat terhadap penguasa dan hukum yang berkembang, kemudian

mengkristal di kalangan masyarakat menemui momentumnya ketika terjadi gonjang-ganjing politik menyusul lengsernya rezim Orba pada tanggal 21 Mei 1997, ketika aparat keamanan tak lagi mempunyai jaringan intelijen untuk mendeteksi kerawanan yang berkembang di masyarakat (padahal mereka punya Koramil yang menjangkau hingga kelompok paling kecil yang ada di masyarakat). Konflik sekecil apapun yang terjadi di tengah masyarakat tidak diselesaikan secara hukum tetapi dengan *power* alias dengan kekerasan fisik, senjata tajam. Menyewa sekelompok massa (kalau perlu mafia) digunakan untuk membinasakan seseorang yang tidak disukai atau menghambat langkah politiknya adalah menjadi berita biasa di surat kabar.

Hegemoni dilakukan secara represif serta menjadikan isu SARA sebagai suatu momok yang menakutkan, sesuatu yang tabu untuk didialogkan dan menjadi dalih penguasa dalam melanggengkan/mengamankan kebijakannya. Akibatnya masyarakat kita dari ideologi sosial mengalami "pembonsaian" yang meskipun telah bergaul puluhan tahun dengan kelompok lain yang berbeda (baik suku, agama, golongan) tetapi tidak pernah menjadi dewasa atau merasakan pentingnya bersikap toleran terhadap persoalan-persoalan yang akan atau kemungkinan terburuk yang akan dihadapi dalam suatu kehidupan yang pluralistik. Terbukti ketika muncul persoalan kecil bisa berakibat sangat fatal, memporakporandakan ketentraman dan keharmonisan yang telah dibangun.

Upaya rekonsiliasi

Seratus hari waktu yang diberikan kepada pemerintahan Gus Dur untuk membenahi negara yang telah carut-marut oleh sementara kalangan terkesan agak emosional (paling tidak idealnya 365 hari), karena dari sejak awal terbentuknya saja sudah terlihat bahwa jajaran kabinetnya tidak terlalu solid (berasal dari kompromi dari berbagai kelompok yang punya kepentingan berbeda, meskipun klaimnya sama-sama demi kesejahteraan rakyat). Perlu waktu yang lebih lama dalam membenahi jajaran aparat yang kadung mendapat predikat sangat korup tingkat Asia di hampir semua departemen dan tingkatan daerah. Perlu strategi yang jitu

untuk mengambil parasit di suatu kolam tanpa membuat air kolam tersebut menjadi keruh. Belum lagi menghadapi persoalan-persoalan disintegrasi yang merebak dari beberapa daerah di wilayah kesatuan republik tercinta ini.

Salah satu sektor yang harus menjadi prioritas pertama dan utama dalam upaya pembenahan adalah sektor hukum, karena ciri dari suatu negara beradab adalah tegaknya supremasi hukum bagi semua golongan tanpa melihat jabatan, ras, agama dan sebagainya. "Justice for all" adalah doktrin harus dipegang benar oleh jajaran yudikatif dan harus dihormati oleh eksekutif serta pemegang otoritas lainnya (baca: tidak ada intervensi).

Urgensi tegaknya sektor ini salah satunya adalah untuk menegakkan wibawa pemerintah serta mengembalikan keadilan yang selama ini sangat diimpikan oleh segenap masyarakat. Kekerasan yang terjadi di beberapa kelompok masyarakat salah satu sebabnya adalah ketidakpercayaan mereka terhadap hukum (dan berdampak luas juga kepada ketidakpercayaan kepada pemerintah), sehingga penyelesaian konflik di antara mereka diselesaikan dengan cara mereka sendiri. Dalam penegakan hukum ini tidak bisa tidak harus diiringi dengan kekuatan aparat, dalam hal ini aparat kepolisian yang jujur dan ikhlas serta totalitas pengabdian yang siap mengorbankan jiwa raganya.

Kasus perang antar desa di Karangampel di awal bulan Syawal 1420 H bisa dijadikan contoh tentang perlunya aparat keamanan (yang netralitasnya bisa diandalkan) dalam meredam perang tersebut. Pernyataan aparat untuk "tembak di tempat" bagi gerombolan massa yang akan melakukan serangan kelihatannya cukup efektif dalam meredam perang (meski untuk sementara sambil melakukan upaya damai antar kelompok yang berkonflik).

Atau kasus perang yang melibatkan beberapa desa di Kapetakan tahun lalu yang bisa "diselesaikan" berawal dari campur tangan aparat keamanan yang diterjunkan langsung dari Jakarta. Masyarakat yang berkonflik akhirnya mau mulai melakukan negosiasi dengan dipimpin dan digerakkan oleh aparat yang dianggap profesional dan netral. Fenomena ini sebaiknya harus dicermati dan bisa dijadikan contoh dalam penyelesaian kasus serupa. Intervensi yang dilakukan aparat sepertinya memang suatu

keharusan dalam penyelesaian konflik di masyarakat yang sekarang ini bisa dikatakan mengalami masa "pancaroba" dan didera kebingungan menyusul tumbangnya rezim Orba.

Tokoh-tokoh informal yang berada di masyarakat harus berusaha untuk bisa mengembalikan citra dirinya kembali menjadi anutan, atau paling tidak jangan membuat statement (di bidang politik atau yang lain) yang akan membuat masyarakat bingung.

Pluralitas agama

Bercermin pada kasus Ambon yang diakui atau di bernuansa agama, maka masyarakat terutama tokoh-tokoh yang memegang otoritas di bidang keagamaan di daerah lainnya harus bisa mengambil pelajaran dan berusaha untuk bisa mendidik para jamaahnya untuk bisa menerima kenyataan bahwa agama yang dipeluknya adalah paling benar tetapi bukan berarti agama yang lainnya salah dan harus diperangi/diusir.

Dialog agama perlu dilakukan tetapi yang dibahas bukan masalah keyakinannya (yang pasti akan berbeda antara agama bahkan mungkin bertentangan) melainkan persamaan-persamaan yang ada di antara agama-agama tersebut, misalnya saja setiap agama pasti mempunyai dimensi *duniawi* dan *ukhrowi*, individu dan sosial kemasyarakatan, setiap agama pasti menentang prostitusi, perjudian, narkoba dan sebagainya. Dengan dialog yang intens akan muncul sikap saling menghormati dan mengasihi diantara pemeluk agama, akan muncul langkah atau komitmen bersama untuk memerangi kemaksiatan yang muncul di masyarakat.

Pemerintah harus bisa memfasilitasi dialog-dialog positif antar umat beragama ini, termasuk sosialisasi program yang ditelorkan dalam dialog. Tidak menjadikan isu agama sebagai komoditas politik, bertindak profesional dan proporsional dalam menghadapi konflik yang berkaitan dengan agama. Surat Keputusan Bersama tahun 1967 yang menjadi acuan dasar dalam kehidupan keagamaan di tengah masyarakat harus benar-benar ditegakkan.

Peranan pers

Ketika pers mulai bebas menyuarakan aspirasi masyarakatnya, ketika pers benar-benar menjadi milik publik maka pers telah menjadi kekuatan keempat (setelah tiga institusi trias politica) yang sangat dahsyat, kekuatan yang sedikit banyak akan menentukan corak, dan pola kehidupan masyarakat. Kekuatan yang sanggup membentuk opini publik untuk menjatuhkan tiga kekuatan lainnya (jika diperlukan).

Sedemikian luar biasanya peran pers sehingga bisa dikatakan idealisme insan pers akan sangat mempengaruhi jatuh bangunnya Indonesia sebagai suatu bangsa. Profesionalisme dan kode etik jurnalistik harus terus dipelihara dengan tetap mendahulukan keutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Pemberitaan yang menyejukkan tanpa menghilangkan substansi beritanya harus terus diupayakan dalam menghadapi masyarakat baca yang kondisinya sekarang rentan dalam menghadapi fenomena konflik.

Pemberangusan selama tiga dekade terhadap pers tidak dijadikan dalih untuk berbuat semaunya, menuai oplah dengan membuat sensasi beritayang meresahkan. Banyaknya partai politik yang memiliki media massa sendiri menjadikan dunia pers semakin rawan konflik, pers bisa dijadikan kendaraan politik demi kepentingan partai dengan mengorbankan persatuan dan kesatuan antar anggota masyarakat.

Nyanyian Duka Para Pedagang Kaki Lima

(Surat Terbuka untuk Para Penguasa)

BAPAK Walikota dan Bapak-bapak anggota dewan yang terhormat. Sudah tiga hari anak-anak kami yang masih balita tidak lagi kami beri susu, dan sudah tiga hari pula anak-anak kami yang duduk di bangku SD terpaksa harus berjalan kaki dan hanya menyaksikan teman-temannya jajan saat istirahat sekolah. Butiran nasi yang kami makan seminggu belakangan hanya bertemankan taburan garam. Kalau lagi mujur, kadang dengan sepotong tempe goreng pemberian para tetangga yang mengetahui ‘tragedi' yang menimpa keluarga kami.

Seminggu yang lalu barang-barang dagangan yang merupakan satu-satunya sumber ekonomi keluarga kami, dengan tanpa kompromi telah diangkut paksa oleh petugas pamong praja. Di bolongnya siang, di tengah masyarakat yang bertalu lalang, dengan seragam kaki tua kecoklatan, disertai pentungan dan muka masam mereka dengan gagah memasukkan segala peralatan dagang kami ke dalam mobil. Ratapan, teriakan, serta linangan air mata dari beberapa anak-anak dan wanita tidak mereka perdulikan.

Ketika kami tanyakan kepada mereka, mengapa usaha kami di obrak-abrik, jawaban mereka singkat dan sangat jelas, "Kalian mengganggu ketertiban umum, kalian merusak keindahan kota, kalian telah melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2003 Pasal 10 Ayat 2”. Terus terang kami agak tercengang dengan jawaban tersebut, dan karena kami awam tentang Perda, maka kami kemudian ajukan pertanyaan susulan tentang apakah mereka yang membuat Perda tersebut lagi-lagi jawaban mereka singkat, "Bukan kami yang membuat melainkan Bapak Walikota dan Anggota Dewan yang

terhormat, kami hanya aparat yang menjalankan peraturan tersebut".

Itulah alasan mengapa kami akhirnya memberanikan diri untuk mengirim surat terbuka ini. Dan hal lainnya mengapa kami tidak langsung bersilaturahmi, bertatap muka saja dengan bapak-bapak. Kami takut akan kena damprat, cacian, makian bapak, mengingat aparat bapak sudah melakukan demikian. Meski kami tahu bahwa beberapa bulan ke belakang beberapa waktu menjelang 'penyoblosan' Pemilu bapak mengklaim bahwa bapak adalah wakil kami yang akan membela kepentingan kami, akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam berusaha dan serbu saru janji lainnya.

Bapak Walikota dan bapak-bapak anggota dewan yang terhormat. Dari beberapa mahasiswa berambut gondrong yang menghubungi kami, kami akhirnya tahu bahwa Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tibum itu ternyata cacat hukum. Beberapa pasalnya ternyata bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, kalau tidak salah kontradiktif dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (atau Kitab Undang-Undang Hukum Pedagang 7, kami lupa menanyakan lagi) sehingga oleh pengadilan, kasus-kasus yang tercantum di dalam Perda tersebut selalu ditolak untuk disidangkan. Disamping cacat Hukum, Perda itu juga bisa dianggap sebagai "cacat moral" ketika dikompromikan dengan UUD 1945 yang mengamanatkan "Negara harus menyantuni Kaum yang termajinalkan/miskin". Semangat Perda Nomor 9 Tahun 2003 jelas sangat berseberangan dengan jiwa UUD 1945. Atas nama ketertiban umum, kami kaum marginal tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi, kami harus tetap menumeru belas kasih orang melalui zakat, pajak dan shodaqoh.

Bukan, sama sekali bukan berarti kami menuntut hak kami untuk selalu disantuni oleh pemerintah atau diberikan modal dagang secara cuma-cuma. Kami hanya minta Pemerintah untuk berbuat adil (proporsional), terhadap kami para pedagang kaki lima. Ibarat bermain bola, kami ini adalah tim yang terdiri dari

Siswa Kelas 1 SD berhadapan dengan tim Siswa SMA yang mewakili para kapitalis (baca : pemilik toko, mal, super market dan usaha-usaha bermodal besar lainnya). Jelas kami kalah dalam segala-galanya, baik dari segi fisik, Teknik, strategi, akses ke Perbankan, peluang ekspansi dan lain sebagainya. Meski demikian, 'pertarungan yang tak seimbang' ini tetap kami hadapi, demi kelangsungan hidup kami dan juga anak-istri kami.

Trotoar, badan jalan, taman kota dan tempat tempat keramaian adalah tempat yang cocok untuk jenis dagangan kami, karena disanalah para konsumen kami banyak bertebaran. Mereka, disamping membutuhkan harga murah, juga kemudahan dalam memperoleh kebutuhannya. Terus terang kami akan menaati Perda tibum tentang larangan berjualan di tempat-tempat tersebut, asalkan saja para konsumen mau mengerti dan tetap membeli barang kepada kami meski kami telah pindah ke tempat yang jauh dari keramaian, yang sarana dan mobilitas transportasinya relatif sedikit. Apa Bapak bisa menjamin bahwa mereka akan tetap menjadi konsumen kami? Atau maukah Bapak dan sekeluarga kolega serta handai taulan menjadi konsumen baru kami dengan meninggalkan belanja di butik, super mall, atau entitas kapitalis lainnya?

Jelas tidak mungkin karena biar bagaimanapun sistem ekonomi pasar dibangun atas dasar liberalisme *demand* dan *supply*, sistem yang diadopsi dari luar ini mempunyal spirit kebebasan setiap individu untuk melakukan aktivitas ekonominya. Tidak ada konsumen yang membeli atas dasar belas kasihan, menawarkan keteladanan, tekanan penguasa dan yang sejenisnya. Semua individu menerapkan prinsip ekonominya semaksimal mungkin.

Bapak Walikota dan bapak-bapak anggota dewan yang terhormat. Kami bukan berlagak sok pintar, persoalan-persoalan pemerintah memang tidak hanya tentang kami para pedagang kaki lima, masih banyak masyarakat lain untuk diperhatikan. Tapi kami rasa, komunitas lain (para kapitalis, pegawai, turis, pejabat) hanya berhubungan dengan 'mata' (baca : keindahan, kenyamanan,

ketertiban dan kebutuhan sekunder serta primer lainnya), maka soal kami adalah soal ‘mata pencaharian’ yang berhubungan dengan perut, berkaitan dengan kelangsungan hidup sebagai hak yang paling asasi yang tidak bisa dibeli dengan matèri sebesar apapun.

Jangan bohongi kami dengan adagium hukum/peraturan adalah panglima, bahwa segenap perilaku aparat penguasa harus berlandaskan hukum/peraturan. Aparat pemerintah adalah abdi masyarakat, bukan abdi hukum. Sudah saatnya hukum/peraturan berpihak kepada rakyat (terutama yang lapar dan mau berusaha), kalau memang Perda tibum itu sudah jelas cacat hukum dan cacat moral kenapa tidak diganti atau diubah. Mengapa harus menunggu waktu (atau menunggu dana ?), masih banyak para akademisi, praktisi hukum dan intelektual Kota Cirebon yang masih mempunyai idealisme terhadap nasib kaum marginal tanpa harus mengorbankan kepentingan kaum super marginal lainnya. Tanpa dibayar mereka akan mau dan mampu memberikan masukan tentang bagaimana sebaiknya sebuah Perda dibuat, bagaimana membuat Perda yang tidak cacat hukum dan tidak cacat moral.

Dari mahasiswa gondrong kami mengetahui, bahwa di tahun-tahun awal kejatuhan Pemerintahan Bapak Jendral Besar Soeharto banyak bank yang dilikuidasi karena para debiturnya, yang terdiri dari pengusaha besar, tidak bisa mengembalikan pinjaman. Kemudian untuk mengembalikan dana-dana masyarakat yang tersimpan di bank-bank yang dilikuidasi tersebut pemerintah berhutang ke lembaga-lembaga donor internasional. Meski langkah pinjaman pemerintah tersebut jelas akan menjadi beban bagi kami, bagi anak cucu keturunan kami kelak, tapi kami ikhlas dengan langkah tersebut karena mungkin itu satu-satunya langkah yang terbaik, dan kami tetap percaya bahwa pemerintah adalah sosok yang mempunyai kepandaian dan kearifan di atas rata-rata rakyat.

Dari mahasiswa gondrong itu juga kami tahu, bahwa dalam saat-saat bangsa sedang menghadapi krisis tersebut justru kelompok kami yang disebut-sebut sebagai pengusaha sektor informal yang dianggap sebagai ‘pendekar penyelamat’. Kelompok

kamilah yang disebut sebagai katup pengaman bagi keberlangsungan krisis yang diduga akan berlangsung lama. Tapi kenapa di Kota Cirebon muncul Perda tibum yang jelas-jelas tidak menginginkan kehadiran kami sebagai pendekar.

Terus terang kami iri dengan kawan-kawan kami yang ada di Kota Jogjakarta. Eksistensi mereka benar-benar diakui oleh pemerintah mereka, kepentingan mereka diakomodasi, diarahkan, dan diberikan tempat di jalan pusat kota Jogjakarta, Malioboro. Penataan kota tidak harus 'menyakiti' para pedagang kaki lima karena dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Pedagang kaki lima justru dijadikan ikon Malioboro, menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.

Entah kapan Jl. Pasuketan, Pekiringan, Karanggetas bisa disulap menjadi Malioboronya Cirebon. Koordinasi dengan para pemilik toko seharusnya bisa mulai dicoba oleh Bapak Walikota sebagai orang pertama dibantu oleh para punggawanya. Melakukan studi kelayakan secara intens dan komprehensif yang melibatkan para tokoh masyarakat dari kalangan seniman, keraton, akademisi, dan lainnya dengan menggunakan dana APBD juga bukan sesuatu yang salah atau suatu utopia.

Kami tak mau menjadi beban pemerintah, atau memberatkan APBN dengan terus meminta bantuan beras atau bantuan tunai langsung lainnya. Berikan kami kesempatan untuk mencari uang dengan cara kami sendiri. Beri kami kesempatan untuk menunjukkan kepada anak-anak kami, bahwa kami tetap orang tua yang bertanggung jawab atas masa depan mereka. Dan jangan ajarkan kami bagaimana cara mengelola usaha yang baik, cara mencari modal perbankan yang mudah dan murah, cara mencari lokasi usaha strategis.

Sebagai rakyat kecil dengan penghasilan pas-pasan dan hanya cukup untuk beberapa hari untuk makan anak istri, kami lebih tahu bagaimana bertahan hidup. Kami lebih tahu matematika usaha kecil, berhitung dengan modal yang sangat minimal harus mendapatkan hasil semaksimal mungkin tanpa harus bergantung

kepada orang lain. Berilah kami nafas untuk usaha, dengan memberikan tempat yang sekiranya memudahkan akses para konsumen datang ke tempat usaha kami.

Cirebon Kota “Walimah”

"JAN! Weru judi kuh haram, kenang apa diizinaken?" takon Kaji Somad.
"Sebab kang ngizi- naken, ce-ese syetan," jawab Lamsijan.
"Masa! Ning Kota Wali ana ce-ese syetan?" takon Kaji Somad.
"Kota Wali soten, zaman bengen.Sekien sih, wis dadi kota Walimah," jawab Lamsijan.
"Walimah sih apa?" takon Kaji Somad.
"Wadon linglung bli balik ning umah," jawab Lasijan. Kiyiiiis.

Dialog basa cerbon di atas dikutip dari Jogregannya Mitra Dialog edisi Sabtu, 10 Pebruari 2007, yang terjemahan bebasnya- terutama untuk pembaca yang belum paham betul basa cerbon- adalah sebagai berikut: "Jan!, Jelas judi itu haram kenapa diizinkan?" tanya Haji Somad. "Sebab yang mengeluarkan izin temannya syetan," jawab Lamsijan. "Masa! Di kota Wali ada temannya syetan?" tanya Haji Somad. "Kota Wali itu zaman dulu. Sekarang sih sudah jadi kota Walimah," jawab Lamsijan. "Walimah sih apa?" tanya Haji Somad. "Wadon linglung bli balik ning umah (gadis stress yang tidak pulang ke rumah)," jawab Lamsijan. Kiyiiiis.

Ketika Lamsijan menyamakan Cirebon yang sudah tidak steril dengan perilaku judi seperti seorang gadis,stress yang tidak pulang ke rumah, sebenarnya seligus juga dia mengatakan bahwa Cirebon juga kota prostitusi, meski tidak separah kota besar seperti Jakarta. Dalam kolom "Jogregan' di koran yang sama Lamsijan kerap menceritakan investigasinya terhadap wanita- wanita yang berprofesi PSK dengan berbagai status sosial yang disandangnya (dari *Sales Promotion Girl*/SPG sampai kepada ibu rumah tangga yang ditinggal suami).

Anggapan Lamsijan bahwa di Kota Cirebon banyak teman syetan bisa jadi juga menjadi anggapan sebagian besar warga kota. Dan jangan-jangan bagi warga kota yang kebetulan menggeluti profesi sebagai kuli tinta sejak belasan atau puluhan tahun lalu sudah berangga pan sang 'teman syetan' itu telah berubah menja di "syetan itu sendiri". Anggapan sang teman syetan telah menjadi syetan itu sendiri sangat beralasan karena persoalan prostitusi dan perjudian selalu menjadi *dark commodity* pada setiap pergiliran kekuasaan di Cirebon. Komoditas gelap yang muncul dan keberadaannyan nis- caya pada setiap pergantian wali kota. Padahal sangat jelas dan nyata pula (bagi orang yang tidak pernah belajar ilmu politik sekalipun) bahwa resistensi warga kota terhadap kedua hal tersebut sangat tinggi. Pergantian orde di tingkat pusat, dari Orde Baru yang bernafaskan sentralistik kepada Orde Reformasi dengan nafas otonomi daerah tidak menggoyahkan keberadaan judi dan prostitusi ini.

Ketika di koran "MD" beberapa hari yang lalu terpampang foto seorang ustadz Salim Bajri yang 'ngoncog' istilah "MD" ke entitas dewan di jalan Siliwangi maka pada koran yang sama pula pada 17 tahun lalu foto ustadz itu muncul. Bedanya kalau sekarang mengajukan keberatan terhadap keberadaan 'perjudian' berkedok permainan ketangkasan di lokasi Grand Centre dan Pasar Balong sementara dulu mengajukan keberatan terhadap keberadaan 'perjudian' di lokasi hiburan Ade Irma. Kalau sekarang yang turun mengadakan penyitaan di Pasar Balong aparat keamanan dari Polda Bandung sedangkan di Ade Irma dulu dari anggota Kopassus Jakarta.

Dan hebatnya setelah penyitaan selalu ada beberapa tokoh pemuda yang angkat bicara bahwa permainan ketangkasan itu bukan judi, kenapa harus disita, kenapa tidak ada proses hukum, kenapa aparat tidak menunjukkan surat penyitaan, dan juga memberikan *statement* bahwa aparat telah bertindak anarkis, tidak cerdas serta *statement-statement* lain yang menunjukkan kapabilitasnya sebagai seorang intelektual ulung yang merasa

bertanggungjawab terhadap Kota Cirebon sebagai kota dagang dan jasa terdepan di Jawa Barat.

Sebagai warga kota yang oleh kalangan akademisi dan birokrat dimasukkan ke dalam kelompok *grass root*, Lamsijan sempat bingung, sebenarnya permainan ketangkasan di Amazone itu masuk kategori judi atau bukan? Yang lebih pintar itu para tokoh pemuda dengan gelar embel-embel sarjana teknik nuklir, IT, peternakan, hukum atau sang ustadz yang profesor? Pengalaman Lamsijan sowan ke aparat keamanan, baik di tingkat polres atau kodim, juga sering menemukan aparat kea- manan yang merasa mempunyai kapabilitas lebih untuk menyimpulkan sesuatu dianggap perjudian menurut versinya.

Dan hal yang membuat bingung lagi adalah, kenapa temannya, si Dul Gedpuk dan Dul Kampleng yang kebetulan sama-sama dari kalangan *grass root* dan bekerja sebagai petugas cleaning service di Amazone iku! di gelandang juga ke Bandung oleh aparat?

Apa sebenarnya kesalahan Dul Gepuk dan Dul Kampleng? Mereka toh hanya warga kota yang hanya mencari beberapa lembar uang ribuan untuk merebus sekilo beras yang har ganya kian mencekik leher? Kalau memang bekerja di tempat itu terlarang dan harus digelandang, kenapa orang- orang (oknum) yang memberikan izin perjudian ini justru tidak dianggap bertanggungjawab dan digelandang ke markas kepolisian.

Tidak tersentuh hukum Lamsijan juga teringat ketika 9 tahun lalu di depan rumahnya lewat iring-iringan truk yang membawa alat-alat permainan ketangkasan senilai hampir 3 miliar rupiah dengan tujuan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah Grenjeng untuk dimusnahkan. Yang diseret ke pengadilan waktu itu hanya pemilik alat-alat tersebut se mentara petugas yang memberikan izin penyelenggaraan judi sama sekali aman dari sentuhan hukum.

Waktu itu, sempat muncul dalam benak Lamsijan untuk mengambil sekolahan hukum supaya dia pintar dalam bidang

hukum sehingga dia bisa membuat produk hukum yang adil seadil-adilnya. Tidak ada dan tidak akan pernah ada orang atau lembaga manapun, baik pemerintahan, kemananan, maupun sipil yang kebal hukum. Tapi gurunya sempat menasihati bahwa kondisi pemerintahan akan berubah, bahwa Orde Baru yang segala program kemaksiatan diproduksi secara terselubung oleh pusat dan dipaksakan pelaksanaanya ke daerah-daerah akan tumbang dan digantikan oleh Orde Reformasi yang lebih bermartabat serta cerdas. Akhirnya Lamsijan urung masuk ke sekolahan hukum dan menyerahkan mekanisme perubahan ke penguasa.

Kasus Amazone yang melibatkan kedua temannya makin membuatnya yakin bahwa dalam soal perjudian kedua orde penguasa itu setali tiga uang alias sami mawon. Demikian juga dalam soal prostitusi. Razia-razia aparat kepolisian terhadap praktek prostitusi hanya dilakukan di hotel-hotel melati, sementara hotel-hotel yang berbintang nyaris tidak pernah. Dalam benak Lamsijan yang nakal sempat terpikir kenapa aparat di tingkat polres tidak pernah punya keberanian untuk merazia hotel berbintang? Jangan-jangan ada kekhawatiran ketika dilakukan razia ternyata dalam salah satu kamar di hotel berbintang itu ada oknum pejabat mabes polri yang sedang diluar jam dinas kebetulan sedang iseng menginap, maka kemungkinan kapolres pindah ke wilayah ujung kulon yang kering sangat besar. Dan ternyata pikiran nakal Lamsijan itu juga menjadi pemikiran peserta obrolan jogregan di warung tegal yang terdiri dari tukang becak yang biasa mengantar sang pramusyahwat (PSK) ke hotel-hotel melati, petugas cleaning service hotel melati, mahasiswa kos-kosan, sopir angkot, kuli bangunan, dan para pendekar gosip dari kelompok *grass root* lainnya.

Ngalor-ngidul obrolan jogregan ini, sedikit banyak bisa menjadi katalisator atau katup pengaman bagi letupan emosi kaum grass rook Harga-harga sembako yang kian melangit, honor dan rapelwakil rakyat yang. bombastis, penyimpangan dana-dana rakyat. yang masih merebak, penanganan banjir dan penyebaran

DBD yang terkesan main-main, hal-hal yang menyakitkan hati berpotensi unfak. terjadinya ledakan emosi massa. Unek-unek yang berangkat dari ketidakmampuan pemerintah menangani urusan krusial rakyatnya dijadikan bahan olok-olok di sini dan akhimya bisa mencairkan emosi tersebut.

Diakui atau tidak, penguasa Cirebon tidak pernah mau belajar dari pengalaman masa lalu, mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menghalalkan segala cara jelas merupakan tindakan marxis yang bertentangan dengan. landasan ideal negeri ini. Memberikan izin usaha permainan ketangkasan dengan menggu nakan mesin jackpot dan yang sejenisnya telah terbukti beberapa kali akan berujung pada perjudian. Pembangunan ekonomi dengan mengorbankan perasaan hati rakyat bukan merupakan langkah brilian bagi sebuah keputusan manajemen suatu pemerintahan demokrasi. Walikota Subardi dan juga calon-calon wali kota pada pilkadasung tahun 2008 mendatang hendaknya bisa berlaku cerdas dan tegas terhadap perizinan permainan ketangkasan serupa.

Belajarlah dari rakyat tentang resistensinya terhadap kesulitan kehidupan, survivalnya terhadap melambungnya harga beras, melawan penyakit yang mengendemi serta mahalnya biaya pendidikan. Jangan paksa rakyat untuk belajar hidup dari para pejabat yang mendapat kemudahan fasilitas hidup dari keringat rakyat. Jangan membodohi rakyat dengan dalih pemberian izin kepada para pengusaha perjudian berkedok permainan ketangkasan adalah semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Sering-seringlah keluar dari pengawalan bodyguard atau satpol PP, menyamarlah menjadi rakyat biasa kemudian makan malam di warung tegal, maka aspirasi rakyat akan lebih terdengar jernih.

Suara rakyat adalah suara (perintah) Tuhan yang menginginkan agar mahluk ciptaanNya tersebut dapat menjalani kehidupan secara baik. Mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat serta mengelola urusan mereka dengan baik adalah kebajikan yang diperintahkan semua agama.

Dengan gaji dan tunjangan lebih dari 1 miliar rupiah tampaknya langkah seperti itu tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan.

Menggugat Keabsahan Organisasi Islam

Umat kelak, sabda Rasulullah suatu ketika, akan seperti buih di lautan. Jumlahnya besar tetapi sangat mudah diserert ke sana ke mari. Tidak punya kekuatan sama sekali untuk melawan. Sabda *Al Amin* itu ternyata terbukti. Dan dalam konteks kekinian dan kedisinian, tidaklah terlalu berlebihan jika yang paling bertanggung jawab atau terjadinya kondisi ini adalah para intelektual islam. Mereka yang bergabung dalam suatu organisasi yang mengusung nama islam dalam nama organisasinya atau paling tidak yang mengklaim organisasinya sebagai himpunan orang-orang yang beragama islam. Baik organisasi kemasyarakatan, kemahasiswaan, profesi, dakwah, politik maupun yang lainya.

Rasulallah pernah wanti-wanti kepada umatnya untuk memilih/mengangkat salah satu dari dua atau tiga orang yang melakukan perjalanan untuk menjadi pemimpin di antara mereka (analoginya, apalagi dalam perjalanan hidup suatu komunitas masyarakat yang lebih besar). Bahkan Ibnu Taimiyah, salah seorang intelektual islam yang pemikiran pemikirannya sangat mempengaruhi warna harokah (pergerakan) di seluruh negara dunia islam, lebih menyukai suatu masyrakat yang mempunyai pemerintahan (meski zalim) dibandingkan dengan suatu masyrakat yang tidak mempunyai pemerintahan sama sekali (dalam konteks inilah kita bisa memaklumi bila ada beberapa kalangan yang lebih memilih hidup dalam rezim orde baru dibandingkan rezim pasca orde baru yang sarat dengan intrik politik yag sangat menyakiti hati rakyat karena dilakukan secara vulgar dan transparan di hampir semua lini kepentingan publik).

Dari sini bisa dimabil kesimpulan bahwa keberadaan organisasi menjadi suatu keniscayaan. Hanya saja satu hal yang perlu dipahami bahwa organisasi itu sendiri hanyalah sebuah

wahana atau sebuah media yang diadakan semata-mata untuk memudahkan pengkoodinasian suatu komunitas, bukan merupakan suatu tujuan. Karena organisasi (khususnya yang mengusung nama Islam), pasti akan bersifat universal, yakni untuk mengharap keridhoan Allah semata untuk kemuliaan umat Islam pada umunya (semua muslim adalah bersaudara, minimal dari segi keimanan, di mana dari segi ini juga Tuhan menilai kualitas seseorang).

Beragamnya organisasi yang mengusung nama islam, baik organisasi politik maupun sosial, bisa dipandang sebsgai suatu dinamika dan menjadi rahmat. Sangatlah mustahil suatu umat akan maju jika homogen dalam segala hal. Tetapi keberagaman suatu organisasi tidak bisa diesbut sebagai suatu dinamika serta rahmat (karena kedua kata tersebut bekonotasi positif konstruktif, tidak negatif dekstruktif) apabila berdirinya justru akan mengundang perselisihan yang tajam di antara umat atau menimbulkan deregulasi kepercayaan umat terhadap agamanya (pola pikir mayoritas umat islam indonesia masih agraris bukan urbanis, meski gaya hidupnya sudah industrialis dalam kehidupan beragamanya, masih menganggap tokoh-tokoh islam inheren dengan agama islam, bahwa mereka adalah orang-orang yang *maksum* yang harus diikuti kemauannya).

Fenomena di atas saat sekarang terus berlangsung di negeri yang berpenduduk mayoritas muslim ini. PKB-Matori dengan PKB-alwi Shihab, PPP-Hamzah dengan PPP-Zaenudin (dan bukan tidak mungkin potensi konflik merambah ke partai lainnya) mereka terus bertikai dan bertahan dengan ke-*maksuman*-nya masing-masing tanpa befikir bagaimana nasib umat di belakangnya. Pertanyaan yang mengemuka kemudian adalah masih sahkah mereka mengusung nama islam, membawa aspirasi umat islam? Sampai sejauh mana pemahaman persaudaraan antar muslim dan tujuan dibentuknya organisasi islam?

Mencegah kemungkaran

Ada yang mengharukan (atau lebih tepatnya memalukan), saat membaca berita yang dilansir Mitra Dialog dua bulan lalu ketika seorang A Liong, sang Dewa Judi, berkunjung ke Mapolres di Sumber. Dengan muka yang seolah tanpa dosa dia meminta bertemu dengan kapolres untuk meminta izin usaha Togel (Toko Gelap), dengan alasan dia telah membuka usaha togel di kota-kota lain, ternyata masyarakat tempat kupon itu diedarkan toh *adem ayem* saja, tak ada reaksi menolak entah dengan cara lisan, surat atau berunjuk rasa.

Asthagfirullah, inikah buah dari reformasi yang mengorbankan nyawa para mahasiswa? Inikah dampak makin terbukanya katup kebebasan negeri yang dahulu kental dengan kehidupan religiulitasnya? Akankan Indonesia mengidentifisir diri menjadi Las Vegas-nya Asia? Dan berada di manakah para aktifis muslim yang tergabung dalam suatu organisasi islam, baik yang berbasis politik semacam Partai Keadilan, PKB, PPP atau yang lainnya, atau yang berbasis sosial keagamaan semacam Muhammadiyah, NU, Pesris, Al Irsyad, atau yang berbasis kemahasiswaan semacam HMI, KAMMI ketika A liong dikawal oleh bodyguard-nya secara demonstratif meminta izin kepada aparat penegak hukum secara terbuka (karena dilansir oleh mass media) untuk menebar kemaksiatan? Atau jangan jangan ada asumsi di kalangan para aktifis bahwa kewajiban mereka hanya sebatas *amar maruf* dengan terus mengadakan konsolidasi ke dalam, sementara *nahi munkar* mutlak menjadi urusan pemerintah?

Alhamdulillah di Kabupaten Cirebon, tempat sang dewa judi menujukkan arogansinya sebagai raja dari dunia gelap telah muncul Perda yang dikenal dengan Perda 3M dan jajaran Polres setempat siap untuk mengamankan Perda tersebut. Tapi dengan cerdas tajuk (sorotan) redaksi Mitra Dialog edisi 19-20 Maret 2002 menulis, bahwa persoalan bukan pada keberadaan Perda tetatapi lebih kepada *Law Enforcement*-nya. Dan diakui atau tidak itu yang

menjadi kelemahan fatal pemerintahan kita selama ini sekaligus menjadi kunci recovery dari krisis yang berkepanjangan.

Menyamakan persepsi

Sudah menjadi takdir bahwa pergulatan antara yang baik dan buruk akan terus berlangsung hingga akhir zaman. Persoalan judi pun demikian adanya dan di sinilah arti keberadaan organisasi islam. *Law Enforcement* jangan harap akan bisa tertegakkan bila tidak ada kontrol sosial dari segenap elemen kelompok islam. Sehingga sangatlah beralasan jika A liong berani meminta ijin untuk membuka togel karena tidak ada reaksi masyarakat tentang keberadaan togel, dan biasanya (berdasarkan pengalaman gerakan GEGER dan GERAM misalnya) aparat hukum, jika persoalanya perjudian, akan menunggu respon dari masyarakat dulu. Sehingga muncul kesan aparat kepolisian yang piawai dalam menangani soal-soal intelijen pun akan pasti mandul manakala menghadapi soal judi (sehingga ada kejadian lucu, di sebuah kota ada tempat perjudian yang berlangsung dalam hitungan bulan hanya beberapa meter dari markas kepolisian, tapi tidak pernah terdeksi sama sekali).

Dalam islam, perintah atau anjuran biasanya dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi dari para *mukalaf* (berbeda sesuai dengan fiqih yang diyakininya) dan ada keringanan dalam implementasinya (misalnya salat bisa saja dilaksanakan sambil duduk atau berbaring) sehingga menjadi sah saja jika persoalan ini akan mengakibatkan juga perbedaan skala prioritas antar setiap kelompok/organisasi. Tetapi persoalan larangan sifatnya tegas dan tidak bisa ditawar. Sehingga selayaknyalah dalam mengahadapi perjudian (atau kemaksiatan lainnya) setiap organisasi islam bisa bersatu, bahu membahu dan mem-back up masyarakat muslim secara umum dari berbagai penyakit sosial ini. Jangan ada anggapan bahwa yang perlu diselamatkan hanyalah muslim yang menjadi anggotanya semata.

Ditengarai keberanian A liong (dan juga bandar lainnya) untuk membuka praktek perjudian karena mereka memahami benar bahwa tidak ada persatuan/silaturahmi antar organisasi islam terutama dalam mencegah kemunkaran. Setiap organisasi masing-masing terbuai oleh progamnya masing masing, bermimpi indah tentang tatanan masyarakat yang elemenya terdiri dari hanya kelompok mereka. Para bandar mengenal betul bahwa di antara aparat hukum ada yang bisa disuap, di antara wartawan mass media ada yang bisa diamplopi, diantara ormas/LSM ada yang bisa diajak kompromi dan kalaupun melalui jalur halus tidak bisa maka langkah kekerasan dengan cara meminjam tangan preman untuk melakukan teror pun dilakukan. Jaringan mereka layaknya seperti mafia obat bius internasional, kuat dan saling mendukung. Jika ada kabar seorang bandar yang kena jeratan hukum maka sebenarnya itu hanyalah pion, bukan bandar/pentolan yang sebenarnya. Omzet perjudian mereka dalam bilangan puluhan bahkan ratusan juta rupiah seharinya, sehingga tidak heran jika sangsi hukum dalam Perda 3M sebesar Rp.5.000.000.00 hanyalah menjadi lelucon di kalangan mereka.

Meski hampir semua organisasi islam memahami betul tentang, baik ayat-ayat tesktual maupun kontesktual tetapi dalam persoalan manajemen dalam rangka menghadapi kezaliman nampaknya perlu menyamakan persepsi. Sunatullah akan tetap berlaku secara universal, terlepas dari kelompok baik maupun buruk. Bahwa kebaikan yang tidak diorganisir secara professional akan dapat dihancurkan oleh kemungkaran yang dikelola secara professional. Setelah persepsi semua organisasi islam sama, di mana pemberantasan kemungkaran merupakan tanggung jawab bersama dan memerlukan kerja sama dari berbagai elemen.

Diakui atau tidak, keberadaan organisasi islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejak pertama dirintisnya republik ini. Upaya diraihnya kemerdekaan yang mengorbankan banyak harta dan nyawa juga tidak lepas dari keberadaannya. Sehingga sangatlah wajar apabila para birokrat dalam mengambil

kebijakan yang terkait dengan pemerintahan dan negara tetap mempertimbangkan ide dan usulan dari organisasi islam. Bukan karena umat islam menjadi mayoritas penduduk, tapi lebih kepada latar belakang dan peran organisasi islam dalam pendirian republik ini.

Disisi lain, para pengurus organisasi islam juga harus mawas diri. Untuk menjaga kelangsungan Indonesia sebagai suatu negara, maka ide atau statement yang dikeluarkan pun harus tetap memperhatikan atau mempertimbangkan organisasi lainnya.

Menggagas Pembentukan Dewan Riset Cirebon

Sepak bola, di samping merupakan sarana untuk mempertahankan kebugaran serta mempertinggi nilai-nilai sportivitas dan Daya juang para pelakunya, juga berfungsi sebagai salah satu media pemersatu yang melintasi batas-batas status sosial ekonomi suatu masyarakat, agama bahkan mampu menghilangkan sekat-sekat geografis dan latar belakang etnis antar negara di dunia ini. semuanya bisa dilihat dari keberadaan sebuah liga di suatu negara yang diikuti oleh klub-klub yang para pemainnya ditransfer dari berbagai penjuru dunia, baik dari negara penghutang terbanyak semacam Brazil maupun dari negara yang mempunyai *income* perkapita tergolong tinggi seperti sebagian besar negara Eropa.

Konstelasi politik suatu negara demokrasi juga bisa dipelajari dari pertandingan sepak bola dengan membuat semacam analogi. Para pemain sebagai eksekutif wasit dan hakim garis sebagai legislatif sementara para suporter atau penonton mewakili rakyat. Para pemain berusaha menunjukkan segenap kemampuannya untuk berlomba menciptakan gol (baca: goal/tujuan). menganalogikan bagaimana kinerja presiden beserta kabinetnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah digariskan wasit dan hakim garis (legislatif) berfungsi sebagai pemegang otoritas yang berhak menilai, memberikan peringatan dari mulai yang ringan sampai yang paling keras dengan memberikan kartu merah kepada pemain. Contoh konkret dari kasus ini terjadi ketika Gus Dur di impeact (suatu tradisi yang relatif baru di dunia perpolitikan Indonesia). Padahal pelanggarannya hanya suka 'bernyanyi' di lapangan hijau saat permainan sedang berlangsung sehingga membuat 'keki' para wasit.

Yang unik adalah keberadaan penonton yang berada di luar lapangan hijau, yang meski tidak mempunyai relasi langsung dengan pertandingan tetapi perannya sangat menentukan dalam

keberlangsungan atau kontinuitas maupun mutu dari suatu pertandingan. Dalam konteks keindonesiaan entah karena usia kemerdekaan yang relatif beliau atau bisa jadi karena *kejumudan* para penyelenggara negara maupun wakil rakyatnya maka keberadaan penonton benar-benar dianggap sebagai hanya penonton yang tidak punya peran apa-apa dan diperlakukan sebagai obyek pemerasan dengan setiap saat menaikkan harga tiket masuk pertandingan (indikasinya dengan setiap beberapa bulan tarif BBM rekening listrik air dan pungutan-pungutan publik lainnya selalu dinaikkan tanpa mempertimbangkan daya beli masyarakat yang tidak pernah menunjukkan tanda-tanda perbaikan).

Peran Menentukan

Tipe penonton (baca: rakyat) dalam suatu negara sangat beragam, dari mulai yang skeptis-apatis, hipokrit-opportunis sampai pada tipe proaktif-produktif. pembagian tipe ini terbentuk dengan tanpa memperhatikan tingkat pendidikan, artinya seorang yang berpendidikan tinggi sekalipun bisa saja menjadi penonton sangat skeptis sekaligus apatis yang memandang kebijakan apapng dilakukan oleh pengelolaan negara selalu salah. Sebaliknya mungkin saja seseorang yang berpendidikan rendah masuk ke dalam tipe proaktif yang produktif dalam menyikapi suatu kebijakan pemerintahan dengan bertindak Arif dan memberikan kontribusi positif dengan melakukan kewajiban-kewajiban individualnya selaku warga negara (membayar pajak) atau ikut ikut secara langsung membangun suatu komunitas masyarakat tempat tinggalnya (kerja bakti, siskamling dan sebagainya).

Fenomena yang terjadi pasca rezim orba di mana terjadi berbagai keruntuhan dari berbagai sektor dan tingkatan, dehumanisasi yang ditandai dengan merebaknya tawuran antar desa, deprivasi di mana setiap orang tidak lagi bangga dengan identitas kebangsaannya, demoralisasi yang ditandai dengan perilaku korup baik dari para birokrat. aparat keamanan atau para pengusaha dan keruntuhan bangunan sosial ekonomi yang ditandai

dengan meningkatnya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan yang mencapai hampir setengahnya dari penduduk republik ini. untuk menghadapi persoalan-persoalan di atas tampaknya dibutuhkan sebuah institusi yang mempunyai masa cukup besar yang relatif cerdas serta mempunyai *moral force* yang memadai serta didukung kemampuan material yang minimal. *moral force* yang dimaksud adalah adanya pemikiran nasionalisme yang steril dari mentalitas korup, keberpihakan terhadap yang 'lemah' (baik dari sisi ekonomi politis dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat umum lainnya). kecerdasan yang dimiliki, berguna misalnya, dalam memahami kesulitan eksekutif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan setiap pemerintahan sehingga setiap kebijakan ditelurkan akan disikapi secara arif, tidak emosional serta melalui analisis yang mendalam.

Instusi yang memenuhi kriteria di atas tampaknya tidak mungkin ada di antara partai partai politik, baik yang gurem maupun yang *kinclong.* Dari beberapa media ditengarai statement yang diambil partai politik dalam menilai suatu kebijakan selalu sarat dengan muatan-muatan politis yang bertujuan untuk 'membesarkan' nama partai, bukan untuk kepentingan rakyat semata.

Institusi profit (pengusaha), organisasi profesi, bahkan LSM sekalipun bukanlah institusi ideal (mempunyai potensi) untuk mengemban peran/tugas berat di atas, yakni mengembalikan citra indonesia sebagai bangsa yang penuh welas asih, humanis, jujur, ulet, profesional. Satu-satunya institusi yang mampu adalah komunitas yang berada di perguruan tinggi (mahasiswa, mahaguru, serta civitas akademika lainnya).

Mengikis Arogansi

Demikian strategisnya peran suatu perguruan tinggi untuk memberikan stimulus atau dorongan bagi institusi lain atau komunitas rakyatnya untuk memulai suatu gerakan pembaharuan atau perbaikan mutu suatu pemerintahan atau generasi, yang

menjadi persoalan sekarang adalah, sejauh manakah komunitas perguruan tinggi menghayati atau memaknai janji suci yang termanifestasi pada Tri Darma perguruan Tinggi-nya. Sejauh manakah optimalisasi fungsi membentuk generasi penerus bangsa sebagai kader yang akan meneruskan estafetta kepemimpinan negara ini, memajukan bidang keilmuan dengan terus melakukan riset keilmuan sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing serta melakukan pengabdian kepada masyarakat? adakah semacam tolak ukur kegagalan atau keberhasilan yang baku tentang fungsi tersebut?

Suka atau tidak, proposional atau tidak selayaknya segenap civitas akademika perguruan tinggi di Cirebon (terutama yang berdiri relatif lama semacam UNSWAGATI, UNTAG, STAIN, STTC dan yang lainnya) harus menjawab pertanyaan tersebut. terlampau sederhana rasanya jika jawabannya hanya berkisar pada banyaknya jumlah mahasiswa yang diterima (tanpa memperlihatkan kualitas output), serta megahnya sarana dan prasarana perkuliahan yang dimiliki.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah (otda) setahun lalu, maka kontribusi perguruan tinggi di tiap daerah sebenarnya lebih diperhitungkan lagi bagi kemajuan daerah. Banyak sekali persoalan-persoalan kedaerahan yang memerlukan pemikiran serta kecerdasan lebih dibandingkan ketika belum diberlakukannya otda. Berangkat dari ucapan sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa suatu kezaliman yang tertata dengan baik akan mengalahkan kebaikan yang tidak solid (amburadul), bahwa suatu (tujuan) kebaikan harus diorganisasir dengan baik jika mau mengatasi kezaliman (persoalan-persoalan pemerintahan atau kemasyarakatan) yang akut maka dalam menjalankan perannya komunitas perguruan tinggi harus bisa bersatu, menyatu dalam suatu lembaga. Dewan riset Cirebon adalah salah satu alternatif. Riset yang dilakukan bukan semata-mata riset untuk mengembangkan keilmuan semata, tetapi lebih ditekankan pada riset yang *applicatible* dengan persoalan-persoalan daerah atau kemasyarakatan.

Bobad, Bengkerengan dan Bodoran

Dengan semua fakta yang terjadi dalam penentuan balon tesebut Lamsijan tidak yakin mereka, setelah terpilih menjadi ki gede nanti, akan serius mengurusi rakyat. Lamsijan tidak yakin mereka akan berbuat seperti Bung Karno, Presiden Ri pertama yang lebih mementingkan rakyat ketimbang keluarganya, sehingga ketika bellau wafat tidak ada lembaran saham PT atau simpanan deposito di bank yang bisa diwariskan.

"COBA sapa kang bisa nyebutaken singkatan BBB kang paling tepat, lengkap lan paling anyar ning Kota Cerbon?" ucap Pak Guru Mang Bukori sembari meman- dang Lamsijan cs di sebuah warung lemprakan di Ja- lan Kartini.

"Isun dikit." Dul Gepuk yang paling sok tau dan hanya lulusan SD cepat mengacungkan tangan. "Bukan Basa Basi!" ucapnya nyaring.

"Wah plagiat, sira niru iklan rokok kan, beli beres, sira aja nuruti wong pinter plus sugih kang beli bener Puk," ujar Mang Bukori.

"Bandit Bos Bebek!" suara Dul Kampleng dengan mulut penuh remah-remah roti yang sebagian berhamburan keluar.

"Wah kuen sih jadul Pleng, wis ketinggalan zaman, wis lawas pisan, kudu kang anget...kang anyaran beritae," Mang Bukori menimpali Dul Kampleng

"Bangunan Bekas Brimob!" ucap Ki Karbol sambil membetulkan upluk kaji kang biasa dipakainya. Ki Karbol memang belum sempat pulang seusai berjemaah Isya di At-Taqwa, bahkan dia masih mengenakan wasiat peninggalan kakeknya.

"Sssst..." Mang Bukori meletakkan telunjuk kanannya di depan hidung sambil celingak-celinguk. Matanya waspada mengawasi gerombolan orang yang ada di sebelah warung

lemprakan, terlihat sedikit kecemasan di wajahnya yang mulai berkeriput. Kemudian dia memberi isyarat agar teman-temannya disuruh mendekat.

“Sira aja ngomong santer-santer Bol, lamun krungu ning boca-boca FUI sira bisa disewoti, mending ai disewoti bae tapi lamun dicaci maki kaya Kang Jalal lagi acara diskusi ning Gedung Korpri bulan winginane kepriben coba, kan ngisin-ngisi naken.” Ki Karbol, Dul Kampleng. Dul Gepuk dan Lamsijan manggut-manggut mendengar omongan Mang Bukori. Mereka memang sempat hadir juga waktu acara bedah buku Kang Jalal yang diselenggarakan oleh Pemuda Muhammadiyah dulu. Miris rasanya melihat seorang intelektual muslim tingkat nasional yang dengan rela di undang ke Kota Cerbon, ketika berbeda pendapat dengan lawan bicara di sebuah seminar berujung pada caci maki dari sekelompok orang yang mengatasnamakan FUI, kemudian Kang Jalal diusir dari forum dengan cara yang tidak memakai adab atau kesantunan layaknya orang muslim. Entah siapa yang salah dalam kasus seminar tersebut, yang pasti hal tersebut akan menjadi catatan untuk para pembicara nasional di masa mendatang.

“Ayo sapa maning kang bisa ayebutaken singkatan BBB...” suara Mang Bukori kembali lantang

“Boca-Boca Bendrongan,” kata Dul Kampleng yang sempat nonton Kejurnas Drumband di Stadion Bima.

“Beli awet, Cuma telung dina beli bisa didadinang barometer Cerbon, timpal Mang Bukori.

“Isun..!!!” suara Lamsijan nyaring, sudut bibirnya sedikit menyungging sementara tangan kanannya memegang Koran Mitra Dialog dengan halaman terakhir yang agak lusuh. Semua temannya, bahkan termasuk Mang Suta, sang penunggu warung, memandangnya dengan penuh minat. Mereka tahu, walaupun Lamsijan hanya corang tukang koran dan hanya lulusan SMP tapi dia aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan.

"Jare isun sih BBB kang paling anget lan paling cocok ning Cerbon yaiku singkatane Badar, Bandar, Bodor". Kemudian bak

seorang pengurus partai politik bau... eh baru yang sedang melakukan pidato politik pada pembukaan cabang atau ranting di Cirebon, Lamsijan nyerocos.

"Badar adalah seorang balon wali kota pilihan pembaca Mitra Dialog yang tereliminasi minggu sekarang. Balon ini menjadi menarik buat saya karena, yang pertama poto dia mirip dengan wajah Laksamana Cong Ho, seorang laksamana laut dari Cina yang terdampar di Pulau Jawa yang kemudian menetap di Kota Semarang. Yang kedua masih tentang poto, kalau dia pake jubah dan kerudung putih maka dia akan mirip dengan lukisan tokoh Sunan Gunung Jati, seorang wali yang paling disegani di Jawa.

"Stop...stop!!!" Mang Bukori dengan cepat memotong pidato Lamsijan.

"Beli ilmiah, beli cerdas... , apa hubungane kondisi sosial Cerbon karo Laksamana Ceng Ho"

“Ya wis baka Ceng Ho beli dianggep bli pa-pa, tapi jare isun Badar tetep masih bisa dianggap sebuah isu hangat ning Cerbon, karena mungkin dia satu satunya ketua KNPI di Indonesia, bahkan mungkin di dunia yang nekad mengajukan diri menjadi balon wali kota di sebuah kota yang urusan sampah saja tidak pernah bisa dirampungkan. Di samping itu dia tokoh sentral Warga Siaga kang akeh nylametaken para bayi karo ibue, terus dadi dosen ning peguron agama, terus dadi wartawan. Pokoke Badar is the best, Badar bisa disebut ikon wong nom Cerbon. Kapan-kapan isun pengen kontak bung Prana bose MURI (Musium Rekor Republik Impian) dan mengusulkan Badar untuk menjadi bakal calon wali kota yang paling mirip Laksamana Ceng Ho atau Sunan Gunung Jati."

Mang Bukori, Dul Gepuk, Dul Kampleng. Ki Karbol dan Mang Suta kompak mengangguk-angguk terus menggeleng-geleng mirip tika Project Pop mendengar pidato Lamsijan yang makin tidak jelas juntrungannya.

"Lah sekien singkatan Bandar maksude apa Jan?" timpal Mang Bukori.

Di Cirebon sekarang berkeliaran bandar-bandar, dulu mungkin hanya bandar judi dan bandar esek-esek tapi sekarang sudah makin komplit. Dari mulai bandar bebek, bandar penerimaan murid baru, bandar narkoba sampai kepada bandar politik. Kalau bandar judi dan bandar esek-esek tidak usah dibicarakan lagi karena mereka memang selalu bisa berinkarnasi dalam setiap kepemimpinan Wali Kota Cerbon. Demikian juga dengan bandar bebek sudah sering dilansir oleh media massa nasional. Ketiga bandar ini sangat kasat mata dan sudah menjadi rahasia umum.

Sementara bandar yang lainnya bisa dibilang rada kusut bin ruwet karena melibatkan beberapa kalangan yang berasal dari "kasta ksatria dan kasta kadewatan" (baca: birokrat dan anggota dewan yang terhormat). Dari bocoran abdi dalem yang masih memiliki idealisme misalnya diperoleh data siswa haru yang masuk melalui jalur siluman alias tidak sesuai dengan passing grade mencapai 700an lebih. Dengan asumsi setiap SMA negeri rata-rata menerima 300 maka jumlah siswa siluman mencapai 26% dari seluruh siswa baru. Dan dari data ini bagaimana bisa menghasilkan peningkatan IPM tiga tahun mendatang dari jalur sekolah menengah atas.

Ditengarai juga bahwa dari 700 map siluman tersebut sebagian besar dibawa oleh orang-orang kadewatan (atau paling tidak oleh para partisan partainya). Dan lebih celakanya lagi mereka mengutip sejumlah besar uang kepada orang tua yang mau memasukkan anaknya lewat jalur siluman tersebut. Dan Lamsijan yakin benar bila hal sensitif ini dikonfirmasi kepada mereka orang tua siswa tersebut tidak akan berani membuka mulut. Otonomi daerah memang hanya menghasilkan sebuah kerajaan kecil yang dikuasai oleh seorang raja yang diback up oleh para bangsawan dari para kadewatan, *emang gawe ngenes*!!!

Peringkat ketiga di Jawa Barat dalam hal jumlah penderita HIV jelas mengindikasikan bahwa kota Cerbon memang surga bagi pemakai narkoba. Penangkapan seorang bandar narkoba terbesar di Jawa Barat bahkan mungkin di tingkat nasional oleh

Tim Buser di Jalan Pekalangan serta penggrebekan LSM anti narkoba yang penasehatnya dari orang kadewatan tapi justru menjadi sarang pemakai narkoba menjadi indikasi bahwa banyak bandar narkoba di Kota Cirebon. Berkeliarannya bandar politik menjelang pilka da terlihat jelas dalam penentuan balon wali kota dari partai-partai politik. Ada balon "simsalabim abrakadabra" yang ujug-ujug jadi pahlawan kesiangan dengan mengklaim aspirasi rakyat melalui konvensi atau ratimda atau mekanisme karbitan apapun namanya. Ada lagi balon hijau, kuning, kelabu, merah da dan biru. kemudian meletus balon hijau dar-der-dor, bau dan kayu melayang di rumah dinas disertai encaman minum banyu cis.

Dengan semua fakta yang terjadi dalam penentuan balon tesebut Lamsijan tidak yakin mereka, setelah terpilih menjadi ki gede nanti, akan serius mengurusi rakyat. Lamsijan tidak yakin mereka akan berbuat seperti Bung Karno! Presiden RI pertama, yang lebih mementingkan rakyat ketimbang keluarganya, sehingga ketika beliau wafat tidak ada lembaran saham PT atau simpanan deposito di bank yang bisa diwariskan.

Pilkada Kota Cerbon terancam menjadi sebuah kabaret atau drama tanpa wicara yang penuh bodor jika para politisi, baik yang duduk di kursi anggota dewan atau para pengurus partai dan partisannya di lapangan tidak cepat melakukan konsolidasi, baik internal maupun eksternal. Konsolidasi internal dengan melakukan islah atau fatsun politik dengan menampilkan gagasan partai yang lebih cerdas dan berorientasi kepada kemaslahatan rakyat secara keseluruhan bukan rakyat partai. Sementara konsolidasi eksternal adalah semua pengurus partai duduk dalam satu meja dan bersama-sama merumuskan kontrak politik yang mempunyai kekuatan hukum dan sosial (tidak sebatas retorika) terhadap kandidat yang akan bertarung tanggal 6 Januari 2008 nanti.

"Wis Jan, ndas isun blenger ngrungu nang omongane sira," tukas Ki Karbol sambil memegang pelipisnya.

"Tapi kita durung pragat ngomonge kih..."sahut Lamsijan. "Cukup Jan... wis diminum kuh kopie," kata Ki Karbol, matanya memandang Mang Bukori kang matae merem melek.

"Ari menurut sampean apa Mang singkatan BBB kang lagi anget kuh," Ki Karbol bertanya kepada Mang Bukori.

"BBB kang anget iku singkatane Bobad Bengkerengan Bodoran."

"Maksude apa Mang?

"Percuma sira kabeh masa ngertia bagen isun ngomong panjang lebar gen," kata Mang Bukoti bari ngleos metu. "Kiyiiisss!!!"***

Antara Muludan, Berjanji dan Pewaris Nabi

A man like Muhammad were toassume the dictatorship of the modern word, diberi kesempatan world succes in solving /jika orang seperti Muhammad diberi kesempatan untuk memimpindunia modern sekarang ini, pasti dia akan berhasil menyelesaikan seluruh masalah kehidupan manusia." (George Berdnard Shaw).

Kutipan kalimat yang penulis ambil tulisan H. Abdullah Ali di Mitra Dialog edisi Kamis 6 April 2006 mengingatkan penulis pada obrolan jalanan soal suksesi di warung Tegal menjelang keruntuhan rezim Orde Baru dengan para aktivis pemuda dari berbagai elemen. Seorang pemuda mengajukan pemimpin ideal yang harus memimpin Indonesia adalah sosok yang seperti Nabi Muhammad dengan melandaskan argumentasinya pada statement George Bemard Shaw tersebut.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah sebagai apa atau apa status sosial dari orang yang seperti Muhammad itu di dunia modern? Sebagai *merchant* atau pedagang dengan usaha konglemerasi yang dimilikinya seperti Nabi saat menjalankan bisnis dengan Siti Khodijah, sebagai broker saham dengan kemampuan yang *go internasional*, sebagai pemimpin sebuah institusi sosial keagamaan dengan basis massa yang melimpah seperti Nabi menggalang kekuatan saat menghadapi kekuatan kafir Quraisy sebelum hijrah ke Madinah, sebagai politisi, sebagai aktivis LSM, sebagai TNI/Polri, guru, buruh, petani atau sebagai ilmuwan peneliti dengan seluruh tabung dan rumus-rumus eksak di laboratoriumnya?

Ditingkat dunia, siapa kira-kira sosok konkret yang menjadi duplikasi sosok Muhammad yang sanggup memimpin masyarakat modem versi Goerge Bernard Shaw ini? Mokhamad Khadafi

sebagai sosok seorang militer yang disegani dan dihormati oleh masyarakatnya karena menentang para *thagut* (dengan Amerika sebagai represantasi), atau sebagai pemimpin kelompok keagamaan seperti Amirnya Ahmadiyah yang berpusat di London dan mengklaim memiliki pengikut jutaan orang yang tersebar di hampir semua negara (beberapa di antaranya adalah ilmuwan yang mendapatkan nobel) serta jaringan telekomunikasi yang kuat?

Ataukah sosok seorang raja dari sebuah negeri Timur Tengah yang memiliki emas hitam (minyak bumi) yang melimpah sehingga dia bisa membeli atau membentuk tentara bayaran dari seluruh dunia untuk menjadi pasukannya. Kemudian dengan keberadaan pasukannya tersebut akan dengan mudah melakukan ekspansi bisnis serta melakukan kerja sama internasional dengan beberapa negara di dunia.

Pertanyaan-pertanyaan di atas kembali mencuat dan sangat relevan berkaitan dengan perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW untuk mendongkrak fanatisme umat Islam terhadap sosok Nabi dengan meneladani peri kehidupannya dalam rangka menghadapi kesulitan yang menghadang. Terapi yang digagas oleh Salahudin Al Ayyubi ini ternyata jitu pada zamannya, sejarah menyebut umat Islam bisa bangkit dari kejumudan dan akhirnya peroleh kemenangan gemilang setelah perayaan ini disosialisasikan.

Setelah melewati kurun waktu yang panjang, jatuh bangunnya peradaban bangsa-bangsa, kemajuan teknologi informasi dan perdagangan, serta dengan beragam corak budaya yang dimiliki oleh komunitas umat maka bentuk perayaan kelahiran Maulid Nabi mengalami momentumnya, dan akulturasi pun tak terhindarkan. Meski demikian, bagaimanapun bentuk dan corak perayaannya, seharusnya spirit dari gagasan awal keberadaan Maulid Nabi tidak boleh tidak harus ada, yakni setiap orang atau kaum yang melakukan prosesi Maulid Nabi ini harus mendapatkan pencerahan, baik secara intelektual, moral, maupun semangat juang dalam menghadapi kehidupan, bukan malah terjebak atau terbuai

pada kehidupan romantisme masa lalu atau semata-mata mengharapkan berjumpa dengan Nabi di akhirat kelak dengan mengabaikan tanggung jawab sosialnya, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.

Terkait dengan acara muludan yang diadakan di Kraton Kasepuhan, Kanoman dan sekitamya, dengan cerdas Mas Chaerul Salam dalam tulisannya "Memahami Muludan Secara Utuh" (HU Mitra Dialog edisi 3 April 2006) berpendapat bahwa harus dilakukan penerjemahan-penerjemahan seluruh tanda budaya yang ada di sekitar kita. Persoalannya adalah siapa yang punya otoritas untuk menerjemahkan tanda budaya, terutama dalam prosesi muludan dengan panjang jimatnya, secara fungsional ke dalam peri kehidupan kekinian. Bagaimana muludan bisa menjadi sebuah pendorong atau paling tidak pemicu bangkitnya kesadaran umat, bagaimana mauludan menjadi media intenalisasi nilai-nilai spiritualitas Muhammad sang reformis yang terus-menerus berjuang bagi kemajuan masyarakatnya.

Pihak keraton sebagai *shohebul bait* dari prosesi muludan barangkali merupakan pihak yang paling bertanggungjawab terhadap upaya spiritualisasi atau kebermaknaan muludan bagi kemajuan masyarakat. Dekonstruksi atau tepatnya demitologisasi beberapa aspek dalam prosesi muludan layak dilakukan tanpa harus menghilangkan unsur-unsur keindahan estetika dan komersialnya.

Pemberian hasil pertanian atau bantuan finansial oleh beberapa elemen masyarakat kepada pihak keraton bukan dianggap sebagai upeti dalam kerangka hubungan raja dan rakyat yang membutuhkan berkah dunia dan akhirat, melainkan sebatas hanya sebagai implementasi perintah agama untuk saling tolong menolong dalam rangka kebaikan dan sebagai upaya penghormatan tradisi serta pelestarian nilai-nilai keislaman dalam lingkungan keraton. Sebab diakui atau tidak, keraton pernah memiliki peran sentral, baik secara politis, sosial maupun ekonomis dalam penyebaran Islam di Indonesia dahulu kala. Penduduk desa tertentu , terutama orang tua yang memiliki usia sepuh masih menganggap

bahwa suatu kebajikan yang utama untuk mengirimkan hasil bumi saat ada prosesi muludan.

Warosatul Anbiya

Pembacaan barjanji yang dilakukan oleh, banyak komunitas Islam masjid atau mushalla dalam perayaan Maulid Nabi adalah salah satu bentuk penghormatan kepada Nabi sekaligus memiliki otensitas yang sah. Hanya saja, sebagai sebuah tradisi yang melandaskan pada argumentasi Panglima Salahudin Al Ayyubi ini perlu diajukan sebuah pertanyaan setiap kali dilakukan prosesi pembacaan barjanji ini. Diperlukan berapa kali perayaan atau pembacaan lagi agar umat bisa menyerap spiritualitas Nabi secara utuh. Perlu berapa tahun lagi umat Islam menjadi umat yang *rahmatan lil alamin*, menjadi *ukhrijat Lin nas*, menjadi pembebas bagi ketertindasan kaum buruh, para petani, nelayan di republik yang mayoritas muslim ini.

Internalisasi nilai-nilai kejuangan Nabi menjadi *muspra* atau hilang manakala prosesi pembacaan berjanji hanya melantunkan bahasa arab tanpa memahami makna, atau paling tidak dibacakan ter-jemahannya uraian bahasa ibu/nasional. Bahkan menjadi anti produktif manakalah pembacaannya dilakukan pada malam hari melalui pengeras suara yang sanggup membangunkan orang yang sedang tidur pulas sekalipun, seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Kota dan Kabupaten Cirebon serta sejumlah daerah belakangan ini.

Kemajemukan penafsiran, atau cara memperingati Maulid Nabi yang relatif beragam sebenarnya menjadi lahan da'wah bagi para tokoh agama, bisa menjadi sebuah upaya pembelajaran umat dalam menyikapi sebuah perbedaan. Ilailafi fi ummati rahmah selayaknya menjadi jargon yang diusung semua komutasi keagamaan.

Satu hal yang harus menjadi acuan adalah setiap komunitas yang melakukan perayaan maulid harus berupaya maksimal untuk menjadi komunitas "ulama yang menjadi pewaris para nabi".

Setiap komunitas harus menciptakan anggotanya memiliki karakter siddiq, amanah, tabligh dan fatonah, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Dengan memiliki karakter dan sifat-sifat tersebut maka setiap individu muslim dari setiap komunitas akan memiliki integritas yang bisa diandalkan dalam melakukan aktivitas kesehariannya.

Tak akan ada lagi birokrat muslim memanipulasi jabatannya untuk kepentingan diri dan keluarganya, tak ada lagi politisi yang mengumbar janji saat pemilu lalu mengabaikannya setelah dapat kursi, tak ada lagi pengusaha yang tega menggaji pegawainya setelah keringatnya kering dengan upah yang jauh dari kecukupan, tak ada lagi buruh yang mogok kerja karena memperjuangkan haknya yang dikebiri, tak perlu lagi UU Anti Pornografi karena umat sudah paham mana yang baik dan yang buruk, tak perlu ada lagi UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena suami atau kaum pria menghargai dan menghormati wanita dan istrinya, tak perlu ada lagi kelompok keagamaan yang mengatas namaka Tuhan berbuat kerusakan terhadap kelompok keagamaan yang lainnya.

Semua berjalan pada takdirnya masing-masing, semua berjalan sesuai sunnatullah sehingga tak penting lagi siapa yang menjadi sosok duplikasi Nabi Muhammad yang memimpin dunia modern seorang individu ataukah sebuah institusi karena setiap orang tau hak dan kewajibannya sebagai makhluk Tuhan.

Masalahnya sekarang siapa yang paling kompeten menerjemahkan atau membumikan perilaku Nabi Muhammad yang secara kontekstual sesuai dengan prototipe budaya keindonesiaan, khususnya di wilayah Cirebon. Semua muslim yang mempunyai integritas mempunyai peluang pasti bisa melakukan halini, tapi tampaknya akan lebih afdol jika dimulai dari para budayawan dan seniman, karena komunitas ini relatif mempunyai kepekaan dalam membaca zaman.

Mas Chaerul Salam dan Pak Abdullah Ali telah memulai dengan gagasan-gagasannya melalui media massa di tingkat

regional, juga Cak Nun di tingkat global yang, dengan penuh khidmat melantukan puisi sembari berdoa...” Muhammadkan hamba ya Rabb”. Wallahu’alam***

Haji dan Kesalehan Sosial

Dalam suatu syukuran haji, Kyai Ayip Muhammad bin Syeh menceritakan pengalamnnya ketika melakukan ibadah haji beberapa tahun lewat. Ia sebutkan bahwa warisan abadi dari pengalaman spiritual haji yang masih nempel dalam kesehariannya adalah melaksanakan salat berjamaah. Beliau selalu mengusahakan untuk tidak *munfarid* (sendirian, Red.), dalam menunaikan salat wajib yang hanya tujuh belas rakaat sehari itu.

Kemudian dalam akhir ceramahnya beliau mengajak para calon jamaah haji untuk selalu melaksanakan salat berjamaah secara baik dan benar. Dan seperti biasanya, ajakan atau himbauan dari kyai kharismatik yang menjadi panutan umat dan terkadang menjadi sumber inspirasi bagi gerakan pemuda dalam memerangi kemaksiatan di kota wali ini terasa sederhana dan mudah tetapi memiliki kedalaman makna yang tidak terukur jika disikapi secara jernih dan dilaksanakan secara maksimal.

Shalat berjamaah dilakukan dengan baik dan benar, artinya melakukannya dengan tata cara yang telah dicontohkan Rasulullah, termasuk makna yang dikandungnya. Berjamaah berarti ada imam dan ada makmum, diantara keduanya harus mengambil posisi secara proporsional. Kapisitas imam dalam beberapa segi harus melehihi makmum. Hal ini akan menimbulkan rasa hormat dan segan makmum terhadap imam sehingga proses salat berjalan dengan lancar dan khidmat.

Di sisi lain makmum harus tetap mengawasi imam secara cermat dan siap melakukan kritik (dengan cara bertasbih untuk laki-laki atau menepuk tangan bagi wanita). Seseorang yang masbuk harus mengambil posisi menjadi makmum ketika memasuki sebuah masjid, tidak diperkenankan untuk salat sendirian.

Kalau saja pergaulan sosial suatu masyarakat terkondisi dalam situasi berjamaah, maka dipastikan akan muncul suatu masyarakat yang masing-masing tahu hak dan kewajibannya, masyarakat yang sangat menghormati hukum dan perundang-undangan. Terjadi hubungan harmonis antara anggota masyarakat, dengan pemerintah atau dengan komunitas lain di luar wilayahnya.

Pemerintah sebagai imam adalah sosok yang diberi amanat oleh rakyat untuk mengurusi kebutuhan rakyat mempunyai kelebihan (minimal punya kekuatan) harus siap untuk "diteriaki tasbih" oleh rakyatnya jika melakukan kealpaan, dan sebaliknya rakyat sebagai yang dipimpin menyadari sepenuhnya posisi yang melekat dalam dirinya, membantu program pemerintah demi kesejahteraan semua.

Adalah wajar jika para calon haji (juga yang telah menunaikan haji) sebagai komunitas yang telah dianugrahi nikmat yang besar dari Allah untuk menjadi barisan terdepan dalam menegakkan salat berjamaan ini.

Puncak kenikmatan

Ibadah haji yang merupakan rukun islam, kelima adalah suatu kenikmatan yang tiada tara bagi perjalanan hidup seorang muslim. Sebab tidak ada yang melebihi kenikmatan berdekatan secara fisik dengan *baitullah* yang menjadi kiblat dalam penunaian salat sepanjang hidup. Tidak ada kenikmatan yang melebihi "perjumpaan langsung" dengan Rasullulah (meski hanya makamnya) yang kita sebut namanya dengan penuh kerinduan dan kecintaan sepanjang hayat kita, menapaktilasi tempat-tempat bersejarah yang telah ditempuh Rasul dengan para sahabat-sahabatnya dalam meninggikan *kalimatullah* serta mengangkat harkat kemanusiaan.

Sebagai rukun yang terakhir tanpa bermaksud lebih mementingkan satu rukun dari lainnya maka haji memiliki dimensi yang paling lengkap, teristimewa dari segi ekonomi sosial politis. Karena bila dicermati pelaksanaan haji ini merupakan *show of*

force atau pameran kekuatan eksistensi umat Islam di panggung dunia. Hanya sayangnya dimensi yang berpotensi untuk menyatukan umat Islam dunia ini tidak berfungsi maksimal beberapa tahun (bahkan mungkin selama puluhan tahun) sekarang ini.

Padahal jika melihat sejarah Nabi dan para sahabat dulu, pelaksanaan haji ini dimanfaatkan untuk mengadakan aktifitas-aktifitas sosial, misalnya *rekrutmen* anggota baru yang berasal dari suku-suku di luar kota mekah atau mengadakan konsolidasi dengan kelompok suku yang telah memeluk Islam dan sebagainya, tanpa mengurangi kekhusuan ritual ibadahnya. Itu juga dilakukan oleh kekhalifahan pasca sahabat. Menggalang persatuan dan kesatuan *umatan wahidah* di pelosok dunia dalam rangka mewujudkan tujuan diturunkannya *dinul Islam* sebagai *rahmatan lil alamin.*

Berebutnya para jamaah haji ketika mencium hajar aswad seperti yang kerap diceritakan para jamaah Indonesia (yang selalu mengalah karena fisik yang relatif kecil dibandingkan dengan jamaah dari negara lain) mencerminkan bahwa dimensi sosial politis dari ibadah ini kian jauh dari yang diharapkan oleh agama. Umat Islam telah terkotak-kotak oleh paham kebangsaan yang sempit, dan berlomba adu cepat memperoleh tiket masuk ke surga tanpa memperdulikan nasib saudara-saudaranya di negara lain yang jangankan untuk ongkos naik haji, untuk menjalani kehidupan ekonomi keseharian saja sangat susah atau harus mengorbankan segenap harta, keluarga bahkan nyawa seperti yang terjadi pada muslim Chechnya. Bantuan doa di Multazam tidaklah cukup untuk membebaskan mereka dari ketertindasan ekonomi dan dari penghinaan serta penganiayaan harkat ke manusiaan yang dilakukan oleh serdadu Rusia.

Kultur Indonesia

Di masa pergerakan dulu orang-orang yang telah melaksanakan haji mayoritas memiliki kualitas sosial yang sedikit banyak mewarnai perjalanan masyarakat dan bangsanya.

Pengalaman spiritual yang diperolehnya di Tanah Suci dijadikan landasan untuk berbuat lebih banyak lagi bagi lingkukannya.

Agus Salim, Mohammad Natsir, Ahmad Dahlan, mereka adalah beberapa contoh dari sekian banyak tokoh yang penyandang status haji yang ikut memberikan warna terhadap perjalanan republik ini, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial. Kemudian di era revolusi fisik ketika melawan agresi Belanda, yang berdiri di barisan terdepan dan memegang kendali komando untuk berjihad adalah "kyai-kyai kampung" yang pernah melakukan *wukuf* di Arafah, yang kemudian karena kerendahan hatinya tidak meminta tanda jasa kepada pemerintah ketika Indonesia bebas dari tekanan penjajah dan memilih kembali menjadi kyai kampung, menjaga status kehajian yang diberikan oleh masyarakatnya dengan memberikan pengajaran serta ketauladanan. Sebab status haji (sekali lagi yang diberikan oleh masyarakat bukan klaim dirinya) bagi kyai kampung adalah suatu status yang tidak membuatnya tentram, suatu status kehormatan yang harus dipertanggungjawabkan baik di tengah masyarakat maupun di tengah proses hisab di akhirat kelak.

Sosok haji adalah manusia yang telah diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk berkunjung ke rumah-Nya, diberikan nikmat yang tidak semua orang bisa mengucapnya. Sehingga wajar jika seorang haji mempunyai tanggungjawab sosial yang lebih besar dibanding yang bukan haji. Adalah suatu keharusan pembelaan kaum fakir, orang-orang lemah (atau dilemahkan), orang-orang teraniaya dilakukan oleh barisan orang yang pernah *ber-thawaf* di Ka'bah dan melakukan jumrah pertanda penolakan terhadap kezhaliman dalam bentuk apapun. Tidak bisa mengalihkan tanggungjawab ini kepada pemerintah semata melalui program JPS yang banyak dimanipulasi itu.

Pertanggung jawaban status haji di depan pengadilan Tuhan tidak kalah beratnya. Sebab sesuai dengan hukum keseimbangan, bahwa seseorang yang mendapatkan laba besar dalam usahanya pasti juga akan menanggung resiko yang besar pula. Misalnya

orang yang berhaji mendapatkan pahala yang sangat besar dalam melaksanakan salat (satu hadits menyebutkan bahwa shalat di Masjidil Haram dan Nabawi memperoleh pahala ratusan bahkan ratusan kali lipat dibanding salat di masjid lainnya).

Ketika seseorang telah menunaikan ibadah haji maka hanya ada satu jalan baginya, menjadi orang yang menghidupkan syiar Islam atau sebaliknya. Karena karakter masyarakat kita masih memegang kuat asumsi bahwa haji merupakan barometer agama dalam pergaulan di masyarakat. Masyarakat akan cepat menimpakan argumentasi kehidupan keberagamaan serta sosialnya kepada kelompok orang yang bertopi putih ini. Perbuatan-perbuatan anti agama/maksiat yang dilakukan oleh masyarakat terkadang mengambil standar perilaku yang sama-sama diperbuat oleh seorang haji. Pada komunitas masyarakat agragis dimana tinggal seorang haji yang melakukan praktek-praktek riba, mengambil hak orang lain dengan semena-mena atau hal lain yang menyimpang dari etika agama/sosial maka biasanya akan diikuti orang lainnya dengan anggapan hal tersebut tidak merupakan dosa. Beberapa anggota masyarakat, tidak perlu menunaikan salat ketika mengetahui keberadaan seorang haji yang tidak salat dan seterusnya.

Peran IPHI

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia sebenarnya mempunyai peran yang sangat strategis dan menentukan bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang mayoritas dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan, sebab ikatan ini beranggotakan orang-orang dari berbagai macam profesi. Dari mulai birokrat, konglomerat (yang dipastikan orang-orang kaya) sampai yang setengah melarat (menjual tanah dan kekayaannya demi untuk bisa berhaji), kondisi ini menjadikan IPHI suatu organisasi yang berpotensi mengangkat perekonomian masyarakat. Dengan akumulasi dana yang besar dari para anggotanya serta kemampuan manajemen dan moralitas haji juga jalur birokrasi yang dimilikinya maka IPHI sebenarnya

mampu menjadi organisasi sosial dengan jangkauan yang menasional yang memiliki akses yang menginternasional.

Pembenahan tampaknya memang diperlukan untuk mewujudkan IPHI menjadi bukan hanya "organisasi nostalgia ritual" semata, reorientasi organisasi adalah hal yang mendesak sebagai upaya ke arah yang lebih baik, dalam rangka mewujudkan tanggungjawab sosial haji. Kemudian berkaitan dengan pembenahan manajemen, terutama kepengurusannya, sebaiknya dipilih bukan dari kalangan birokrat yang tentunya sangat disibukkan oleh hal-hal kedinasan, di samping dari sisi politis kurang baik bagi perkembangan dan independensi IPHI diharapkan menjadi organisasi yang mempunyai kekuatan melakukan chek and balance terhadap kebijakan yang diambil pemerintah (dalam hal ini Departemen Agama), karena masih terdengar kabar di beberapa wilayah adanya oknum-oknum yang mengutip dana liar dari para calon jemaah haji dengan berbagai dalih.

Di samping menjadi organisasi yang mempunyai kontribusi besar terhadap masyarakat dhuafa dan peka terhadap persoalan-persoalan sosial yang berkembang di masyarakat, juga harus terus dilakukan upaya penyadaran intensif kepada para anggota bahwa haji bukan merupakan akhir (penutupan/penyempurna) dari rukun Islam, yang berasumsi bahwa haji adalah tiket menuju surga tetapi justru predikat haji merupakan beban berat, merupakan komitmen moral untuk berkiprah di tengah masyarakat. Disadarkan bahwa kemabruran suatu haji bukan diukur dari intensitas ibadah ritual individu semata, melainkan diukur dari sejauh mana kontribusi yang dapat diberikan kepada lingkungannya. (Rasulullah mengancam akan mengeluarkan seorang muslim, yang telah berpredikat haji sekalipun, dari kelompok kaumnya manakala melihat tetangganya kelaparan tidak merespon dengan baik).

Jalan Tasauf: Upaya Penyelesaian Konflik

Pernyataan A.W. Wilson dalam bukunya "*Against Religion: Why We Should Try to Live Without It*" yang mempertanyakan peran agama bagi manusia kembali menohok nurani kita melihat fenomena keberingasan massa nyaris terjadi hampir setiap hari di beberapa bagian republik yang menewaskan ratusan orang, republik yang semua penduduknya beragama.

"Agama bukan sekadar candu rakyat seperti yang dilansir oleh Marx, bahkan lebih berbahaya lagi. Agama tidak membuat orang tertidur. Agama mendorong orang untuk menganiaya sesamanya, untuk mengagungkan perasaan dan pendapat mereka sendiri atas perasaan dan pendapat orang lain untuk mengklaim bagi diri mereka sendiri sebagai pemilik kebenaran. Dengan demikian apa gunanya beragama bagi suatu bangsa jika peperangan, kebiadaban masih menjadi bagian kehidupan bangsa tersebut?" Itulah inti pendapat dari seorang novelis dan wartawan Inggris ini.

Dengan arif para cendikiawan agama memperbaiki sekaligus menyanggah pernyataan di atas, bahwa kesalahan bukan terletak pada agamanya melainkan para pemeluknya. Sebab kebenaran agama bersumber dari Yang Maha Benar sehingga pasti benar, kalaupun terjadi kesalahan, dikarenakan kelemahan tingkat pemahaman pemeluknya. Atau implementasi ajaran agama tidak sesuai dengan sumber asli yang dicontohkan nabi, sang pembawa risalah. Jadi yang diperbaiki adalah tingkat apresiasi dan kesungguhan umat beragama dalam melaksanakan perintah agama.

Terlepas dari adanya ulah provokator atau elit politik yang bermain, sebenarnya kerusuhan tersebut tidak perlu terjadi jika nilai-nilai moral agama berurat-berakar dalam kehidupan

masyarakat. Sebab tidak ada sebuah agama pun yang memerintahkan pemeluknya berbuat kerusakan di muka bumi ini, bahkan sebaliknya harus menjadi pengelola/pemakmur bumi. Hampir semua agama (di Indonesia) mempunyai kesamaan pandangan dalam hal moralitas, artinya semua perintah dalam agama apapun akan berujung pada penciptaan atau pencapaian moral para pemeluknya. *Innama buistu li utammima makarimal akhlak* (aku-kata Nabi Muhammad SAW, Red-diutus Allah semata-mata untuk memperbaiki moral). Juga perintah Nabi Isa AS yang memerintahkan umat Nasrani menebar kasih di bumi, demikian juga perintah-perintah dari sang pembawa risalah agama lainnya yang dipastikan senada mengindikasikan bahwa moralitas luhur adalah kesamaan tujuan dari semua agama.

Moralitas *ihsan* (orangnya disebut *muhsin*) merupakan moralitas yang tertinggi, karena orang yang telah memiliki moralitas ini mempunyai kedekatan yang luar biasa dengan Allah, setiap perilakunya akan senantiasa merasa dilihat-Nya. Sehingga setiap tindakan dalam bergaul dan bermasyarakat akan memakai ukuran/standar yang telah ditetapkan Allah. Orang seperti ini mustahil akan berbuat kerusakan di muka bumi, menganiaya manusia lain apalagi membunuhnya.

Memandang manusia sebagai makhluk Allah yang mempunyai hak hidup, hak memilih kepercayaan yang dianut, hak bertempat tinggal, hak berekonomi dan lainnya bukan memandang manusia dengan ukuran seagama atau tidak. Fanatisme agama (yang sempit) berubah menjadi fanatisme terhadap Allah dengan senantiasa menunaikan perintah-perintah Nya secara maksimal.

Untuk mencapai derajat ihsan, jalan yang terbaik adalah dengan melakukan *tazkiatun nafs* (penyucian jiwa). Dalam terminologi Islam metode penyucian jiwa dikenal dalam disiplin *tasauf*. Sebab dari sejarah kita bisa melihat bahwa para nabi sebelum menerima risalah dipastikan melalui kontemplasi (perenungan), menahan diri (berpuasa) dari makanan haram juga dari perbuatan-perbuatan mencela manusia lain, dan itu semua

merupakan jalan tasauf.

Tasauf itu sendiri bisa diartikan dengan membersihkan jiwa, mendidik dan mempertinggi derajat budi, menekan segala ketamakan dan keserakahan, memerangi hawa nafsu yang berlebihan untuk kesejahteraan diri (Prof. Dr. Hamka, *Tasauf Modern*). Beberapa kiat untuk mencapai kesejahteraan diri (pada gilirannya juga akan memunculkan kesejahteraan masyarakat, sebab masyarakat terdiri dari beberapa individu) di antaranya adalah:

1. Motivasi yang kuat serta menyesali kesalahan (jihad dan taubat). Manusia terdiri dari rohani dan jasmani, keberhasilan seseorang dalam kehidupan didominasi oleh kesehatan rohani. Bahkan dalam dunia medis dikenal banyaknya penyakit yang muncul karena berawal dari tidak bersihnya kehidupan rohani seseorang.

Niat seseorang dalam melaksanakan keinginan akan berpengaruh terhadap keberhasilan tujuan yang diinginkannya tersebut. Begitu halnya dengan jalan tasauf harus dimulai dengan mujahadah sehingga rintangan sebesar apapun akan dipandang kecil. Manusia adalah makhluk yang sarat dengan kekhilafan, artinya khilaf adalah fitrah manusia yang pada kadar tertentu justru menjadi kemuliaan dirinya (selama dia mawas diri dan melakukan taubat, tidak melakukan kesalahan yang sama secara sengaja).

2. Berpuasa (menahan diri dari sesuatu yang halal dan berlebihan). Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta nafsu syahwat menurut waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Menahan diri mengkonumsi makanan yang baik (dari segi sumber perolehannya maupun dari segi kualitasnya) akan membentuk kepribadian seseorang yang bersolidaritas tinggi terhadap lingkungannya. Akan bersikap menahan diri dari prilaku konsumtif yang berlebihan meskipun dia mampu untuk itu. Dengan melakukan rutinitas puasa Senin dan Kamis misalnya, akan sangat bermanfaat bagi pencapaian derajat ikhsan.

3. Khalwat dan uziah dalam rangka menyembah Allah. Melakukan

khalwat dan uzlah adalah menyendiri dan mengasingkan diri dari pengaruh duniawi untuk menumbuhkan perasaan cinta pada Allah. Proses ini dilakukan setiap hari pada tengah malam atau pada sepertiga malam dengan mengerjakan salat malam (tahajud) dengan khusyuk. Di saat orang
tengah tidur lelap, memohon dan meminta kepada Allah ketenangan jiwa, ketentraman pikiran dan kemurnian hati,

4. Dzikir dan doa (menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya). Memperbanyak *istighfar*, *tasbih, tahmid, takbir, tahlil* dan ucapan yang sejenis. Dengan itu akan membersihkan jiwa kita dari kerak-kerak dunia yang tidak perlu (arogan, dengki, tamak, berbohong dan sebagainya). Segala kelebihan dan kekurangan yang dipunyai dikembalikan kepada Tuhan selaku pemilik serta penguasa jagat raya dan seisinya.

Melakukan dzikir, baik lisan maupun dalam hati tidak harus dalam. waktu yang khusus, melainkan bisa dilakukan di sela aktifitas rutin dalam keseharian manusia, bekerja misalnya. Kemudian membiasakan berdoa dalam melakukan setiap perbuatan seperti dicontohkan Rasullah, akan senantiasa meninggatkan kita tentang keberadaan Allah dalam hidup dan kehidupan kita.

5. Membaca al-Quran dengan khusyuk. Membaca al-Quran dengan khusyuk, baik mengetahui artinya atau tidak akan akan membawa seseorang kepada ketenangan jiwa dan ketentraman hati (seperti yang diungkap oleh Dr. Quraish Shihab dalam buku *Mukjizat al Quran*).

Kelima jalan tasauf di atas jika ditekuni dan dilaksanakan secara intens maka akan memunculkan sosok manusia yang semua karakter serta prilakunya mencerminkan sifat-sifat ilahiah. Sosok hamba Allah (Abdullah) menyerap sifat-sifat Tuhannya, sifat pemurah (al Karim), pemaaf (al-Afwu), adil (al-Adl), cerdas (ar-Rosyid), penyabar (ash-Shobur), kreatif (al-Bari'), mandiri (al-Qoyyum) adalah beberapa prilaku yang dipunyai seorang muhsin. Itu adalah prilaku atau karakter dasar yang harus dipunyai oleh suatu masyarakat yang menghendaki bangsa dan negaranya maju.

Anggapan sementara orang bahwa tasauf justru menjadi sesuatu yang *contra productive* bagi kemajuan suatu masyarakat atau negara sebenarnya tidak mempunyai landasan yang jelas. Mereka bersikap apriori lebih disebabkan karena belum mengetahui atau membaca literatur tasauf dengan baik, atau mungkin mereka mengetahui bahwa biasanya tasauf dianut oleh sekelompok orang yang hidupnya *eksklusif*, jauh dari kehidupan masyarakat umumnya (beberapa literatur tasauf akan menjawab tentang kesalahpahaman, di antaranya *Tasauf Modern-nya* Hamka atau *Risalatul Qusyairiyah*-nya Imam al Qusyuairy an Naisabury).

Konsep khalwat dan uzlah dalam tasauf tidak harus dilakukan di tempat-tempat yang jauh dari pergaulan dan rutinitas kehidupan manusia umumnya, tetapi dengan melakukan salat malam pada tengah malam buta saat orang sedang tertidur lelap kiranya cukup memadai sebagai metode olah batin yang efektif sebagai sarana pendekatan kepada Sang Khalik.

Juga adanya anggapan bahwa jalan tasauf harus dipimpin oleh seorang syaikh atau tasauf merupakan monopoli para santri yang mendalami ilmu-ilmu agama dan mempunyai intelektualitas dan pengetahuan agama tertentu. Bahkan adanya anggapan bahwa penempu jalan tasauf harus membayar biaya cukup mahal (seperti sekarang banyak dilakukan lembaga-lembaga keagamaan beberapa kota besar yang menawarkan paket tasauf bertempat di hotel berbintang) adalah sesuatu yang kurang tepat. Upaya pendekatan seorang hamba kepada penciptanya bersifat langsung tidak harus melalui "perantara". Metodologinya telah digariskan dan dicontohkan oleh Rasulullah, tinggal niat yang kuat dan keikhlasan diperlukan untuk keberhasilannya.

Konsep zuhud dalam tasauf bukan berarti seseorang harus membenci harta dan dunia, justru sebaliknya harus mencari harta kekayan untuk menopang diri, masyarakat dan agamanya. Hanya saja doktrin yang dipegangnya adalah lebih mencintai pemberi nikmat dari pada nikmat itu sendiri, lebih mencintai Allah sebagai pemberi harta kekayaan dari pada kekayaan yang telah

diperolehnya, sehingga apapun aktifitas dunia yang dilakukannya dalam rangka kecintaannya kepada Allah bukan berdasarkan pemuasan hawa nafsunya belaka.

Sudah waktunya juga kurikulum pendidikan agama di sekolah yang pekat warna verbalismenya (menonjolkan hapalan, dan memperlakukan agama sebatas pengetahuan belaka) diganti dengan pendekatan tasauf (kristalisasi melalui penghayatan dan pengamalan yang intens) sehingga akan terbentuk pribadi-pribadi yang cerdas trampil dan memiliki moralitas yang jujur, demokratis, santun, etos kerja baik. Mencegah mereka berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan tawuran, perusakan fasilitas umum dan prilaku destruktif lainnya.

Kinerja Polisi dan Kemiskinan Materi

Guru besar Emiritus Universitas Diponegoro Semarang Sajipto Raharjo , pernah menyatakan keprihatinan tentang Indonesia sebagai negara hukum tetapi tidak mempunyai sarana dan prasarana memadai untuk menegakkannya . Contoh yang paling jelas adalah berkenaan dengan layanan hukum yang diterima rakyat , bahwa rakyat Indonesia (sebagian besar) dilayani oleh polisi polisi yang dari status ekonomi bisa dikatakan sangat marginal. Polisi-polisi miskin ini merupakan ujung tombak atau contoh mencolok kinerja polisi .Disebut ujung tombak dan menjadi parameter bagaimana kualitas kerja polisi secara umum , karena polisi-polisi yang langsung berhadapan dengan masyarakat ,bekerja di lapangan, melayani kebutuhan akan situasi aman dan tentram adalah para polisi berpangkat rendah yang dilihat dari sisi ekonomi memiliki pendapatan/gaji yang sangat minimal

Dengan gaji yang sangat minim dan beban pekerjaan yang bisa dikatakan cukup berat dengan indikasi rasio jumlah polisi jauh lebih sedikit dibanding jumlah penduduk maka tidaklah harus dibuat heran jika ada beberapa oknum polisi yang mau bekerja melayani masyarakat jika terlebih dulu diberi imbalan. Dengan biaya operasional yang sangat sedikit , tidaklah harus dibuat bingung ketika polisi agak terlambat menuju tempat TKP yang agak jauh dan memerlukan biaya transportasi.

Pola pendidikan kasus kejahatan serta prosedur pelaporan sebagai aparat keamanan yang melakukan penyidikan dan penyelidikan, dan minus dari pembentukan moralitas serta tugas sebagai makhluk Tuhan yang menegakkan keadilan di muka bumi, menjadikan sebagian polisi beberapa bulan saja usai mengikuti pendidikan terkesan menghalalkan berbagai cara dalam rangka memporoleh tambahan pendapatan bagi keluarganya. Idealisme,

kehormatan serta kebanggaan citra sebagai penegak hukum kadang digadaikan untuk kepentingan ekonomikan di kepolisian yang cukup singksat, dengan hanya memfokuskan pola internalisasi standar kepolisian dalam menanggulangi

Film-film yang bertema sentral *`good cop bad cop`* , terjadinya pertarungan antara polisi baik dan polisi jahat dalam sebuah intuisi kepolisian, meski berakhir dengan kemenangan polisi baik seperti lazimnya sebuah film tetapi dampak kerusakan yang diakibatkan kejahatn seorang polisi sangat berpengaruh pada *`public negative opinion`*. Dalam dunia realistis, kasus penanganan respresif yang dilakukan oleh beberapa polisi terhadap mahasiswa di Makasar diibaratkan hujan sehari menghapuskan kemarau setahun. Upaya mengikis habis *public image* terhadap pola militeristik kepolisian yang dilakukan yang dilakukan bertahun–tahun terkesan percuma. Demo mahasiswa dan kalangan kampus merebak hampir di seluruh antero nusantara

Pernyataan yang kemudian muncul adalah, dari sisi ekonomi benarkan polisi kita miskin ? seberapa kuatkah korelasi kemiskinan yang dialami para polisi dengan kinerja mereka ? Benarkah paradigma aparat kepolisian kita tetap tidak beranjak dari gaya meliteristik meski telah berpisah dengan TNI setelah beberapa tahun ke belakang ?

Superioritas dan subordinasi dengan yang dimiliki dalam bidang keamanan, ditambah dengan keleluasaan menggunakn senjata api maka jabtan polisi memang sangat rentan terhadap manipulasi, baik oleh individu polisi itu sendiri maupun pemanfaatan oleh penguasa, baik pemerintah para pelaku bisnis.

Kooptasi yang dilakukan oleh para penguasa (dengan mengatasnamkan stabilitas, kelangsungan dan keamanan negara,ekonomi) menjadikan cara polisi sebagai penegak hukum di mata masyarakat sangat buruk. Polisi bukan bagian dari masyarakat, bahkan di beberapa wilayah masyarkat antisipasi terhadap polisi. Dampak langsung yang dialami polisi adalah sulitnya menagkap kaus kejahatan atau menjaga ketertiban

lingkungan. Hal ini pernah dialami selam retim orde baru.

Sangatlah fatal memang jika kepolisian yang merupakan bagian dari aparat yudikatif berada di bawah subordinat eksekutif suatu pemerintahan demokrasi, fungsi yudikatif sebagai pilar demokrasi yang melakukan separatis sekaligus mengoreksi kemudian mengajukannya ke mahkamah pengadilan terhadap penyimpanan yang dilakukan oleh aparat eksekutif dan legislatif. Dalam menjalankan fungsinya polisi tidak mengabdi kepada presiden selaku pemimpin eksekutif, meski dipilih dan dilantik oleh presiden. Polisi adalah abdi hukum sekaligus abdi rakyat, yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan di tengah masyarakat.

Persoalan sejauh mana independensi polisi dalam menjalankan fungsinya berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah (politikus, pelakubisnis atau yang lainnya) menjadi sorotan tajam berbagai kalangan, karena realitas yang ada menyebut bahwa kecerdasan dan kepiawaian polisi dalam mengadakan penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus-kasus seperti ini memang terkesan idak maksimal. Kaburnya penjahat pejahat *whIte scholar* yang membobol bank di Singapura negeri tetangga dekat yang kebetulan tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, mengindikasikan hal tersebut.

Berbicara soal kesejahteraan polisi maka jujur saja seperti umumnya polisi di negar negara berkembang lainnya, kesejahteraan polisi bisa bisa dikatakan tidak memenuhi syarat bagi keajegan profeionalitasanya, sehingga analisis Sajipto Raharjo tentang kinerja polisi yang rendah sangatlah beralasan. Sebab diakui atau tidak salah satu syarat tegaknya sebuah profesi adalah penghargaan yang memadai terutama penghargaan ekonomi.

Dengan kewenangan yang dimiliki serta keawaman masyarakat tentang hukum ,mudah sekali bagi seorang polisi terjebak dalam permainan pungli, pungutan liar atau pungutan siluman lain yang kondraktif dengan penegakan hukum yang justru menjadi tugas utamanya. Praktik-praktik pungli seperti di atas

akan sangat minimal kejadiannya, bahkan mungkin tidak akan terjadi jika kesejahteraan polisi terjamin.

Penyerbuan polisi ke kampus mahasiswa di Makasar beberapa waktu lalu bila disikapi secara arif dan dipikir lebih matang sebenarnya bukan terletak pada pola militeristik atau tidaknya kepolisian, terapi adanya *`esprit the corps`* atatu semangat kesatuan yang ada diantara polisi, dan itu manusiawi, sangat manusiawi, Sama halnya seorang sipil yang tinggal disuatu desa akan muncul semangat menyerbu desa tetangga yang menganiaya orang yang tinggal sedesa dengannya. Bagaimana polisi adalah sosok manusia yang punya perasaan, ikatan pertemanan, kesetiakawanan apabila salah seorang dari mereka ditengarai akan dianiaya. Dan jujur saja kasus Makasar menjadi `besar` karena *technologi effect,* opini publik tentang pola pendekatan militer istik polisi terbentuk dengan tayangan penyerbuan yang berdurasi hanya beberapa menit tersebut dan ditayangkan oleh hampir semua media massa nasional.

Kebijaksanaan sejati.

Kata polisi berasal dari Bahasa Inggris *police* yang bisa jadi berasal dari akar kata *policy* atau *police* yang berarti kebijaksanaan atau kesantunan. Kalau menganalisis ini benar maka cukup beralasan jika komunitas polisi adalah komunitas yang di dalamnya merupakan manusia-manusia pilihan. Sosok polisi adalah sosok yang sangat mencintai kebijaksanaan, yang oleh hampir semua filosof disebut-sebut sebagai manusia utama. Sosok polisi adalah sosok yang dalam menjalankan tugasnya selalu mengedepankan kesantunan bukan dengan menggunakan kekerasan.

Mengacu pada kebijaksanaan dan kesantunan maka memang sudah sewajarnya jika polisi yang merupakan bagian dari masyarakat memposisikan dirinya sebagai teladan dalam keseharian di lingkungannya, menghargai dan mencintai ilmu karena kebijaksanaan tanpa ilmu akan tersesat, kewenangan dan

kekuasaan yang dimiliki polisi tanpa dilengkapi dengan ilmu dan kesantunan hanya akan memunculkan manusia destruktif yang mementingkan diri dan golongannya semata. Untuk itu pendidikan dan pembinaan dalam polisi memang harus dilengkapi dengan ajaran-ajaran moral di samping kemampuan sebagai penegak hukum serta hal-hal lain yang mendukung profesionalisme polisi lainnya.

Kemiskinan material yang dialami selama ini akibat anggaran belanja negara yang memang tidak mencukupi (akibat di korupsi oleh oknum birokrat atau diboyong oleh pengusaha keparat ke Singapura) tidaklah berarti apa-apa apabila para polisi memiliki kekayaan moral dan kearifan bahwa ketika negara ini bersih dari tikus busuk maka belanja negara pun akan memadai untuk memberikan gaji polisi secara layak. Keberanian dan kejelian polisi untuk menyelidiki para tikus dan menyeretnya ke pengadilan sangat dibutuhkan untuk mencapai kondisi tersebut.

Asumsi bahwa kualitas polisi tergantung kepada kondisi masyarakat dengan melandaskan argumentasi karena secara personal polisi merupakan elemen dari masyarakat sebaiknya disikapi secara kritis oleh segenap anggota polri. Bagian dari masyarakat adalah benar, tetapi sebagai profesi yang sangat menentukan maju mundurnya kondisi hukum yang merupakan syarat mutlak bangsa beradab maka tidaklah terlalu salah jika dalam beberapa hal, utama dalam hal-hal yang buruk polisi menjadi filter, bahkan agen pengubah.

Julukan sebagai bangsa yang memiliki peringkat nomor 1 di bidang korupsi dengan tingkat kejahatan intelektual dan kejahatan fisik yang memprihatinkan, institusi kepolisian menjadi salah satu institusi yang diharapkan dapat mengembalikan Indonesia menjadi negara yang bersih dan menjadi tumpuan para investor untuk mengembangkan kapital nya secara maksimal. Sebagai negara yang aman dan tentram serta surga bagi bangsa-bangsa lain untuk
menikmati kebudayaan daerah. Suatu kerja besar yang

membutuhkan energi tidak sedikit memang, tetapi dengan makin majunya teknologi serta didukung kian banyaknya personal kebersihan dari generasi muda pasca reformasi yang dipastikan mempunyai idealisme, kreativitas, intelektual, dedikasi serta wawasan yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya maka tugas besar itu dapat diselesaikan.

Dengan idealisme yang tinggi serta wawasan yang baik maka kemiskinan atau kekuatan menjadi miskin bukan lagi menjadi penghalang dalam menegakkan *Justice for all.* Selamat berulang tahun pak polisi, selamat bertugas, Tuhan selalu beserta anda.

Perkosaan Dalam Perkawinan

(Dari Perspektif Agama dan Budaya)

WARNING...!! Terutama bagi Anda para suami yang kerap menyakiti istri atau orang tua yang suka menelantarkan anak-anaknya. Penjara maksimum 12 tahun/denda 30 juta atau 3 tahun penjara/denda 15 juta akan dijatuhkan oleh hakim di pengadilan bila memang terbukti Anda melakukan kesalahan tersebut.

Ketentuan tersebut telah disahkan dan mulai diundangkan di negeri ini lebih dari sebulan yang lalu (tepatnya 14 September 2004), dan dikenal dengan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Terlepas dari kontroversi terhadap beberapa pasal yang ada di dalamnya, segenap elemen masyarakat di republik yang setiap warga negaranya diwajibkan memeluk salah satu agama ini mesti bersyukur atas disahkannya Undang-Undang ini. Karena setiap agama selalu mengajarkan keadilan, kesetaraan untuk setiap makhluk Tuhan, tidak ada sebuah agama pun yang di dalamnya mentolerir diskriminasi ras, jenis kelamin, status sosial dan hal lainnya.

Setiap manusia lahir sesuai fitrahnya, suci dan memiliki kemampuan dasar serta hak yang dititipkan melalui jasadnya. Ketika tuhan meniupkan ruh kepada setiap manusia, dari jenis kelamin atau kebangsaan apa pun, maka pada saat itu (bayi), kemudian menjadi kanak kanak, dewasa berumah tangga, maka tidak seorang manusia pun yang boleh merendahkan dengan alasan apa pun hak-hak kemanusiaan yang dimilikinya. Tuhan juga membekali setiap makhluk ciptaannya untuk bebas berkehendak dan bertindak, termasuk menggugat ketika hak-hak nya dizhalimi oleh orang lain.

Budaya patriarki yang sangat menjunjung superioritas

lelaki di satu sisi, serta menafikan hak-hak, bahkan merendahkan derajat kaum wanita (dan anak-anak) disisi yang lain dan akut diidap oleh semua etnis yang berada di Indonesia selama sepuluh tahun ini, menjadikan keberadaan UU KDRT ini ibarat oase di padang pasir. Menyejukkan, menentramkan serta harapan akan terbentuknya negara dan bangsa Indonesia yang kuat bukan lagi fatamorgana, karena biar bagaimanapun agama telah memberikan signal, bahkan realitas sosial menyebut, bahwa kuat lemahnya suatu negara sangat tergantung pada keberadaan kaum wanitanya. Jika kaum wanitanya kuat maka akan kuat pula negara, dan sebaliknya, jika kondisi kaum wanita suatu negara tidak dihormati hak-haknya sebagaimana layaknya maka akan lemahlah negara tersebut.

UU KDRT yang terdiri dari 10 dan 56 pasal ini bisa dikatakan komprehensif, minimal jika dilihat dari pembelaan hak wanita dan anak-anak. Di dalamnya diatur bukan hanya tindakan kekerasan yang bersifat fisik, seksual, atau ekonomi, tapi juga soal kekerasan psikis. Artinya ketika seorang istri merasa mengalami teror dari suaminya, mengalami ketakutan, ketidakberdayaan, atau kehilangan kepercayaan diri karena tekanan sang suami, mereka bisa mengadu ke polisi (delik aduan).

Disampingi delik aduan, beberapa pasal dalam UU KDRT juga mengakomodasi adanya delik umum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ini mengindikasikan bahwa jika dulu persoalan kekerasan rumah tangga seseorang, bagaimanapun sadisnya kekerasan itu dapat dilaporkan dari ikut campur pihak luar, maka dengan diundangkannya KDRT ini maka tidak akan lagi ada suami yang berlaku sewenang-wenang kepada istri dan anaknya. Karena orang luar, saudara, tetangga, bisa melaporkan kepada pihak kepolisian tentang perilaku sang suami yang tidak beradab tersebut.

Salah satu point yang menarik dalam UU KDRT dan sempat menjadi pembahasan alot dalam rapat dalam rapat paripurna DPR adalah tentang pasal Marital Rape atau

pemerkosaan dalam perkawinan (Merdeka, 15/9/04). Masuknya Marital Rape meski berbentuk delik aduan merupakan kompromi antara kelompok Islam di parlemen dengan kalangan aktivis LSM. Dalam ajaran Islam, ungkap kelompok Islam di parlemen tersebut, tidak dikenal istrilah *Marital Rape*. Bahkan ada semacam doktrin bahwa seorang istri wajib „melayani" suami jika diminta meski sang istri tidak menghendaki berhubungan badan.

Tapi benarkah dalam ajaran Islam tidak dikenal *Marital Rape*, benarkah ajaran Islam mentolerir pemerkosaan dalam perkawinan, adakah doktrin dalam Islam yang membenarkan seorang istri wajib „melayani" suami jika diminta meski sang istri tidak mengehendakinya?

Kitab kuning yang merupakan dikodifikasi Alquran dan As Sunnah dilakukan oleh para ulama terdahulu hingga saat ini masih digunakan sebagai alat berpikir, berkata dan berbuat. Budaya patriarki menemukan momennya yang pas manakala melihat fakta bahwa para ulama ini terdiri dari atau mayoritas berasal dari kalangan pria, sehingga bias penafsiran atau paling tidak pengambilan tema-tema yang menunjukkan superioritas kaum laki-laki terhadap kaum perempuan tidak terhindarkan.

Di salah satu kitab kuning, Riadhus Shalihin misalnya, terdapat pasal hak suami atas istri yang teks-teks agamanya mencerminkan arogansi laki-laki (suami) dalam kehidupan seks rumah tangga, sementara teks-teks agama yang mengangkat hak perempuan (istri) dalam seks dinafikan.

"Jika suami memanggil istrinya untuk tidur bersama istri menolak, sehingga semalam itu menjadi jengkel (marah) pada istrinya. Para malaikat mengutuk pada istri itu sehingga pagi hari" (Bukhori-Muslim). "Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk suatu hajatnya, maka harus segera disambut, walau ia sedang menjaga masakan di atas api" (Attirmidzi-Annasa"i). Adalah dua teks hadits yang ada di dalam kitab kuning tersebut yang bila dibaca oleh laki-laki muslim yang mempunyai mentalitas lemah, serta sangat sedikit menggunakan rasio akan

cenderung berbuat apa adanya. Mengambil jalan cepat dengan hanya berpegang pada teks hadits tanpa melihat konteks yang melingkupi atau syarat yang harus ada saat teks itu akan diberlakukan.

Sementara teks-teks hadits yang menjunjung tinggi hak kehidupan seks kaum wanita (istri) seperti: "Apabila kamu mengauli istrimu maka janganlah berhenti sebelum istrimu sampai pada klimaksnya sebagaimana kamu juga ingin mencapainya" (riwayat Ibnu Adi), "Rasulullah melarang berhenti sebelum mencapai klimaks" (riwayat Khatib), tidak disertakan dalam pembahasan.

Hal lainnya, banyak sekali teks-teks agama yang menganjurkan kepada kaum pria untuk menghormati dan melindungi kaum wanita (inklusif didalamnya dalam kehidupan seks) serta dilarang menyakitinya (baik secara fisik maupun psikis). Aturan Fiqih yang menyebut bahwa suatu kewajiban wajib ditunaikan manakala syarat yang mendukung tertunaikannya kewajiban itu harus terlebih dulu ada, mungkin harus dijadikan pertimbangan utama dalam kehidupan rumah tangga dan bersifat reprosikal/timbal balik antara suami dan istri.

Larangan suami untuk berlaku menang sendiri dalam melakukan hajat biologisnya dengan berhenti ketika sang istri belum mencapai (maaf) klimaks, bisa jadi merupakan indikasi pemerkosaan. Hanya saja bahasa yang digunakan oleh Rasul dalam kaitannya dengan kehidupan rumah tangga seperti umumnya para utusan Allah- tidak vulgar. Selayaknyalah umat pengikutnya memahami bahwa, kalimat "janganlah berhenti" merupakan larangan yang benar-benar harus diperhatikan demi kesejahteraan dan ketentraman kaum istri yang berperasaan halus.

Sudah saatnya memang Islam didudukkan dalam proporsi yang sebenarnya bahwa Islam tidak mengenal istilah patriarkialisme atau matrianialisme. Umat Islam harus menjadi muslim yang menyeluruh (*kaafah*)

Pengembangan Konsep Pendidikan Integral

Dalam sejarah penumbuhan umat manusia, baik secara tersurat maupun tersirat, dapat ditarik kesimpulan umum bahwa maju mundurnya suatu komunitas masyarakat/bangsa bergantung pada pelajaran dan pendidikan yang berlaku di kalangan mereka. Artinya, kemunduran dan kemajuan bergantung pada ada atau tidaknya sifat-sifat dan bibit-bibit kesanggupan dalam suatu umat yang menjadikan mereka layak atau tidak menduduki tempat yang mulia di atas di dunia ini.

Persoalannya adalah perkembangan budaya yang berbeda antarkomunitas umat mengakibatkan akan berbeda pula "bentuk pendidikan"-nya (terutama dari sisi filosofi yang berkait erat dengan *way of life* yamg dihayatinya). Filsafat materialisme yang dianut bangsa Eropa/Amerika atau filsafat zen/keseimbangan alam yang dianut beberapa negara Taipan di Asia dan kemudian menjadi landasan pendidikannya mengakibatkan masyarakat mereka tumbuh dan berkembang pesat.

Mohammad Natsir, pada tahun 1937 pernah memaparkan konsep pendidikan ideal untuk bangsanya dalam majalah *Pedoman Masyarakat* dengan judul "Tauhid Sebagai Dasar Pendidikan". Bahwa tujuan pendidikan tidak bisa dilepaskan dengan tujuan hidup, artinya tujuan pendidikan adalah tujuan hidup itu sendiri. Dan sebagai bangsa yang beragama maka tujuan hidup (juga tujuan pendidikan) kita adalah penghambaan/pengabdian total kepada Allah. Suatu penghambaan yang mendatangkan kebahagiaan kepada yang menyembah, bukan suatu penghambaan yang memberikan keuntungan kepada yang disembah, penghambaan yang memberi kekuatan kepada yang memperhambakan dirinya itu.

Proses pendidikan yang akan berujung pada munculnya kualitas kemanusiaan yang diharapkan oleh Yang Maha Pencipta mencakup aspek duniawi dan ukhrowi, rohmani dan jasmani, intelektual dan etika budi pekerti, formal dan nonformal, yang ditujukan terhadap diri sendiri maupun keluarga dan masyarakat seutuhnya, dan semua bersifat universal, integral dan harmonis.

Konsekuensi dari konsep ini adalah bahwa hasil/output yang dihasilkan dari suatu proses pendidikan akan memunculkan individu-individu yang mempunyai kualitas kemanusiaan yang mampu membawa diri, masyarakat, bangsa dan negaranya, bahkan dunia umumnya menuju kebahagiaan sejati. Individu yang mampu mewujudkan cita-cita yang merupakan penciptaan yang telah digariskan yakni menjadi pemakmur bumi, seorang manusia Indonesia yang berorientasi kepada masa depan yang lebih baik, berbudi luhur dan berpandangan bahwa setiap orang (apapun status dan profesinya) adalah pendidik serta ikut bertanggungjawab atas keberhasilan pendidikan generasi bangsanya.

Demikian konsep yang diajukan tokoh nasional yang memiliki kemampuan paripurna, yang ketokohannya diakui dunia. Sebuah konsep yang lahir dan muncul dari seorang praktisi pendidikan (guru) yang pernah menjabat perdana menteri negeri ini dan beberapa jabatan prestius lain di tingkat internasional.

Distorsi dan reduksi

Kebangkrutan sosial yang dialami bangsa kita sekarang ini, jika dikaitkan dengan konsep di atas, yakni karena tidak dimilikinya sifat-sifat atau bibit-bibit kesanggupan sebagian besar masyarakat kita untuk menjadi bangsa yang besar, kejujuran serta profesionalisme, kepercayaan serta keteguhan terhadap nilai-nilai sosial (yang kuat dengan nuansa ketuhanan/ketakwaan) yang berkembang atau dikembangkan oleh para pendahulunya, ketergantungan terhadap Yang Maha Kuasa tanpa meninggalkan ikhtiar/amal usaha sebagai ciri kemanusiaan yang hakiki.

Transformasi nilai-nilai luhur atau menumbuhkan sifat/bibit kesanggupan adalah tugas pendidikan, dengan kita tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Tanpa bermaksud mencari "kambing hitam" (istilah kambing hitam tampaknya perlu dikaji kembali keberadaanya, mungkin istilah "orang hitam" perlu dipertimbangkan karena masyarakat kita sekarang ini kerap membakar pelaku kejahatan hingga tubuhnya menjadi hitam gosong, lebih hitam dari kambing hitam yang paling hitam sekalipun, *naudzubillah*) yang paling bertanggungjawab ketidakberhasilan pendidikan adalah pemerintah, karena rakyat telah mempercayakan segenap kepentingannya baik saat ini maupun masa depannya kepada pemerintah.

Seperti terlihat pada umumnya, rakyat di negara yang baru terbebas dari penjajahan, mayoritas rakyatnya berpendidikan sangat rendah dan mempercayakan nasib mereka kepada pemerintah yang dipastikan terdiri dari orang-orang pintar, mereka siap menderita demi mematuhi kebijakan yang telah digariskan pemimpinnya, siap makan dengan jenis makanan yang tidak baik makan atau berpakaian dari karung goni sekalipun, seperti yang terjadi pada pemerintahan tokoh kharismatik yang diakui eksistensinya oleh pemimpin dunia, Bung Karno.

Dinamika politik dan (cara-cara melanggengkan) kekuasaan yang terjadi era Pak Harto, sedikit banyak mempengaruhi pada pola dan sistem pendidikan yang diambil. Meski secara tersurat dikehendaki pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya seperti tercantum dalam undang-undang pendidikan nasional yang mengindikasikan adanya keseimbangan antara rohmani dan jasmani, spiritual dan material seperti tercantum dalam undang-undang mengenai pendidikan tetapi dalam implementasinya dalam "ruh" material lebih kuat serta lebih mengedepan, dan itupun lagi-lagi masyarakat menerimanya tanpa *reserve.*

Hasil dari pendidikan yang lebih berorientasi materi dan kering dari nilai-nilai moralitas religius seperti yang terlihat

fenomena yang terjadi di masyarakat, yakni terbentuknya komunitas manusia, semula jumlahnya minoritas, yang tercabut dari akar budaya masyarakatnya. Dalam jangka panjang komunitas tersebut kian membesar, dan pada akhirnya justru memberikan warna budaya yang dominan. Fungsi sekolah sebagai *agent of social change* yang idealnya melestarikan budaya yang telah ada serta mengembangkannya dan menjadi pijakan dalam pencapaian kemajuan masyarakat bangsa dan negaranya, justru menjadi lembaga yang mengelimir budaya masyarakat yang telah ada dan mengadopsi budaya luar (materialisme, kapitalisme dan sekularsime).

Alih ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan tidak membabi-buta tidak 'diijinkan/difilter' terlebih dahulu. Hal itu terjadi karena sifat inferioritas budaya (rendah diri) yang diidap oleh mayoritas pejabat pemerintah yang munculnya pada anggapan bahwa apapun yang berasal dari luar (negara-negara Barat) selalu lebih baik dan pasti cocok untuk dikembangkan seutuhnya di negeri ini.

Dalam jangka panjang kebijakan di bidang pendidikan yang ruh materialisme yang sangat kental ini berdampak pada cara pandang masyarakat terhadap pendidikan yang kian tereduksi. Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pendidikan itu hanyalah pemerintah, dan lebih dipersempit lagi Departemen Pendidikan. Pendidikan itu berkonotasi hanya pada sekolah, itupun orientasinya pada kognisi dan keterampilan kerja yang kadar keberhasilannya diukur dengan sejauh mana bisa menghasilkan uang setelah lulus sekolah kelak. Sekolah yang baik adalah sekolah yang outputnya memiliki NEM tinggi, bekerja di perusahaan-perusahaan yang memberikan gaji tinggi (meski dengan cara KKN), dan lain sebagainya.

Keluarga dan lingkungan masyarakat bukan lagi dianggap sebagai bagian dari proses pendidikan (tidak bertanggungjawab terhadap keberhasilan pendidikan terhadap suatu bangsa). Sehingga tidak heran kalau banyak sekali perilaku-perilaku masyarakat (yang

celakanya dia ada dalam posisi sebagai *public figure*) yang terkesan berbuat "semau gue" (baca: melanggar norma-norma sosial dan agama) karena tidak pernah dalam benaknya dia ikut bertanggungjawab terhadap pendidikan masyarakatnya.

Political will

Bercermin kepada keberhasilan pendidikan yang diterapkan beberapa negara maju, dimana pendidikannya berhasil menumbuhkan sifat-sifat atau bibit-bibit kesanggungan yang digali dari akar tradisi masyarakatnya. Maka revitalisasi pendidikan di Indonesia adalah suatu yang sangat mendesak, mengembalikan tujuan pendidikan kepada tujuannya semula, yakni menciptakan manusia seutuhnya. Pendidikan yang melandaskan pada akar tradisi masyarakat yang agamis, melandaskan pendidikan kepada tujuan penciptaannya sebagai makhluk Tuhan (tauhid), menghamba kepada Yang Maha Pencipta.

Paradigma pendidikan yang selalu mendewakan intelektual, sekularis dan berkecenderungan materialis perlu direvisi. Model/produk pendidikan asli pribumi, semisal pesantren misalnya, secara esensial perlu terus digali, karena biar bagaimanapun tidak satu model pendidikan dimanapun yang sempurna sifatnya. Pendidikan merupakan proses pengembangan suatu kemampuan pribadi yang sangat berkaitan dengan tuntutan jamannya.

Tetapi sejarah mencatat bagaimana komunitas pesantren ini memiliki komitmen kebangsaan yang kuat (ketika revolusi fisik dulu), pemberdayaan sumber-sumber ekonomi (tanpa harus bergantung kepada pemerintah), penghargaan terhadap kerja dan ilmu, semuanya merupakan syarat minimal yang harus dipunyai suatu bangsa yang akan maju. Konsep pendidikan pesantren yang mensyaratkan peserta didiknya terlebih dahulu memiliki kedekatan dengan Tuhannya sebelum menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang notabene sumbernya dari Tuhan juga adanya, merupakan konsep yang ideal bangsa ini. Kedekatan dengan Tuhan

idealnya akan menumbuhkan sifat unggul dari peserta didik untuk kemajuan bangsa.

Dengan melandaskan paradigma pendidikan kepada akar tradisi religius masyarakat sebenarnya tidak perlu ada kecemasan kita akan semakin tertinggal jauh dengan ngara lain, baik secara ekonomi maupun teknologi. Tradisi keagamaan yang untuk kalangan tertentu dianggap hanya terdiri dari rumusan-rumusan etika ketuhanan, ternyata menyimpan khasanah etika sosial ekonomi yang sedemikian melimpah. Profesionalisme-untuk mengambil satu contoh- yang yang merupakan syarat mutlak mengerjakan suatu pekerjaan, sangat disukai Tuhan, demikian disebutkan dalam sebuah ayat (*Innallaha yuhibbul mutawakkiliin*).

Workoholik (pekerja keras) merupakan tuntutan agama dan banyak lagi yang prinsip-prinsip dalam bidang sosial ekonomi lainnya yang tidak kalah dahsyatnya dengan slogan-slogan yang kerap dilansir dari literatur negara-negara yang telah lebih dulu maju. Semuanya menunjukkan bahwa tidak semestinya kita mengidap inferioritas manakala berhadapan dengan kekayaan budaya luar, hanya persoalannya kita tidak pernah menggali dan menumbuhkan perasaan memiliki kekayaan budaya sendiri.

Akhirnya, proses revitalisasi pendidikan yang bersifat makro ini berpulang kepada sikap pemerintah kita, terutama dalam memandang pendidikan itu sendiri. Apakah hanya merupakan komplemen belaka ataukah sebagai bidang yang diutamakan dalam strategi pembangunannya (minimal dilihat dari anggarannya, apakah hanya total 6% dari total APBD ataukah 25% nya).

Di sisi lain peran dari para praktisi pendidikan sebagai orang yang mengerti betul tentang makna pendidikan harus tetap meneguhkan komitmennya dalam membangun moral peserta didik. Melandaskan pola, metode dan pendekatannya dengan landasan tauhid, menjadikan agama bukan sebatas pengetahuan belaka,. Tetapi memandang agama sebagai sesuatu yang harus dihayati dan diamalkan secara optimal dalam kehidupan sehari-hari serta

menjadikannya sebagai bekal dalam mengadakan pendekatan kepada peserta didiknya.

TENTANG PENULIS



SUKARDI

Asli wong cerbon

- SDN Kejaksan 1 Cirebon

MTs Negeri 1 Cirebon

- SMEA Negeri Cirebon
  Tata Buku

IKIP Bandung D3
Pendidikan Akuntansi

- Unswagati Cirebon S1
  Pendidikan Akuntansi

IAIN Syekh Nurjati Cirebon S2
Ekonomi Syariah

- Universitas Persada Indonesia Jakarta S3
  Akuntansi Manajemen

Ketua Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid (BKPRMI) Kota Cirebon (95-98)

- Penggiat Klub Kajian Gerbang Informasi

Ketua Lembaga Pembina Pengawas Keuangan Muhammadiyah (LPPKM) Kota Cirebon

- Staf pengajar LP3I Cirebon

Staf Pengajar SMAN 4 Kota Cirebon